

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2010 – 2030
(Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



**Oleh :
Adhitia Listiawati
NIM. 6661091647**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Juli 2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adhitia Listiawati
NIM : 6661091647
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 18 September 1991
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “implementasi Peraturan Daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 sistem prasarana drainase dan pedestrian) ” ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, 18Maret 2016

Adhitia Listiawati

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Adhitia Listiawati
NIM : 6661091647
Judul Skripsi: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2010–2030 (STUDI KASUS: PASAL 17 SISTEM PRASARANA DRAINASE DAN PEDESTRIAN)

Serang, 18Maret 2016

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Kandung S. Nugroho, S.Sos, M.Si

NIP. 19740501200501105

Rahmawati, S.Sos., M.Si

NIP. 197905252005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADHITIA LISTIAWATI

NIM : 6661091647

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NO.6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SERANG 2010-2030 (STUDI KASUS :
PASAL 17 SISTEM PRASARANA DRAINASE DAN
PEDESTRIAN).

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 20
Juli 2016 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 20 Juli 2016

Ketua Penguji:
Ipah Ema Jumiati, M.Si
NIP. 197501312005012004

.....

Anggota:
Anis Fuad, M.Si
NIP.198009082006041002

.....

Anggota:
Kandung Sapto N.,M.Si
NIP. 197809182005011002

.....

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Ketua Program Studi

Dr.Agus Sjafari M.Si

Listyaningsih, M.Si

NIP. 19710824 2005011 002

NIP. 197603292003122001

“Jangan Pikirkan Kegagalan Kemarin.

Hari ini Sudah Lain.

Sukses Pasti Diraih

Selama Semangat masih menyengat”

Karya kecil ini aku persembahkan untuk Mamah & (Alm) Papah, serta Orang-orang yang Kukasih, Teh Retno, Teh Lussy, Ajajay, Desi dan Okje

ABSTRAK

ADHITIA LISTIAWATI. NIM 6661091647. Pembimbing I: Kandung Supto Nugroho, S.Sos., M.Si., Pembimbing II: Rahmawati, S.Sos., M.Si. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata Kunci : Implementasi, Perda, Tata Ruang Wilayah, Drainase

Penelitian ini di latar belakanginya perlunya perencanaan sebuah Kota yang baik, salah satu komponen dasarnya adalah drainase. Peran drainase yang vital bagi sebuah kota adalah sebagai sarana pengaliran air hujan. Dengan telah ditetapkan RTRWN maka selanjutnya perlu disusun dan ditetapkan pula RTRW tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi perkembangan kawasan yang sangat cepat telah mengakibatkan luas resapan air hujan di Kota Serang berkurang. Tujuan penelitian kali ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Peneliti menggunakan teori Metter and Horn dalam buku Agustino (2012:142-144). Metode yang digunakan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan di Lapangan menunjukkan bahwa petugas Satpol PP juga sulit untuk melakukan penertiban karena adanya *backing-an* aparat penegak hukum dibelakang para PKL. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta terkait tugas/wewenang. Prasarana drainase di jalan raya di Kota Serang banyak yang tidak terawat, banyak tanaman liar tumbuh dan juga banyak saluran drainase yang tertutup, serta di dalam saluran drainase banyak yang di temukan dengan tumpukan sedimen dan juga sampah. Rekomendasi yang dapat diberikan perlu adanya peninjauan kembali berita acara kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta. Pentingnya sosialisasi keseluruhan wilayah Kecamatan di Kota Serang. Dan melakukan pemeliharaan drainase secara berkala.

ABSTRACT

ADHITIA LISTIAWATI. NIM 6661091647. Implementation of Serang City Regional Regulation No.6 of 2011 on Spatial Plan of Serang City in 2010-2030 (Case Study : Article 17 System of Drainage Infrastructure and Pedestrian). Public Administration Department Faculty of Sosial and Political Science University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisors I : Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Advisors II : Rahmawati, S.Sos., M.Si.

Keywords : Implementation, Legal Regional Regulation, Urban Planning, Drainage

This research was conducted with the background of necessity of scheme for a well-founded city, and one of the basic components is drainage system since RTRWN has been decided. This it was necessary to set RTRW for both Province and County/City level. Rapid economic development, followed by tenacious development of some regions, has depleted the range of rain absorption area in Serang City in 2010-2030 (Case Study : Article 17 System of Drainage and Pedestrian). The researcher referred to the method of Metter and Horn in The book of Agustino (2012 : 142-144), used qualitative method, While collecting data techniques that have been used were interview, observation, and Satpol PP was Struggling to Control the situation, due to the existence of lawmakers who supported the street vendors looks of coordination between government and private companies was cause by blurry authority in both parties. Drainage infrastructure in Serang City was mostly lack of maintainance. Moreover there were lots of bushes covering the drainage. Mound of cediment and rubbish made the drainage got into worse condition. It is recommended that the government and private companies revise the agreement about the drainage, and create association with the government in all subdistricts in Serang City to introduce the importance of drainage infrastructure to the society. Furthermore, regular maintenance toward the drainage infrastructure is urgently needed.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)”.

Maksud dan tujuan diajukannya Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial program studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penyusunan proposal penelitian ini penulis menemukan banyak hambatan dalam penyelesaiannya, namun semua dapat diatasi berkat do'a dan usaha dari penulis serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

Persembahkan Khusus penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kemudahan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.I.Kom., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda, Phd.D., Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ima Maesaroh, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih arahan, bimbingan dan masukannya.
9. Kandung Sapto N, M.Si., Dosen Pembimbing I dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan dan masukannya.
10. Rahmawati, M.Si., Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, bimbingan dan masukannya.
11. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Seluruh pegawai dan Staf Dinas Tata Kota Serang yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan data yang saya butuhkan.

13. Kedua orang tuaku, Papah Haryono Ismail (Alm), Mamah Yayah Mardiyah yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, semangat, motivasi, kesabaran serta doa yang senantiasa dipanjatkan untukku setiap hari menjadi nafas bagi hidupku
14. Kakak-kakakku, adikku yang selalu memberikan semangat. Teh Retno, Teh Lussy, A Jajay dan adikku Desi, serta seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan dan tak henti-hentinya mengingatkanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Okie Satrio Ariefianto, seseorang yang selalu mendamaikan hati, terima kasih atas kesabaran, masukan serta dukungannya
16. Untuk Sahabat-sahabatku, Wilsa, Kiki, Genny, Corry, Citra, Zakiah, Noor Linda, Jaya, Linda S, Mariska, terima kasih atas kritik, saran, canda tawa dan hari hari yang kita lakukan bersama.
17. Teman-teman Ane B angkatan 2009. Terima Kasih menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman UKM KLASIK (Keluarga Seni Musik Kampus) Untirta. Terima kasih untuk pengalaman, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu ada di saat saya senang maupun susah.
19. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun berbagai pihak guna menyempurnakannya di masa mendatang. Amin.

Serang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
1.7 Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori	23
2.1.1 Administrasi Pembangunan	23
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	25
2.1.2.1 Pengertian Implementasi	25
2.1.2.2 Kebijakan Publik	27
2.1.2.3 Pengertian Kebijakan Publik	30
2.1.3 Peraturan Daerah	44
2.1.4 Tata Ruang Wilayah	46

2.1.5 Drainase	47
2.1.5.1 Pengertian Drainase	47
2.1.5.2 Standar dan Sistem Penyediaan Drainase Kota	49
2.1.5.3 Sistem Jaringan Drainase	51
2.1.5.4 Jenis-Jenis Drainase	52
2.1.5.5 Arahan dalam Pelaksanaan Penyediaan Sistem Drainase	54
2.1.5.6 Pola Jaringan Drainase	56
2.1.5.7 Prosedur Perancangan Tata Letak Sistem Jaringan Drainase	57
2.1.5.8 Bangunan Penunjang	58
2.2 Penelitian Terdahulu	59
2.3 Kerangka Berfikir	62
2.4 Asumsi Dasar	64

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	65
3.2 Fokus Penelitian	67
3.3 Lokasi Penelitian	67
3.4 Variabel Penelitian	68
3.4.1 Definisi Konsep	68
3.4.2 Definisi Operasional	71
3.5 Instrumen Penelitian	75
3.6 Informan Penelitian	76
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	80
3.8 Validitas Data	103

3.9 Jadual Penelitian	104
-----------------------------	-----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	106
4.1.1. Gambaran Umum Kota Serang	106
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang	118
4.1.3. Gambaran Umum Dinas Tata Kota Kota Serang	122
4.1.4. Gambaran Umum (Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Infomatika (Dishubkominfo) Kota Serang	124
4.1.5. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	127
4.1.6. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	132
4.2. Deskripsi Data	134
4.2.1. Deskripsi Wilayah Penelitian	134
4.2.2. Deskripsi Data	135
4.2.3. Daftar Informan Penelitian	137
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian	144
4.3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	147
4.3.1.1. Standar dan Sasaran Tertentu	147
4.3.2. Sumber Daya	155
4.3.2.1. Sumber Daya Finansial	155

4.3.2.2. Sumber Daya Waktu	160
4.3.2.3. Sumber Daya Manusia	162
4.3.3. Karakteristik Agen Pelaksana	165
4.3.3.1. Organisasi	165
4.3.3.2. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan ...	168
4.3.4. Sikap/Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana	170
4.3.4.1. Pengetahuan	170
4.3.4.2. Respon	172
4.3.4.3. Intensitas	176
4.3.5. Konunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	177
4.3.5.1. Koordinasi	177
4.3.5.2. Konsisten	181
4.3.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	184
4.3.6.1. Kekondusifan	184
4.4 Pembahasan.....	189

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	197
5.2. Saran	199

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1.1.Surat Ijin Penelitian	
1.2.Jadwal Wawancara	

1.3.Rekapitulasi Temuan Lapangan	
1.4.Memberchek	
1.5.Kisi-kisi Pedoman Wawancara	
1.6.Matriks Wawancara Setelah Reduksi	
1.7.Lokasi Serta Kondisi Sistem Prasarana Drainase Di Kota Serang	
1.8.Jadwal Bimbingan	
1.9.Data-data/Dokumen Penelitian	
1.10. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang bumi dimana tempat semua makhluk tinggal, harus dikelola sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran yang sempurna, untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. hal tersebut berkaitan dalam konteks perundang-undangan Negara kita, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila.

Masalah yang muncul ke permukaan tentang penataan tata ruang di Indonesia yang sedang dihadapi permasalahan kondisi keterbatasan ruang wilayah, sementara kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat, maka diperlukan pendekatan pengelolaan ruang wilayah nasional secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan,

yang kemudian kita kenal dengan pendekatan penataan ruang. Kemudian lahirnya suatu kebijakan umum merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini ialah kepentingan masyarakat, karena hal ini merupakan hakekat dari suatu kebijakan. Pencapaian tujuan dari kebijakan publik itu sendiri dapat terlihat dari kesejahteraan ruang masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara Pusat dan Daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan sedangkan daerah adalah wilayah atau area. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengendalikan untuk kepentingan wilayah atau daerah itu sendiri. Dan pengertian lainnya menjelaskan, otonomi daerah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Melalui otonomi ini dimungkinkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan

identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada publik. Setelah diberi wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri melalui Otonomi Daerah. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan Daerah Perkotaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur juga mengenai masalah Perkotaan baik menyangkut masalah status Daerah/kawasan Perkotaan, pemerintah, pengelolaan kawasan, pelibatan swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perkotaan. Hal-hal mengenai pengelolaan kawasan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan-undangan lainnya. Bagi pemerintah daerah, menurut Undang-Undang ini memiliki lebih banyak kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dan diberi kewenangan melaksanakan semua tahapan siklus pengelolaan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Lahirnya Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) No.26 pada tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan era baru dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Rencana tata ruang sebagai produk utama penataan ruang merupakan matra spasial dalam pengembangan wilayah dan kota yang dibentuk atas dasar kesepakatan semua pihak, baik sektor maupun

daerah. Atas dasar kesepakatan tersebut, maka rencana tata ruang semestinya secara konsisten menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tentunya tidak hanya berjalan dengan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya pada tataran spasial yang makro. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mendorong investasi di segala bidang, diperlukan rencana tata ruang pada tataran yang lebih operasional . untuk itu penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maupun RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya perlu menjadi perhatian bersama. Perencanaan tata ruang pada tingkat nasional telah disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan telah ditetapkannya RTRWN tersebut maka selanjutnya perlu disusun dan ditetapkan pula RTRW tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang salah satu acuan utamanya adalah RTRWN tersebut.

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang

wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tersebut ditetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penataan ruang itu sendiri meliputi: (i) perencanaan tata ruang, (ii) pemanfaatan ruang, dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada daerah perkotaan, seringkali juga timbul berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor penyebabnya, seperti faktor sistem hukum, faktor kendala alam, maupun faktor perilaku manusia itu sendiri. Kawasan perkotaan umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, pusat industri, dan pusat pertahanan politik, sehingga kota relatif harus di tata sedemikian rupa agar dalam pengembangan wilayah perkotaan tidak ada yang dirugikan dikemudian harinya demi menunjang kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Perkembangan kota di satu sisi sangat terkait pada faktor penduduknya, di sisi lain sangat bergantung dari daya dukung lahan, belum lagi masalah kemampuan daerah tersebut sendiri, ditinjau dari segi pendanaan atau anggaran biaya (Hakim dan Utomo, 2003: 2).

Suatu kota pada hakekatnya akan senantiasa tumbuh dan berkembang, baik melalui rencana maupun tanpa rencana kota. Yang membedakan adalah bahwa apabila suatu kota tumbuh tanpa direncanakan terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah suatu bentuk kota yang alami, tumbuh secara spontan dan

cenderung tidak dapat dikendalikan. Namun sebaliknya apabila suatu kota telah melalui proses perencanaan dan perancangan yang matang, maka pertumbuhan dan perkembangan kota menjadi lebih terarah dan dapat dikendalikan dengan baik. Penataan ruang kota yang keliru, jelas akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan seperti kondisi asalnya, sebab berdampak pada struktur ruang kota atau kawasan tertentu di dalam kota karena pembangunan kota pada dasarnya bertumpu dan berorientasi di seputar kepentingan kesejahteraan masyarakat atau warga kota, maka apabila hal ini terjadi secara terus menerus, dan tidak ada upaya untuk mencegahnya, maka cepat atau lambat pada gilirannya akan berdampak pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan, disamping beban gaji pemerintah daerah atau kota akan semakin bertambah pula (Anggriani, 2009: 1-2).

Kota Serang adalah daerah baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang, terbentuk secara resmi pada tanggal 10 Agustus 2007 melalui UU No. 32 Tahun 2007. Kota Serang memiliki luas wilayah adalah 266,79 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan, 60 Desa/Kelurahan dan 36 diantaranya adalah Kelurahan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang

Kecamatan	Luas Wilayah	
	Km ²	%
Curug	49.6	18.59
Walantaka	48.48	18.18
Cipocok Jaya	31.54	11.82
Serang	25.88	9.7
Taktakan	47.88	17.95
Kasemen	63.36	23.75

Sumber : <http://serangkota.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=111> Tahun 2013

Dalam perencanaan sebuah kota, salah satu komponen dasarnya adalah drainase sebagai fasilitas dasar yang dirancangnya memenuhi kebutuhan masyarakat. pengadaan drainase berfungsi diantara untuk mengalirkan air hujan, estetika kota, pengairan atau sumber air. Peran drainase yang vital bagi sebuah kota adalah sebagai sarana pengairan air hujan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi perkembangan kawasan yang sangat cepat dengan tumbuhnya gedung-gedung dan bangunan pada hampir semua kawasan telah mengakibatkan luas resapan air hujan di Kota Serang berkurang dengan cepat pula yang pada akhirnya akan menimbulkan titik genangan/banjir baru. Banjir dan genangan disebabkan oleh kondisi kapasitas saluran drainase yang lebih kecil dari debit banjir yang terjadi sehingga ditemui beberapa genangan pada saat musim penghujan yakni pada kondisi terjadi hujan deras. Saluran gorong-gorong di ruas jalan seperti tidak berfungsi, air yang menggenang di jalan tidak mau turun ke saluran drainase, juga disebabkan *drain inlet* di pinggir jalan terlalu kecil bahkan tersumbat pasir/tanah. Permasalahan lainnya yang menjadi tantangan dalam permasalahan drainase yakni bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam saluran drainase karena dapat membuat saluran drainase menjadi tersumbat. Tersumbatnya sampah di dalam saluran drainase menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar sebagaimana mestinya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 September 2013, Peneliti melihat adanya air yang tergenang di jalan depan Hotel

Le Dian, hujan yang turun yang hanya berkisar 1(satu) jam saja dapat menyebabkan air meluap ke jalan raya. Disamping kanan Hotel Le Dian terdapat saluran drainase dengan ukuran yang lumayan besar dan juga terdapat gorong-gorong di sepanjang jalannya. Drainase dipenuhi sampah-sampah plastik dan daun-daun kering serta adanya endapan pasir di dalamnya. Temuan ini memungkinkan drainase belum bisa menampung air secara maksimal. Program pengembangan dan pembangunan prasarana drainase dalam meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani. Program ini termasuk ke dalam program utama yang ada di dalam Peraturan Daerah kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana program ini sudah di jadwalkan pada tahun 2013.

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara awal pada tanggal 8 Mei 2014, peneliti bertemu dengan seorang tukang ojek. Yang berusia sekitar 30 tahun di daerah Jl. Raya Petir yang biasanya menunggu penumpang di pinggir jalan lampu merah, ia menceritakan bahwa setiap hujan datang di daerah tersebut pasti akan banjir. Hal ini diakui oleh bapak itu bahwa banjir yang terjadi sudah berlangsung lama. Jika peneliti lihat kondisi drainase daerah tersebut tidak bermasalah. Ukurannya cukup besar, namun tampak tidak terawat dan terdapat tumpukan sampah.

Selain sistem prasarana drainase yang buruk di jalan perkotaan di Kota Serang, banyak beberapa perumahan di Kota Serang tidak memiliki drainase yang baik, seperti yang bisa kita sering jumpai di Perumahan Komplek Untirta, Perumahan Bumi Mutiara Serang, Perumahan Queen Garden (Ciracas). Tak kala

hujan besar mengguyur Kota Serang, Perumahan – Perumahan tersebut mengalami banjir. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 31 Januari 2015.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang, terkait permasalahan implementasi Perda, mengenai banyaknya permasalahan yang ada di lapangan mengenai drainase. Pihak Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang mengkonfirmasi bahwa pelaksana dari kegiatan implementasi dari Perda tersebut ada yang di jalankan oleh SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal) di tingkat Provinsi. Jadi tidak semua permasalahan dari penyediaan sistem prasarana drainase sesuai dengan yang ada pada ayat (1) Pasal 17 yang ada di Kota Serang di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Jika jalan yang ada di Kota Serang tersebut masuk ke dalam jalan Nasional, Pelaksana kebijakannya di lakukan oleh SNVT (Satuan Kerja Non-Vertikal). Terkait pemeliharaan dan perawatan sistem prasarana drainase tidak bekerja sama dengan Dinas kebersihan. Jadi yang sepenuhnya memegang kendali adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang bagian SDA.

Tabel 1.2 Lokasi Dimensi dan Kondisi Eksisting Drainase Kota Serang

No	Lokasi	Kondisi
1	JL. Jenderal Sudirman (Hotel Le Dian)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Sedimen • banyaknya sampah
2	JL.Raya Petir Cipocok, Bhayangkara	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong tertutup rumput

		<ul style="list-style-type: none"> • Saluran bagian hulu dan hilir gorong-gorong masih alami
3	JL.Raya Petir Pertigaan Lampu Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong tersumbat oleh endapan sedimen • Saluran bagian hilir gorong-gorong masih alami dan tertutup oleh rumput-rumput • Saluran di kiri dan kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen dan rumput-rumput
4	JL. Ki Ajurum Kampung Sempu	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran bagian hilir gorong-gorong sudah terbuat dari pasangan namun dimensinya masih kecil dan berada di tanah milik warga halaman belakang • Saluran kanan kiri jalan tertutup oleh endapan sedimen
5	JL. Warung Pojok	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam saluran terdapat banyak sampah dan sedimen pada saluran
6	JL. Ahmad Yani (dealer Honda)	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup beton sehingga sulit dikontrol dan dilakukan perawatan oleh dinas terkait
7	JL. Ahmad Yani (Kantor Wali Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
8	Bunderan Ciceri Indah	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
9	JL.Raya Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran di bagian Hulu dan hilir gorong-gorong masih alami dan tertutup oleh rumput-rumput • Tidak ada saluran dari kiri dan kanan jalan • Gorong-gorong bagian hulu tertutup oleh rumput-rumput

10	JL.Raya Petir Depan Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Gorong-gorong tertutup oleh endapan sedimen • Saluran di bagian kiri dan kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen
11	JL.Raya Petir Sebelah Perumahan Citra Gading	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran drainase lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran di bagian hulu dan hilir gorong-gorong masih alami
12	JL.Raya Pandeglang KM 6.6 Serang Pengadilan Tinggi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada gorong-gorong • Tidak adanya saluran pembuangan/outlet
13	JL.Perumahan Permata Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran lebih kecil dari banjir yang terjadi
14	Perumahan Bumi Serang Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup oleh endapan sedimen, sampah dan rumput-rumput
15	JL. Ahmad Yani Depan Bank Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong tersumbat oleh pipa sehingga aliran airnya terhambat • Kapasitas saluran lebih kecil dari pada debit banjir yang terjadi
16	JL.Lontar Keagungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran bagian hilir gorong-gorong sudah terbuat dari pasangan namun terdapat endapan sedimen dan sampah
17	JL.Raya Mayor Safei	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya saluran drainase di bagian kiri maupun kanan jalan
18	JL. Yusuf Martadilaga Pojok Alun-Alun Depan Spoot Hall	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup oleh endapan sedimen dan sampah • Gorong-gorong tertutup oleh endapan sedimen
19	JL.Raya Taktakan SMAN 3 Taktakan	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup endapan sedimen dan rumput-rumput

		<ul style="list-style-type: none"> • Saluran di bagian hilir gorong-gorong masih alami dan dimensinya juga kecil serta banyaknya rumput-rumput
20	JL.Raya Cilegon Depan Sekolah SPPN	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran di kiri dan di kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen dan ditumbuhi rumput-rumput • Saluran depan toko mebel di urug
21	Kampung Rujak Beling	<ul style="list-style-type: none"> • Muka air laut naik/ROB • Pintu air di bagian outlet sudah tidak berfungsi lagi dengan baik atau rusak • Endapan sedimen di saluran
22	Museum Banten Lama	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya tanaman air yang tumbuh/eceng gondok • Endapan sedimen di saluran • Tidak ada outlet ke pembuangan akhir
23	Komplek Untirta	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran tidak terawat dan rusak/tidak berfungsi
24	JL.Jendral Sudirman (Patung)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong pada hilir lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran pada bagian hilir masih alami dan banyak rumput • Terdapat tiang listrik yang dibangun di tengah saluran • Sebagian tidak dilengkapi saluran drainase
25	JL.Jendral Sudirman (Pasar Buah-Buahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput dan sampah • Saluran di bagian hilir gorong-gorong masih alami dan tidak jelas alurnya

26	JL.Saleh Baimin	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak sampah pada saluran
27	JL.Ayip Usman	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak rumput-rumput • Banyak sampah pada saluran, terutama pada gorong-gorong
28	Perumahan Bumi Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput • Saluran masih alami
29	JL.Cinanggung (Rau)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
30	JL. Samsun Bakri	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
31	JL.Cimuncang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput • Saluran tertutup endapan lumpur
32	Komplek Perumahan Cimuncang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak sampah pada saluran • Banyak sedimen yang mengakibatkan pendangkalan saluran

33	Masjid Al Ittihad	<ul style="list-style-type: none"> • Di atas saluran di bangun rumah yang mengakibatkan kapasitas saluran untuk menampung debit banjir yang berkurang • Saluran pada bagian hilir masih alami • Banyak sampah pada bagian hilir
----	-------------------	--

Sumber : Dinas PU Kota Serang 2013

Permasalahan–permasalahan di atas termasuk ke dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Pasal 17 Tentang Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian. Peneliti melakukan observasi ke beberapa tempat yang terdapat di dalam tabel, setelah melihat langsung ke lokasi peneliti menemukan beberapa drainase dipenuhi sampah, tertutup sedimen, dan juga tumbuh-tumbuhan rumput.

Dalam Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan yang di dasarkan pada konsep kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya air yaitu pengendalian air hujan agar lebih banyak meresap ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan.(SNI 02-2406-1991,Tata Cara Perencanaan Drainase Perkotaan). Drainase yang baik mampu menghindari adanya pembusukan dalam pengaliran air buangan harus sudah tiba di bangunan pengolahan tidak lebih dari 18 jam. Koordinasi dengan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 di konfirmasi baik.

Dari uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, untuk melihat dan mengetahui lebih lanjut apakah Pelaksanaan program-program yang telah di kukuhkan Pemerintah Daerah Kota Serang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, maka pada kali ini peneliti merasa terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan di atas dengan mengambil judul penelitian “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030(Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)**”.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas oleh peneliti, maka penelitian pada kali ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu sebagai berikut:

1. Prasarana drainase di jalan raya di Kota Serang banyak yang tidak terawat, banyak tanaman liar yang tumbuh dan juga banyak saluran drainase yang tertutup, serta di dalam saluran drainase banyak di temukan tumpukan sampah dan sedimen
2. Prasarana drainase pada kawasan perumahan di Kota Serang tidak mampu menampung debit air yang ada ketika hujan turun.
3. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan salurann drainase masih kurang.

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membatasi ruang lingkup permasalahan. Maka, penelitian fokus pada objek penelitian yaitu pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase). Dikarenakan Pedestrian sudah diteliti oleh saudara Cory Dzikri Fitriansyah dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan jalur Pedestrian dan Fasilitas Pendukung Pejalan Kaki pada Tahun 2013”. Dengan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Jalur Pedestrian dan Fasilitas Pendukung Bagi Pejalan Kaki di Kota Serang dapat dijelaskan melalui teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:215) :

1. Orang-Orang yang Mengambil Bagian dalam Interaksi Sosial

Instansi pemerintah yang berwenang dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki ialah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang sebagai penyedia trotoar serta penerangan jalan umum, Dishubkominfo Kota Serang sebagai penyedia jembatan penyeberangan orang (JPO), halte, rambu lalu lintas, zebra cross, serta lampu lalu-lintas, Bappeda Kota Serang sebagai perencana peraturan mengenai pembangunan fasilitas pejalan kaki di Kota Serang, serta Satpol PP sebagai pengawas terhadap ketertiban penggunaan fasilitas umum di Kota Serang terhadap penyalahgunaan yang terjadi. Namun dalam pelaksanaannya masih terhambat karena kurangnya koordinasi antara instansi dan pemerintah

daerah terkait, baik itu pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah daerah Kota Serang terhadap pembagian kewenangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki di Kota Serang.

2. Perilaku yang Muncul dalam Interaksi tersebut

Belum ada penanganan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Serang terhadap penyediaan jalur pedestrian dan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kota Serang, baik itu dalam bentuk pembangunan, peremajaan ataupun perawatan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki yang berada di Kota Serang.

2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku serta kaitan antara orang dan perilaku

Pembangunan fasilitas pejalan kaki di Kota Serang hingga saat ini masih belum dilakukan. pembangunan pedestrian di Kota Serang mulai dilakukan pada tahun 2016 nanti. Akibatnya, pelanggaran banyak terjadi yang dilakukan pejalan kaki itu sendiri. pelanggaran ini merupakan dampak dari ketidaktersediaan fasilitas pejalan kaki yang layak di Kota Serang. Masyarakat sendiri menaruh harapan yang sangat besar terhadap pemerintah daerah Kota Serang dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kota Serang, selain itu juga masyarakat mengeluhkan kesigapan pemerintah daerah Kota Serang masih lambat merespon apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diambil, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian).

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, manfaat teoritis, kedua manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi dari suatu kebijakan publik.
2. Menjadi referensi berpikir dan menambah cakrawala penerapan ilmu di bidang sosial, khususnya Ilmu Administrasi Negara.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan di kelas. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sarana latihan bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Bagi Pemerintah Kota Serang

Merupakan gambaran dan bahan evaluasi dalam mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi beberapa subab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan penjabaran dari keseluruhan permasalahan yang didapat yang dijabarkan secara deduktif dimana pembahasan diuraikan dari mulai pembahasan yang bersifat umum hingga dikerucutkan menjadi pembahasan yang lebih khusus. Identifikasi

masalah merupakan inti dari permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan di latar belakang masalah yang diringkas per poin yang selanjutnya dibatasi dalam satu cakupan masalah pada sub bab batasan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dicari jawabannya oleh peneliti. Sedangkan tujuan penelitian merupakan tujuan dilakukannya penelitian itu untuk apa. Dan yang terakhir ialah sistematika penulisan yang didalamnya dijelaskan mengenai susunan penulisan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa sub bab yang mendeskripsikan kumpulan dari beberapa teori yang berkaitan dengan judul dan isi penelitian, kerangka berfikir yang merupakan penggambaran dari siklus atau alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta asumsi dasar yang merupakan penyimpulan sementara yang dihasilkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di bab III ini dideskripsikan mengenai metodologi, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Selain itu instrumen yang merupakan peneliti itu sendiri, Validitas data, waktu dan tempat dilakukannya penelitian dijelaskan pula pada bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat penjabaran atau penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri yang menyangkut penjelasan deskripsi objek penelitian serta pengujian asumsi dasar dan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran yang dihasilkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

PENUTUP

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian kali ini, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori dari berbagai sumber. Adapun penjelasannya mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1 Administrasi Pembangunan

Definisi Administrasi Pembangunan menurut Siagian (2005:5) yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

Menurut Tjokroamodjojo (1995:13) administrasi pembangunanan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara

(pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan, kemudian siagian menyimpulkan bahwa terdapat tujuh ide pokok dalam administrasi pembangunan, antara lain :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu piak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam jangka panjang, sedang maupun jangka pendek
4. Rencana pembangunan mengandung makna, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas, diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut

mencangkup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejewantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

7. Dari keenam ide pokok diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga Negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya ditengah-tengah Negara lain. (Siagian, 2005 : 4-5).

Dari definisi pembangunan menurut siagian, kita dapat melihat dari tujuh ide pokok-pokok tersebut. Adanya suatu proses yang terus menerus , usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencangkup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di wujudkan dalam pengimplementasikan suatu kebijakan publik

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kederangannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.”

Begitu pula menurut Grindle dalam Agustino (2006:154), yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah tercapai”.

Terdapat berbagai definisi yang disampaikan para ahli mengenai Implementasi Kebijakan, diantaranya Metter dan Horn dalam Agustino (2006: 54) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Selanjutnya, Mazmanian dan Sebatier dalam Agustino (2006:54) mendefinisikan implementasi sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan baik dalam bentuk undang-undang atau berbentuk perintah-perintah harus dapat di pastikan terlebih dahulu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut memang untuk kebaikan banyak pihak bukan sebaliknya. Keterlibatan masyarakat dalam hal membuat suatu kebijakan diperlukan karena masyarakat yang lebih mengetahui apa yang memang dibutuhkan.

2.1.2.2 Kebijakan Publik

Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) di rancang oleh pemerintah kota Serang untuk mengatur penataan drainase Kota Serang dengan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Serang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kota Serang serta keserasian antarsektor. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan penataan ruang wilayah Kota Serang yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan untuk mewujudkan Kota Serang sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam mendukung kota serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk mengetahui definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri adalah sebagai berikut. Menurut Friedrich dalam Agustino (2006:7) kebijakan adalah :

”Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Heclo dalam Parsons (2001:14) kebijakan (*policy*) adalah Istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi kecil ketimbang gerakan sosial. Dye dalam Irawan (2006:139), yang menjelaskan bahwa Kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Berikutnya Menurut Udoji dalam Wahab (2005:5) mendefinisikan kebijakan publik:

“Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat“.Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Irawan (2006:139) adalah Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.Sejalan dengan definisi tersebut Anderson dalam Irawan (2006:1.39), mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Dunn dalam Irawan (2006:1.39), berpendapat bahwa:

“Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas dan lain-lain.”

Berbeda halnya dengan Wahab (2005:1) yang mendefinisikan policy bukan dengan istilah kebijakan melainkan kebijaksanaan. Ia menyatakan bahwa istilah policy (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Jones dalam Wahab (2012:4) menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Selanjutnya, Jenkins dalam Wahab (2005:4) juga mencoba mendefinisikan kebijakan publik yang disebut oleh Wahab dengan istilah kebijaksanaan negara.

Agustino (2006:42) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau

menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan publik, di jelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : pendekatan *top down* dan *bottom up*. dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, mirip dengan (*top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan yang mirip pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-

perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan terlansir dan memulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat). Sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Metter dan Horn (1975). Mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai berikut :

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digarisi dalam keputusan kebijaksanaan”.

berjalan secara Linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik Metter dan Horn dalam Agustino (2006 :164). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopiris) untuk melaksanakan di level warga , maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi (publik) akan sangat cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu meruabah periaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau kuas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakannya, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalam dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) Yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak

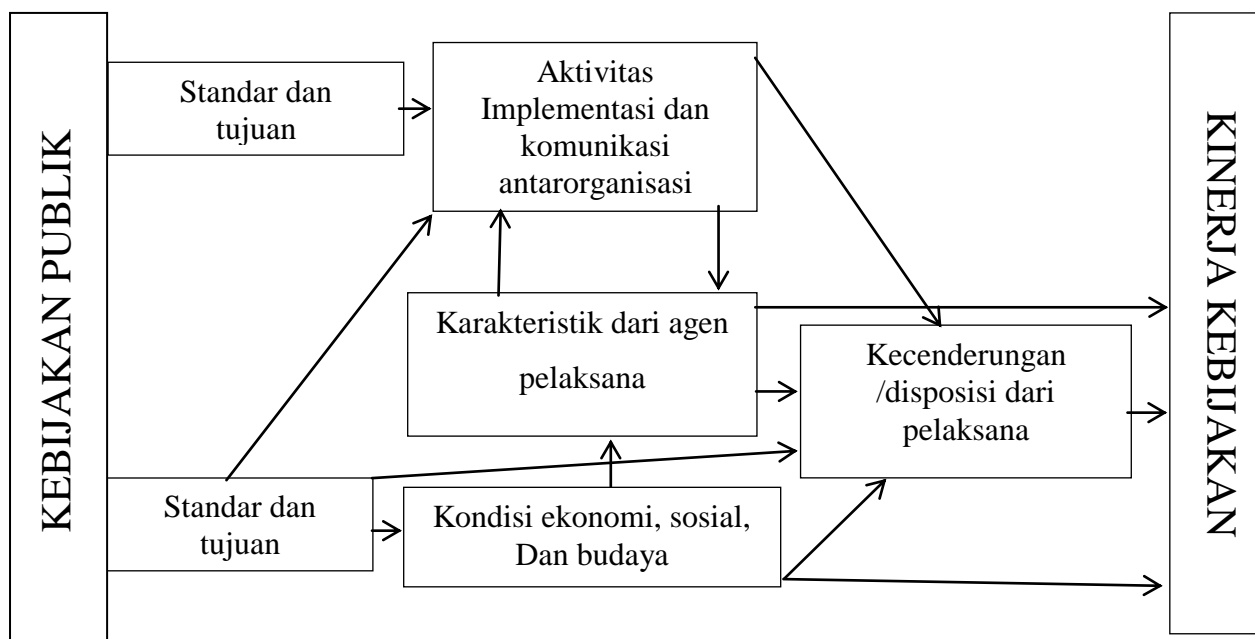
mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan Meter dan Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 2.1 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *implementation and Public Policy*

(1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

“pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengklasifikasikan implementasi kebijakan kedalam 3 variabel:

1. *Pertama*, variabel *independen*, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. *Kedua*, variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dengan dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. *Ketiga*, variabel *dependen*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dan lembaga/badan pelaksana dalam

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Hogwood dan Gunn (1978), menurut kedua pakar ini, melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

4. *Syarat pertama*, berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
5. *Syarat kedua*, adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan *fisibilitas* implementasi kebijakan.
6. *Syarat ketiga*, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
7. *Syarat keempat*, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
8. *Syarat kelima*, adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
9. *Syarat keenam*, adalah apakah saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak

dapat berjalan secara efektif-apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.

10. *Syarat ketujuh*, adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
11. *Syarat kedelapan*, adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci keefektifitas implementasi kebijakan.
12. *Syarat kesembilan*, adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
13. *Syarat kesepuluh*, adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada dampak bagi target kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

A. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

B. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas,

profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

C. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

D. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Edward III dalam Winarno (2007:126), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik.

Untuk itu, dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkap oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang terpenting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahapan ini keseluruhan tata laksana kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.1.3. Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Definisi lain tentang Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan daerah. Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Tata Ruang Wilayah Daerah;
4. APBD;
5. Rencana Program Jangka
6. Menengah Daerah;

7. Perangkat Daerah;
8. Pemerintahan Desa;
9. Pengaturan umum lainnya.

2.1.4 Tata Ruang Wilayah

Menurut Witoelar dalam buletin pengawasan (2000:23&24), kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Menurut Darwani, tata ruang kota dan wilayah itu adalah menentukan, merencanakan, dan memastikan bagaimana penggunaan ruang secara proporsional sehingga area yang ada di Jakarta dapat memenuhi aspek kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup pada kawasan kota tersebut ketiga aspek tersebut sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut.

Menurut Hidayat, tata ruang kota dan wilayah itu adalah suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Menurut Kusno, tata ruang tidak hanya berupa tampak fisik dari lingkungan saja tapi juga mempengaruhi pengakuan identitas. Baik individual atau kolektif. Ruang dengan kapasitas tersebut bisa menghapuskan identitas individu ataupun komunitas bahkan populasi sekalipun, melalui (sains,

teknologi, dan ekonomi) ilmu pengetahuan, politik etik dan simbol-simbol ritual yang dibuat oleh aparat-aparat kekuasaan.

2.1.5. Drainase

2.1.5.1. Pengertian Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu kawasan (perencanaan infrastruktur khususnya).

Menurut Suripin, (2004:7), drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Menurut Suhardjono (1948:1) drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan

dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain :

1. Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
2. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
3. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
4. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Sebagai salah satu sistem dalam perencanaan perkotaan, maka sistem drainase yang ada dikenal dengan istilah sistem drainase perkotaan. Berikut definisi drainase perkotaan menurut Hasmar (2002:1) :

1. Drainase perkotaan yaitu ilmu drainase yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial-budaya yang ada di kawasan kota.
2. Drainase perkotaan merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi :
 - a. Permukiman.
 - b. Kawasan industri dan perdagangan.
 - c. Kampus dan sekolah.
 - d. Rumah sakit dan fasilitas umum.
 - e. Lapangan olahraga.

- f. Lapangan parkir.
- g. Instalasi militer, listrik, telekomunikasi.
- h. Pelabuhan udara.

2.1.5.2 Standar dan Sistem Penyediaan Drainase Kota

Sistem penyediaan jaringan drainase terdiri dari empat macam, yaitu :

1. *Sistem Drainase Utama*, yaitu sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat kota.
2. *Sistem Drainase Lokal*, yaitu sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat kota.
3. *Sistem Drainase Terpisah*, yaitu sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan terpisah untuk air permukaan atau air limpasan.
4. *Sistem Gabungan*, yaitu sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air genangan atau air limpasan yang telah diolah.

Sasaran penyediaan sistem drainase dan pengendalian banjir adalah :

1. Penataan sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier melalui normalisasi maupun rehabilitasi saluran guna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan lokal. Dari masing-masing jaringan dapat didefinisikan sebagai berikut :
 - a. Jaringan Primer : saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai.

- b. Jaringan Sekunder : saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer (dibangun dengan beton/plesteran semen).
 - c. Jaringan Tersier : saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah.
2. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) drainase bagi kawasan hunian dan kota.
 3. Menunjang kebutuhan pembangunan (*development need*) dalam menunjang terciptanya scenario pengembangan kota untuk kawasan andalan dan menunjang sektor unggulan yang berpedoman pada Rancana Umum Tata Ruang Kota.

Sedangkan arahan dalam pelaksanaannya adalah :

1. Harus dapat diatasi dengan biaya ekonomis.
2. Pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak sosial yang berat.
3. Dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana.
4. Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada.
5. Jaringan drainase harus mudah pengoperasian dan pemeliharannya.
6. Mengalirkan air hujan ke badan sungai yang terdekat.

Standardisasi sistem penyediaan drainase untuk penempatan perumahan di pinggiran saluran primer atau sungai yang mengacu pada *Provincial Water Reclement* (PWR) Bab II pasal 2 tentang “Pemakaian Bebas dari Perairan Umum” (*Waterrocilijn*), yang berbunyi “Dilarang menempatkan sebuah bangunan apapun, atau memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam jarak diukur dari kaki

tangkis sepanjang perairan umum atau bilamana tidak ada tangkis, dari pinggir atas dari tamping (*talud*) perairan umum kurang dari :

- a. 20 meter untuk sungai-sungai tersebut dalam daftar 1 dari *verordening* ini.
- b. 5 meter untuk sungai-sungai tersebut dalam daftar 2 dari *verordening* ini, demikian juga untuk saluran pengaliran dan pembuangan dengan kemampuan (*kapasitet*) 4 meter kubik/detik atau lebih.
- c. 3 meter untuk saluran-saluran pengairan, pengambilan dan pembuangan kemampuan normal 1 s/d 4 meter kubik/detik.
- d. 2 meter untuk saluran-saluran pengairan pengambilan dan pembuangan kemampuan normal kurang dari 1 meter kubik/detik.”

2.1.5.3 Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu :

1. Sistem Drainase Mayor

Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang

antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

2. Sistem Drainase Mikro

Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

2.1.5.4 Jenis-jenis Drainase

1. Menurut sejarah terbentuknya
 - a. Drainase alamiah (*natural drainage*), yaitu sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia.
 - b. Drainase buatan , yaitu sistem drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan, dan dimensi saluran.
2. Menurut letak saluran

- a. Drainase permukaan tanah (*Surface Drainage*), yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open channel flow.
 - b. Drainase bawah tanah (*Sub Surface Drainage*), yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa), dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut antara lain tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, taman, dan lain-lain.
3. Menurut konstruksi
- a. Saluran terbuka, yaitu sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (sistem terpisah), namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Pada pinggiran kota, saluran terbuka ini biasanya tidak diberi lining (lapisan pelindung). Akan tetapi saluran terbuka di dalam kota harus diberi lining dengan beton, pasangan batu (*masonry*) ataupun dengan pasangan bata.
 - b. Saluran tertutup, yaitu saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan. Siste ini cukup bagus digunakan di daerah perkotaan terutama dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti kota Metropolitan dan kota-kota besar lainnya.

4. Menurut fungsi

- a. Single Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja.
- b. Multy Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis buangan, baik secara bercampur maupun bergantian.

2.1.5.5. Arahan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Sistem Drainase

Arahan dalam pelaksanaan penyediaan sistem drainase adalah :

- a. Harus dapat diatasi dengan biaya ekonomis.
- b. Pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak sosial yang berat.
- c. Dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana.
- d. Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada.
- e. Jaringan drainase harus mudah pengoperasian dan pemeliharannya.
- f. Mengalirkan air hujan ke badan sungai yang terdekat.

Pengklasifikasian saluran drainase. Macam-macam saluran untuk pembuangan air, menurut De Chaira dan Koppelman (1994:74) dapat dibedakan menjadi :

A. Saluran Air Tertutup

- a. Drainase Bawah Tanah Tertutup, yaitu saluran yang menerima air limpasan dari daerah yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras dan membawanya ke sebuah pipa keluar di sisi tapak (saluran permukaan atau sungai), ke sistem drainase kota.

- b. Drainase Bawah Tanah Tertutup dengan tempat penampungan pada tapak, dimana drainase ini mampu menampung air limpasan dengan volume dan kecepatan yang meningkat tanpa menyebabkan erosi dan kerusakan pada tapak.

B. Saluran Air Terbuka

Merupakan saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Pada saluran air terbuka ini jika ada sampah yang menyumbat dapat dengan mudah untuk dibersihkan, namun bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan. Menurut asalnya, saluran dibedakan menjadi :

1. Saluran Alam (*natural*), meliputi selokan kecil, kali, sungai kecil dan sungai besar sampai saluran terbuka alamiah.
2. Saluran Buatan (*artificial*), seperti saluran pelayaran, irigasi, parit pembuangan, dan lain-lain. Saluran terbuka buatan mempunyai istilah yang berbeda-beda antara lain :
 - a. Saluran (*canal*) : biasanya panjang dan merupakan selokan landai yang dibuat di tanah, dapat dilapisi pasangan batu/tidak atau beton, semen, kayu maupu aspal.
 - b. Talang (*flume*) : merupakan selokan dari kayu, logam, beton/pasangan batu, biasanya disangga/terletak di atas permukaan tanah, untuk mengalirkan air berdasarkan perbedaan tinggi tekan.
 - c. Got miring (*chute*) : selokan yang curam.
 - d. Terjunan (*drop*) : seperti got miring dimana perubahan tinggi air terjadi dalam jangka pendek.

- e. Gorong-gorong (*culvert*) : saluran tertutup (pendek) yang mengalirkan air melewati jalan raya, jalan kereta api, atau timbunan lainnya.
- f. Terowongan Air Terbuka (*open-flow tunnel*) : selokan tertutup yang cukup panjang, dipakai untuk mengalirkan air menembus bukit/gundukan tanah.

C. Saluran Air Kombinasi, dimana limpasan air terbuka dikumpulkan pada saluran drainase permukaan, sementara limpasan dari daerah yang diperkeras dikumpulkan pada saluran drainase tertutup.

2.1.5.6.Pola Jaringan Drainase

Pola jaringan drainase menurut Sidharta Karmawan (1997:1-8) terdiri dari enam macam, antara lain:

1. *Siku*, digunakan pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuangan akhir berada di tengah kota.
2. *Paralel*, saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri.
3. *Grid iron*, digunakan untuk daerah dengan sungai yang terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dahulu pada saluran pengumpul.
4. *Alamiah*, sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar.

5. *Radial*, digunakan untuk daerah berbukit, sehingga pola saluran memencar ke segala arah.
6. *Jaring-jaring*, mempunyai saluran-saluran pembuangan yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar.

2.1.5.7 Prosedur Perancangan Tata Letak Sistem Jaringan Drainase

Untuk menjamin berfungsinya suatu sistem jaringan drainase perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola arah aliran

Dengan melihat peta topografi kita dapat menentukan arah aliran yang merupakan natura drainage system yang terbentuk secara alamiah, dan dapat mengetahui toleransi lamanya genangan dari daerah tertentu.

2. Situasi dan kondisi fisik kota

Informasi situasi dan kondisi fisik kota baik yang ada maupun yang sedang direncanakan perlu diketahui, antara lain:

- a. Sistem jaringan yang ada (drainase, irigasi, air minum, dll.)
- b. *Bottle neck* yang mungkin ada
- c. Batas-batas daerah pemilikan
- d. Letak dan jumlah prasarana yang ada
- e. Tingkat kebutuhan drainase yang diperlukan
- f. Gambaran prioritas daerah secara garis besar

Semua hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan tata letak sistem jaringan drainase tidak terjadi pertentangan kepentingan. Dan pada akhirnya

dalam menentukan tata letak dan jaringan drainase bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan drainase dapat berfungsi sesuai tujuan (sasaran)
- b. Menekan dampak lingkungan (negatif) sekecil mungkin
- c. Dapat bertahan lama (awet) ditinjau dari segi konstruksi dan fungsinya
- d. Biaya pembangunan serendah mungkin

2.1.5.9 Bangunan Penunjang

Untuk menjamin berfungsinya saluran drainase secara baik maka diperlukan bangunan-bangunan pelengkap ditempat-tempat tertentu. Jenis bangunan pelengkap yang dimaksud meliputi:

1. Bangunan silang, seperti gorong-gorong
2. Bangunan pemecah energi, seperti bangunan terjun dan saluran curam
3. Bangunan pengaman erosi, seperti ground sill/leveling structure
4. Bangunan inlet, seperti grill samping/datar
5. Bangunan outlet, seperti kolam loncat air
6. Bangunan pintu air, seperti pintu geser, pintu otomatis
7. Bangunan rumah pompa
8. Bangunan kolam tandum/pengumpul
9. Bangunan lobang control
10. Bangunan instalasi pengolahan limbah
11. Peralatan penunjang, berupa AWLR, ORR, Stasiun meteorologi, detektor kualitas air

12. Dan lain sebagainya.

Semua bangunan tersebut tidak harus ada pada setiap jaringan drainase. Keberadaannya tergantung pada kebutuha setempat yang biasanya dipengaruhi oleh fungsi saluran, kondisi lingkungan dan tuntutan akan kesempurnaan jaringannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya diteliti oleh Ayu Wahyuningtyas, Septiana Hariyani, dan Fauzul Rizal Sutikno mengenai Strategi Penerapan Sumur Resapan sebagai Teknologi Ekodrainase di Kota Malang (Studi Kasus: Sub DAS Metro). Mahasiswa dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Malang. Dengan kesimpulan penelitian yakni :

- a. Ditemukan bahwa terdapat beberapa wilayah di Sub DAS Metro yang ketika datang musim hujan mengalami genangan dan banjir yang penyebab utamanya adalah kapasitas saluran tidak memenuhi. Sementara itu, beberapa potensi yang mendukung ekodrainase adalah jumlah luas lahan hijau di Sub DAS Metro adalah sebesar 37,39% dan juga dimulainya upaya untuk memperbanyak lahan.
- b. Diketahui bahwa sebanyak 55,69% saluran drainase tidak memenuhi kapasitasnya. Selanjutnya, dilakukan pemodelan ekodrainase dengan menggunakan teknologi sumur resapan dengan desain dimensi diameter 0,8 m dan kedalaman sebesar 3 m. setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa seluruh saluran termasuk saluran

drainase bermasalah tentang memenuhi kapasitas saluran. Hal ini dikarenakan 903 sumur resapan yang di modelkan dapat meresapkan air limpasan sebesar 0,62979 m³/detik, sehingga total debit yang diresapkan adalah sebesar 53,926 m³/detik.

- c. Berdasarkan analisis pemodelan drainase dapat disimpulkan bahwa sumur resapan efektif untuk digunakan karena sebagai pengendali banjir dan genangan, sumur resapan pengendali banjir dan genangan, sumur, resapan mampu meresapkan air hujan yang melimpas dan berguna pula untuk konservasi air tanah serta menekan laju erosi.

Sebagai saran akhir penutup penelitian ini, rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yakni: (i) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan ekodrainase dengan pendekatan kualitas air, (ii) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemodelan drainase ramah lingkungan untuk teknologi ekodrainase lainnya selain sumur resapan, (iii) perlu adanya penelitian yang lebih komprehensif dan integrated dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi penyebab terjadinya banjir sehingga terdapat integrasi dalam perencanaan tata ruang, (iv) perlunya peningkatan kajian, komunikasi, dan penyebarluasan untuk memasyarakatkan drainase ramah lingkungan dengan pemodelan sumur resapan agar lebih cepat diterapkan dan efisien dalam peaksanaannya, (v) perlunya peran pemerintah untuk percepatan pencapaian hasil dalam bentuk kesempatan pengujian, peraturan yang mengikat, maupun penerapannya.

Penelitian Terdahulu yang kedua diteliti oleh Ari Prasetyo dengan judul Penelitian “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2005-2009”. Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah 2005-2009, dan Kabupaten Cirebon mempunyai perda No 4 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Kebijakan Pemanfaatan Ruang, dan Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, semuanya belum berjalan secara maksimal, dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2005-2009, meliputi Proses penyusunan, Substansi rencana Tata Ruang dan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki aspek Kelembagaan, Aspek RTRW sebagai dasar pengambil Keputusan Kebijakan, Aspek hukum tata ruang, Aspek Partisipasi Masyarakat, aspek program pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah.

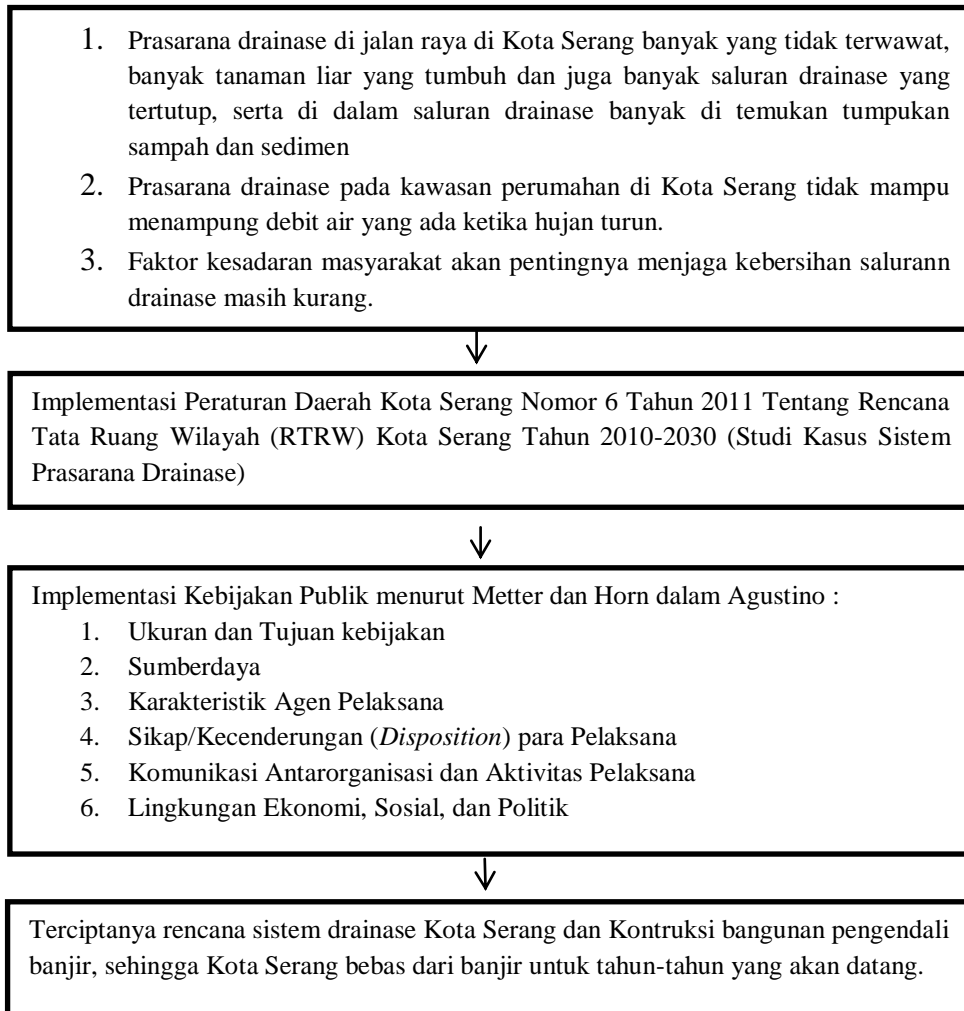
Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat lebih maksimal untuk menjalankan perda No 4 tahun 2005, dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk menaati sebuah peraturan, dan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan maupun pelaksanaan lebih ditingkatkan agar mampu dalam melaksanakan kebijakan dengan cara mengikutsertakan para pegawai dinas dalam workshop atau seminar pengelolaan kebijakan. dan pembagian dan kewenangan fungsi kelembagaan lebih diperjelas agar tidak tumpang tindih.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyuningtias dkk dengan peneliti adalah Penelitian Ayu lebih difokuskan pada kerangka bangunan Prasarana drainase, sedangkan peneliti memfokuskan kepada permasalahan bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan mengenai penyediaan dan pemeliharaan prasarana drainase. Untuk penelitian terdahulu yang kedua yang diteliti oleh Ari Prasetyo dengan peneliti memiliki kesamaan melakukan penelitian mengenai Implementasi Perda yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ari Prasetyo mencakup keseluruhan kebijakan perda yang ada di dalamnya sedangkan peneliti lebih mengkrucutkan lagi dan lebih fokus pada pasal 17 Sistem prasarana Drainase dan Pedestrian yang ada didalam Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030.

2.3 Kerangka Berfikir

Uma Sekar dalam bukunya *business research* (1992) dalam Sugiyono (2009: 65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) kali ini, peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian
Identifikasi Masalah



2.4 Asumsi Dasar

Pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) karena dilihat pada kondisi kekinian bahwa kondisi Drainase Kota Serang belum disediakan secara optimal oleh Pemerintah Kota Serang.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dengan data dan fakta yang didapat di lapangan, pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 belum terlaksana dengan baik. Pada kenyataannya bahwa kondisi Drainase di Kota Serang rusak, terlalu kecil, di tumbuh rumput-rumput, dan dipenuhi sampah. Akibatnya, Drainase tidak berfungsi secara optimal dan menciptakan titik titik rawan banjir. Ini karena usaha Pemerintah Kota Serang dalam pengembangan dan rehabilitasi belum berjalan sebagaimana seharusnya. Melihat dari semua permasalahan yang ada di Lapangan dan untuk menjawab permasalahan seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya, maka peneliti memutuskan menggunakan Teori dari Metter dan Horn.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula (Silalahi 2010: 12-13)

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dan tepat dalam penelitiannya. Kesesuaian dan ketepatan data sangat dipengaruhi oleh metode penelitian apa yang tepat dalam penelitiannya. Tujuan dari metode penelitian adalah dapat membantu peneliti dalam penelitiannya. Tujuan dari metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian sangat berkaitan erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada dipilihnya metode penelitian yang tepat guna mencapai tujuan penelitian yang tepat. Menurut Moleong (2007:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan Menurut Sugiyono (2008:1) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alwasilah (2006: 18) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan suatu istilah umum yang memayungi berbagai metode yang sangat beragam dengan menggunakan label yang beragam pula, antara lain kualitatif (untuk menggambarkan sifat data), *naturalistik* (untuk setting penelitian), *grounded research* (sifat induktif penelitian), *fenomenologis* (pemaknaan realitas), *etnografi* (cara kerja di lapangan), *hermeneutik* (interpretasi), *verstehen* (cara menarik inferensi), *iluminatif* (cara menarik inferensi), *participan observation* (cara kerja peneliti). Peneliti sebaiknya jangan

terjebak oleh label yang berbeda-beda ini, karena banyak kesamaan diantara semuanya, meskipun ada juga perbedaan dalam penekanannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dan tepat dalam penelitiannya, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Peneliti lebih memfokuskan kembali penelitian khusus pada sistem prasarana drainase. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus pada satu bagian. Sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, serta memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. Peneliti meneliti bagaimana pemerintah Kota Serang melaksanakan isi kebijakan Perda tentang sistem prasarana drainase meliputi pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil peneliti adalah Kota Serang, dari kacamata peneliti, sistem prasarana drainase Kota Serang pada sekarang ini seharusnya

sudah dapat dikatakan baik, namun kenyataan di lapangan belum dapat dikatakan demikian. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang yang diiringi perkembangan kawasan yang sangat cepat pada hampir semua kawasan Kota Serang mengakibatkan luas resapan air hujan di Kota Serang berkurang dengan cepat pula yang pada akhirnya akan menimbulkan titik genangan air/banjir baru.

Sebagai ibukota Provinsi Banten, Kota Serang menjadi pusat berbagai kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, dan salah satu jalur yang dilewati oleh kendaraan yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera. Jika penyediaan prasarana drainase yang tidak sesuai dengan standar yang ada, akan menimbulkan genangan air apabila hujan datang dengan kapasitas yang tinggi ataupun tingkat yang rendah, hal ini akan melumpuhkan kegiatan di beberapa aspek. Dan akan mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi, sosial budaya. Berdasarkan dari pengalaman yang telah dialami oleh peneliti, untuk itu peneliti ingin mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian).

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Untuk mendukung penelitian bagaimana Implementasi Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) pada penelitian kali ini menggunakan Konsep dari Metter dan Horn dikutip dalam buku Agustino (2012:142-144) di mana dalam pelaksanaan Implementasi

Kebijakan publik dengan konsep ini, ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi dari pelaksanaan kebijakan publik:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk melaksanakan di level warga , maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi (publik) akan sangat cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) Yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan Meter dan Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3.4.2 Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka berfikir menurut Meter dan Horn dalam buku Agustino(2012:142-144), indikator-indikator yang mempengaruhinya :

1. Indikator yang mempengaruhi Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Standar dan Sasaran tertentu

Mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*Implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Metter dan Horn dalam Agustino, (2006:164).

2. Indikator yang mempengaruhi Sumber Daya

a. Sumber Daya Finansial

Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang

akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju.

b. Sumber Daya Waktu

Demikian pula dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan.

3. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

a. Organisasi

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun organisasi informal, karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

b. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan

Manakala hendak menentukan agen pelaksana, semakin luas wilayah implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Indikator yang mempengaruhi Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana

a. Pengetahuan (*cognition*)

Pengetahuan dalam pemahaman tentang maksud dan standar dan tujuan kebijakan. Hal ini penting, karena, bagaimanapun implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan

b. Respon

Respon yang dimaksud disini adalah bagaimana para pelaksana kebijakan merespon, menerima (*acceptance*), netral (*neutrality*), atau menolak (*rejection*).

c. Intensitas

Apabila penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standard an tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performens*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5. Indikator Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana

a. Koordiansi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

b. Konsisten

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

6. Indikator Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

a. Kekondusifan

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Dengan adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif, instrumen penelitian dalam Sugiyono (2012:222) mengatakan bahwa yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi divalidasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi ialah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistic (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisah ke dalam variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key*

instrument”. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

Satori dan Komariah (2010:61) memaparkan bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key instrument*.

3.6 Informan Penelitian

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan selanjutnya. Irawan (2005:5.5) menyebutkan bahwa data digolongkan menjadi beberapa golongan atau jenis. Dilihat dari sumbernya, kita mengenal data primer dan data sekunder. Data primer didapat berdasarkan usaha peneliti dalam pencarian data langsung dari sumbernya tanpa ada tambahan ataupun pengurangan hasil data yang didapat, sedangkan data sekunder didapat dari studi pustaka hingga dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian akan diolah dan digunakan untuk bahan analisis dengan sebenar-benarnya (tanpa mengada-ada) pada suatu penelitian yang biasanya dilakukan atas dasar kebutuhan dari si peneliti itu sendiri.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Instansi	Informan	Kode Informan	Peran dan Fungsi
1	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	a. Kasi bagian Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	I ₁	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana kebijakan penyediaan sistem prasarana drainase Kota Serang & yang mengawasi pelaksanaan dari perda yang peneliti teliti
2	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	a. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	I ₂	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana kebijakan sistem prasarana drainase Kota Serang
3	Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang	Kasie. Pembangunan dan Pengendalian Bidang Perumahan & Pemukiman	I ₃	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemeliharaan lingkungan di sekitar drainase
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang	a. Kepala Sub. bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang b. Kasi Keselamatan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang c. Kasi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang	I ₄ I ₅ I ₆	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengetahui tentang kompetensi para pegawai di Dishubkominfo Kota Serang • Berhubungan mengenai standar sistem prasarana drainase Kota Serang • Yang membidangi sistem prasarana drainase Kota Serang
5	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kasi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi	I ₇	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan

	(Satpol PP) Kota Serang	Pamong Praja (Satpol PP)		terhadap Peraturan Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang	<p>a. Kepala Sub.Bidang Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</p> <p>b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Serang</p>	<p>I₈</p> <p>I₉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengetahui kompetensi SDA yang bekerja di BAPPEDA • Mengidentifikasi, mengumpulkan, menyusun dan melaksanakan perencanaan penetapan kebijakan tata ruang dan sumber daya alam Kota Serang
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekonvasi Bhumi	a. Direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi	I ₁₀	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi yang memposisikan diri sebagai penyeimbang yang kritis dalam memandang persoalan persoalan lingkungan hidup
8.	Masyarakat	<p>a. Masyarakat Kota Serang yang bermukim di kawasan titik rawan banjir</p> <p>b. Masyarakat PKL kawasan titik rawan banjir</p> <p>c. Masyarakat Pengguna Jalan</p>	<p>I₁₁</p> <p>I₁₂</p> <p>I₁₃</p>	Sebagai sasaran kebijakan publik

9.	Pihak Swasta	a. Pihak PT.Marga Mandala Sakti	I ₁₄	Perusahaan yang bertanggung jawab atas bangunan
----	--------------	---------------------------------	-----------------	---

Tabel 3.1

Sumber: Peneliti Tahun 2014

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik penelitian, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 180). Sedangkan menurut Bungin (2001: 88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan). Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (In-dept Interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pada wawancara semi terstruktur pertanyaan biasanya disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara perlu dilakukan lebih dari

dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi kriteria rigor (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklarifikasi informasi yang ditemukan pada wawancara pertama. Melalui pertemuan ini hubungan saling percaya dengan informan semakin meningkat sehingga memungkinkan peneliti menyingkap pengalaman atau perasaan informan yang lebih pribadi.

Jadi, secara umum wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama meliputi pengenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap yang terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap akhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Adapun kisi-kisi wawancara semi terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Adapun kisi-kisi wawancara semi terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dari tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan, terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :

A. Standar dan Sasaran Tertentu

1. Pemahaman pemeritah Dinas PU bidang SDA Kota Serang memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
2. Pemahaman pemerintah PU bidang Cipta Karya Kota Serang memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
3. Pemahaman Pemerintah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
4. Pemahaman pemerintah Dishubkominfo memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
5. Pemahaman Pemerintah Bappeda memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
6. Pemahaman pihak PT. Marga Mandalasakti dalam memenuhi standar dalam mencapai tujuan dari isi kebijakan
7. Ketepatan target atau Sasaran isi kebijakan
 - a. Masyarakat seebagai target atau sasaran isi kebijakan
 - b. Target atau sasaran kebijakan sesuai dengan kebutuhan dari sisi

LSM

2. Sumber Daya, terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :

A. Sumber Daya Waktu

- a. Kecukupan waktu yang di butuhkan oleh pemerintah Dinas PU bidang SDA Kota Serang

- b. Kecukupan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Kecukupan waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
- d. Kecukupan waktu yang di butuhkan pemerintah Dishubkominfo Kota Serang
- e. Kecukupan waktu yang di butuhkan pihak PT. Marga Mandalasakti
- f. Kecukupan waktu yang dibutuhkan dalam kebijakan dari sisi LSM

B. Sumber Daya Finansial

- a. Anggaran dalam melaksanakan isi kebijakan yang dibutuhkan Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- b. Anggaran dalam melaksanakan isi kebijakan yang dibutuhkan Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Anggaran dalam melaksanakan isi kebijakan yang dibutuhkan Dinas Tata Kota Serang
- d. Anggaran dalam melaksanakan isi kebijakan yang dibutuhkan Dishubkominfo

C. Sumber Daya Manusia

- a. Penempatan SDM Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- b. Penempatan SDM Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Penempatan SDM Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
- d. Penempatan SDM Dishubkominfo Kota Serang

e. Penempatan SDM BAPPEDA Kota Serang

3. Karakteristik Agen Pelaksana

A. Organisasi

a. Organisasi formal atau organisasi informal pemerintah Dinas PU bidang SDA Kota Serang

b. Organisasi Formal atau organisasi informal Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang

c. Organisasi Formal atau informal Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang

d. Organisasi Formal atau organisasi informal pemerintah Dishubkominfo Kota Serang

B. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan

a. Jumlah keterlibatan agen pelaksana Dinas PU bidang SDA Kota Serang

b. Jumlah keterlibatan agen pelaksana Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang

c. Jumlah keterlibatan agen pelaksana Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang

d. Jumlah keterlibatan agen pelaksana Dishubkominfo Kota Serang

4. Sikap/kecenderungan Para Pelaksana

A. Pengetahuan

a. Pemahaman BAPPEDA Kota Serang tentang pemahaman isi kebijakan

B. Respon

- a. Respon Dinas PU bidang SDA Kota terhadap kebijakan
- b. Respon Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang terhadap kebijakan
- c. Respon Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang terhadap kebijakan
- d. Respon BAPPEDA Kota Serang terhadap kebijakan
- e. Respon pihak swasta Marga Mandala Sakti terhadap kebijakan

C. Intensitas

- a. Intensitas disposisi BAPPEDA Kota Serang
- b. Intensitas disposisi DPRD Kota Serang
- c. Intensitas disposisi Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- d. Intensitas disposisi Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- e. Intensitas disposisi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang

5. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana

A. Koordinasi

- a. Koordinasi Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- b. Koordinasi Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Koordinasi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
- d. Koordinasi Dishubkominfo Kota Serang
- e. Koordinasi BAPPEDA Kota Serang
- f. Koordinasi Dinas PU Kota terhadap pihak Swasta Marga Mandala Sakti

B. Konsisten

- a. Konsisten Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- b. Konsisten Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Konsisten Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
- d. Konsisten Dishubkominfo Kota Serang
- e. Konsisten BAPPEDA Kota Serang

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

A. Kekondusifan

- a. Kondusif lingkungan Dinas PU bidang SDA Kota Serang
- b. Kondusif lingkungan Dinas PU bidang Cipta Karya Kota Serang
- c. Kondusif lingkungan Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
- d. Kondusif lingkungan Dishubkominfo Kota Serang
- e. Kondusif lingkungan BAPPEDA Kota Serang
- f. Kondusif lingkungan pihak PT. Marga Mandalasakti

Pedoman Wawancara

Kode Dimensi Pertanyaan	Kode Pertanyaan	Kode Informan	Pertanyaan yang diajukan
A	<i>Q₁</i>	<i>I₁</i>	Apa langkah yang sudah di lakukan dalam rehabilitasi dan penyediaan sistem prasarana Drainase?
		<i>I₂</i>	Apa saja yang dilakukan untuk dapat mendukung terlaksananya penyediaan sistem prasarana drainase yang telah di atur dalam perda?
		<i>I₃</i>	Apa saja langkah yang sudah

			dilaksanakan dalam menunjang kegiatan penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?
A	Q ₁	I ₄	Hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) dalam menyukseskan program terkait penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase Kota Serang?
		I ₅	Apakah Sistem prasarana yang ada saat ini sudah sesuai dengan standar keselamatan?
A	Q ₁	I ₆	Sistem prasarana drainase berhubungan dengan lalu lintas angkutan umum, bagaimana menurut Kasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan, komunikasi, dan informatika (Dishubkominfo) menanggapi tentang sistem prasarana drainase di Kota Serang?
A	Q ₁	I ₉	Jika dilihat dari pembangunan drainase dari tahun ke tahun. Apakah sistem penyediaan dan pemeliharaan drainase di Kota Serang saat ini lebih baik atau tidak berubah? Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini?
A	Q ₁	I ₁₉	Apakah pihak dari Marga Mandala Sakti sudah mengetahui tentang adanya Perda Kota Serang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2030, terutama pada pasal 17 terkait tentang Penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?bagaimana tanggapannya?
A	Q ₂	I ₁₄	Sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengamati tentang permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, apakah LSM mengetahui tentang Perda yang peneliti teliti? Dan bagaimana LSM menanggapi?

A	<i>Q₃</i>	<i>I₁₆</i>	Sebagai sasaran dari kebijakan dari implementasi Perda yang peneliti sedang teliti, bagaimana tanggapan anda sebagai masyarakat mengenai adanya peraturan daerah tersebut? Apakah penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?
A	<i>Q₄</i>	<i>I₁₈</i>	Apakah Masyarakat Pengguna Jalan yang sering melintasi kawasan titik rawan banjir mengetahui tentang adanya kebijakan publik dari Pemda yakni Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)? Bagaimana tanggapan anda mengenai hal ini?
A	<i>Q₅</i>	<i>I₁₄</i>	Sebagai pengamat, menurut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) apakah Masyarakat saat ini sudah merasakan dampak positif dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) ?
B	<i>Q₆</i>	<i>I₁₆</i>	Sebagai Masyarakat Kota Serang apakah sudah merasakan dampak yang positif dari Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>Q₇</i>	<i>I₁₈</i>	Sebagai pengguna jalan apakah merasakan dampak yang positif dari adanya Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?

A	Q_1	I_1	Berapa waktu yang digunakan untuk melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan drainase?
A	Q_1	I_2	Cipta Karya Kota Serang sebagai pelaksana dari isi kebijakan ini, bagaimana dengan waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini?
	Q_1	I_3	Untuk membantu terwujudnya dari isi kebijakan penyediaan sistem prasarana drainase berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Kota (DTK)?
	Q_3	I_5	Dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, jika menimbang dari segi keselamatan apakah waktu tersebut memang pas untuk kekokohan bangunannya?
A	Q_4	I_{10}	Berapa waktu yang di butuhkan dalam kegiatan sebuah pembangunan? Dalam pembangunan sistem prasarana drainase Kota Serang berapa lama untuk dapat terciptanya sistem prasarana drainase yang baik?
	Q_5	I_{14}	Dari sisi LSM, melihat jangka waktu yang telah di tetapkan pemerintah daerah dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) tanggapannya bagaimana?
B	Q_1	I_1	Biaya yang dibutuhkan Dinas PU Kota Serang dalam menjalankan isi kebijakan? Kendala yang dihadapi?
	Q_1	I_2	Biaya yang dibutuhkan Dirjen Cipta Karya Kota Serang dalam menjalankan isi kebijakan?
B	Q_2	I_4	Apakah ada biaya yang sengaja dianggarkan dalam sosialisasi dari

			isi kebijakan kepada masyarakat? Jika tidak ada, anggaran yang keluar dalam sosialisasinya bagaimana? Kendala yang dihadapi?
		<i>I₉</i>	Adakah biaya yang dipersiapkan dalam kegiatan musrembang?
C	<i>Q₁</i>	<i>I₁</i>	Apakah Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang menggunakan pihak swasta dalam pelaksanaan dari isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)? Alasannya?
	<i>Q₃</i>	<i>I₁₀</i>	Bagaimana kualitas Pegawai yang bekerja di BAPPEDA Kota Serang?

A	<i>Q₁</i>	<i>I₁</i>	Kendala yang dihadapi pemerintah Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₂</i>	Kendala yang dihadapi pemerintah Cipta Karya dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₃</i>	Kendala yang dihadapi Pemerintah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem

			Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>Q₂</i>	<i>I₄</i>	Kendala apa yang di hadapi Dishubkominfo dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
A	<i>Q₁</i>	<i>I₁</i>	Bagaimana cara Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>Q₂</i>	<i>I₂</i>	Bagaimana cara Cipta Karya Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan isi kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>Q₃</i>	<i>I₃</i>	Bagaimana cara Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>Q₄</i>	<i>I₄</i>	Bagaimana cara Dishubkominfo dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam sosialisasi dalam pelaksanaan isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang

			Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
--	--	--	--

B	Q_1	I_1	Berapa banyak agen pelaksana di Dinas PU (Pekerjaan Umum) yang dilibatkan dalam menjalankan isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)? Alasannya?
	Q_2	I_2	Berapa banyak agen pelaksana Cipta Karya yang dilibatkan dalam pelaksanaan dari setiap kegiatan dari isi kebijakan khususnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	Q_3	I_3	Berapa banyak agen pelaksana yang dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dari program terkait sistem prasarana drainase

A	Q_1	I_1	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		I_2	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?

			dan Pedestrian)?
		<i>I₃</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₄</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₅</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
A	<i>Q₁</i>	<i>I₆</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₇</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₈</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang

			Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₉</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
		<i>I₁₀</i>	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
B	<i>Q₁</i>	<i>I₁</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		<i>I₂</i>	Bagaimana komunikasi yang terjalin terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
	<i>Q₁</i>	<i>I₃</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		<i>I₄</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		<i>I₅</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		<i>I₆</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		<i>I₇</i>	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan

			pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		I_8	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		I_9	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
		I_{10}	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?

A	Q_1	I_1	Pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di lapangan?
		I_2	Pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di lapangan?
A	Q_1	I_7	Pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di lapangan?

		<i>I₈</i>	Pada saat pelaksanaan penyusunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi dari lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu?
		<i>I₉</i>	Situasi yang seperti apa yang menjadi tantangan dalam penyelesaian dari pembangunan, dalam hal ini terkait dalam pemeliharaan dan penyediaan sistem prasarana drainase?
		<i>I₁₁</i>	Pada saat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait bagaimana sistem prasarana drainase, adakah situasi yang menjadi tantangan dalam penyelesaiannya?
		<i>I₁₂</i>	Pada saat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait bagaimana sistem prasarana drainase, adakah situasi yang menjadi tantangan dalam penyelesaiannya?
		<i>I₁₄</i>	Menurut LSM Rekonvansi Bhumi situasi apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan dari isi kebijakan terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase yang ada di Kota Serang. Jika di lihat dari Segi Lingkungan Eksternal, Lingkungan Sosial, politik, dan Ekonomi?
		<i>I₁₆</i>	Menurut anda sebagai masyarakat, situasi seperti apa yang menjadikan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa berjalan maksimal? jika di lihat dari beberapa faktor, baik lingkungan sosialnya, lingkungan eksternal dari pemerintah itu sendiri atau pun dari segi politik dan ekonominya?

		<i>I₁₇</i>	Sebagai pedagang, menurut anda kondisi yang menghambat berjalannya suatu kebijakan dari pemerintah itu dari segi apa saja, terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan sistem drainase di Kota Serang?
		<i>I₁₈</i>	Menurut anda sebagai masyarakat pengguna jalan, situasi seperti apa yang menjadikan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa berjalan maksimal? jika di lihat dari beberapa faktor, baik lingkungan sosialnya, lingkungan eksternal dari pemerintah itu sendiri atau pun dari segi politik dan ekonominya?

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut (Subagyo: 2006: 63). Teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang diamati. Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung, dan sudut pandang

responden yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau *survey* (Alwasilah 2006: 155)

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun langsung ke objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan penggunaan responden kecil. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi Observasi Partisipatif atau observasi berperan serta dan observasi non partisipatif. Dalam observasi partisipatif atau observasi berperan serta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang diamati.

Menurut Moleong (2007:164) pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat dipahaminya. Jadi jelas tidak pada seluruh peristiwa peneliti perlu berperan serta. Sedangkan dalam observasi non partisipan, peneliti hanya sebagai pengamat independen.

3. Dokumentasi

Untuk membantu penelitian dibutuhkan alat-alat pendukung dokumentasi dalam penulisan penelitian, seperti buku catatan untuk mencatat hasil wawancara, tipe recorder untuk merekam semua percakapan, dan kamera untuk memotret lokasi lokasi penelitian dan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Kepustakaan

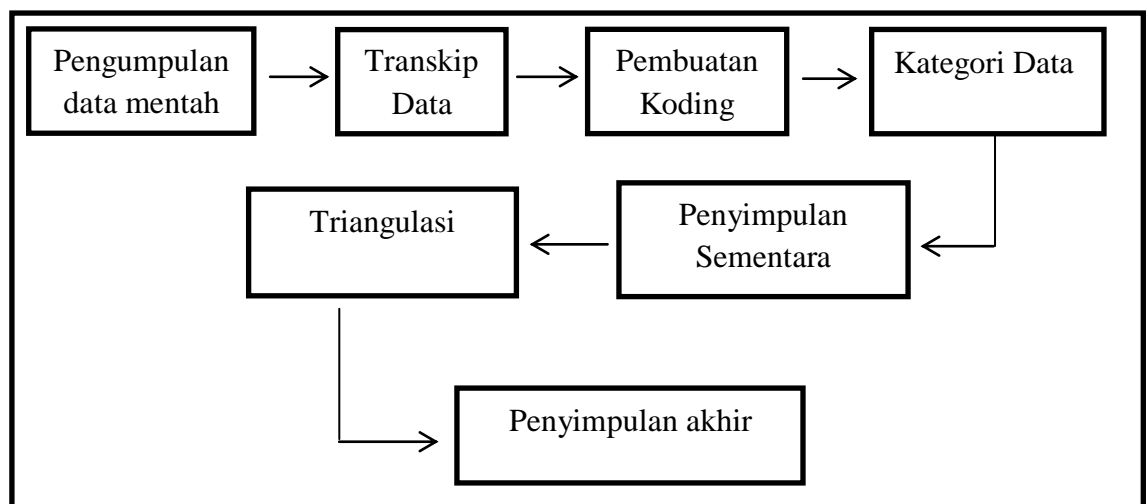
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Irawan dalam bukunya Metodologi Penelitian Administrasi (2005:527) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*), dapat diartikan bahwa kesimpulan penelitiannya adalah dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat didalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai tingkat “titik jenuh” atau reliable (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang ia cari). Maka tidak heran bila dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan, maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Adapun langkah dalam melakukan teknik analisis data yang digunakan menurut Irawan (2005:527) adalah sebagai berikut:



(Sumber: Prasetya Irawan : 2005)

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan

(purposive) dan informan sekunder, melakukan observasi di lokasi penelitian serta studi dokumentasi guna memperkuat data yang yang didapat. Yang peneliti catat hanya data apa adanya (verbatim). Jangan dicampurkan dengan pemikiran peneliti, komentar peneliti maupun sikap peneliti.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke dalam bentuk tertulis dengan kata-kata yang apa adanya.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip. Perlu ketelitian dalam membaca transkrip, pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini, dapat diambil kata kuncinya dan diberikan kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat kata-kata kunci dalam suatu kategorisasi.

5. Penyimpulan Sederhana

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan harus berdasarkan data sehingga kesimpulan ini tidak dapat dicampur adukan dengan pemikiran dan penafsiran peneliti. Adapun jika peneliti ingin memberikan penafsiran dari pemikiran peneliti sendiri (*Observer's Comments*), maka peneliti dapat menuliskannya pada bagian akhir kesimpulan sementara.

6. Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan Akhir

Pada tahap ini, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah peneliti membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

3.8 Validitas Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2004:330). Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi-metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi.

Menurut Denzin triangulasi meliputi empat hal, yaitu :

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tersebut.

2. Triangulasi antar-Peneliti

Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.

3. Triangulasi Sumber data

Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan tulisan pribadi dan gambar atau foto.

4. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teor yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

3.9 Jadwal Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Lokasi Penelitian bertempat di Kota Serang.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibukota Provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten, Indonesia. Serang merupakan ibukota Provinsi Banten dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Serang. Kota Serang berada tepat di sebelah Utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara.

Kota Serang Terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007. Kelahirannya hampir tepat saat provinsi Banten berusia tujuh tahun. Kota Serang secara resmi dilahirkan pada tanggal 2 November 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya Rancangan Undang - Undang Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Dengan luas wilayah 266,74 km² yang secara administratif terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kasemen, Taktakan, Walantaka, Cipocok Jaya dan Curug dengan batas wilayah sebelah Utara yaitu Teluk

Banten sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Sebelah selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang, serta sebelah barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa.



Gambar 4.1

Kota Serang mencakup wilayah daratan yang seluruh bagian wilayahnya berada di daratan, hanya sebagian kecil saja yang berbatasan dengan laut yaitu di kecamatan Kasemen. Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl. Keadaan iklim di Kota Serang tropis dengan kelembapan udara antara 26 – 28 °C dengan kelembapan udara antara 79 – 87 %. Data BMG tahun 2014 mengungkapkan bahwa curah hujan rata-rata perbulan berada

pada rentang 5 – 17 mm, rata-rata 18 hari hujan dengan kecepatan angin 2,0 – 4,0 knot.

Berpijak pada kondisi saat ini, dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2014 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Serang, maka “Visi pembangunan Kota Serang tahun 2010 – 2015” adalah sebagai berikut : “Terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan“.

Visi pembangunan Kota Serang tahun 2010 – 2015 tersebut diharapkan menjadi landasan pencapaian “Visi pembangunan Kota Serang tahun 2008 – 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008 – 2025 : “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025“.

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Serang tahun 2011 – 2015 adalah terwujudnya perangkat dasar berupa suprastruktur (peraturan perundang – undangan atau regulasi daerah, infrastruktur (prasarana) dan struktur (sarana) pemerintahan dan pembangunan daerah dalam berbagai Aspek kehidupan menuju Kota Serang yang dinamis dan maju serta berwawasan lingkungan. Secara lebih rinci makna dari Visi Kota Serang 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Landasan : Kondisi suprastruktur (peraturan perundang – undangan atau regulasi daerah), infrastruktur dan struktur pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Serang dalam berbagai aspek kehidupan (sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan).

2. Global : Kondisi Kota Serang yang mampu tumbuh, berkembang dan maju secara dinamis mengikuti perkembangan jaman dan sejajar dengan kota – kota maju di Provinsi Banten.
3. Berwawasan : Kondisi Kota Serang yang memiliki lingkungan asri, serasi, lestari, tentram dan tertib.

Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan Provinsi, visi pembangunan Kota Serang tahun 2010 – 2015 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Serang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten Dan visi pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari pembangunan Kota Serang tahun 2010 - 2015 maka dirumuskan “Misi pembangunan Kota Serang tahun 2010 – 2015“ adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Prima;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Keberdayaan Masyarakat Yang Produktif, Berbudaya Dan Agamis;
3. Meningkatkan Dan Mendorong Pertumbuhan Dan Kualitas Perekonomian Daerah Dan Masyarakat;
4. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Wilayah Yang Memadai Dan Berkualitas;
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang Yang Menunjang Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan Nasional dan Provinsi, misi pembangunan Kota Serang tahun 2010 – 2015 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Serang untuk mendukung pencapaian misi pembangunan Provinsi Banten dan misi pembangunan nasional.

Menegaskan tujuan pemerintahan kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Menghormati kebebasan beragama (lima agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang)
2. Menjaga persaudaraan antar umat beragama
3. Menjaga perdamaian dan kedamaian
4. Menjaga persatuan
5. Etika politik yang bebas bertanggung jawab
6. Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara (masyarakat)
7. Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan
8. Terciptanya masyarakat yang demokratis
9. Menghormati hak-hak azasi individu
10. Selalu berada dalam koridor agama

Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa menciptakan masyarakat kota Serang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan). Di sisi lain tak luput juga terdapat beberapa potensi yang ada di Kota Serang yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi aset daerah yang berharga, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Segi Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kota Serang dalam periode 10 tahun terakhir yaitu tahun 2000 sampai tahun 2010 sebesar 2,88 persen. Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa Kota Serang dihuni 577.785 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 297.187 jiwa dan lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 280.598 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Serang, yaitu 208.017 jiwa,

sementara kepadatan terendah berada di kecamatan curug sebanyak 954 jiwa/km².

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Serang memiliki tingkatan yang signifikan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 lalu. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kota Serang berjumlah 32.764 orang meningkat di tahun 2010 menjadi 40.700 orang. Ini membuktikan bahwa kesejahteraan dan standar hidup layak masyarakat Kota Serang masih rendah.

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di Kota Serang maka untuk perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan perhitungan penambahan jumlah penduduk secara konstan tanpa terjadinya lonjakan jumlah penduduk. Dalam hal ini cara perhitungan prediksi yang digunakan adalah perhitungan dengan menggunakan cara *Regresi Linear*. Untuk jelasnya, pertumbuhan penduduk tahun 2003-2007 dan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2028 di Kota Serang yang menjadi kawasan perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Serang 2003-2007

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa)					LPP
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Serang	180,540	186,298	190,743	181,569	181,286	0.001
2	Cipocok Jaya	51,924	53,668	54,339	51,927	64,273	0.055
3	Curug	41,573	42,975	43,606	41,420	45,570	0.023
4	Walantaka	62,303	64,378	65,286	62,338	64,778	0.010
5	Taktakan	62,904	65,208	65,479	62,369	66,159	0.013
6	Kasemen	78,541	81,214	82,109	78,496	81,425	0.009
Jumlah		477,785	493,741	501,562	478,119	503,491	0.02

Serang periode tahun 2003 – 2007 cenderung meningkat 0,02 dengan

jumlah penduduk pada tahun 2003 sebesar 477.782 jiwa, pada tahun 2004 sebesar 493.741 jiwa, sedangkan pada tahun 2005 pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 501.562 jiwa, sedangkan pada tahun 2006 menurun menjadi 478.119 jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2007 yaitu sebesar 503.491 jiwa.

Tabel 4.2
Proyeksi Penduduk Kota Serang Tahun 2009-2028

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2009	2010	2013	2018	2023	2028
1	Serang	181,473	181,660	182,223	183,165	184,111	185,062
2	Cipocok Jaya	67,794	71,509	83,918	109,567	143,056	186,780
3	Curug	46,628	47,710	51,111	57,326	64,296	72,114
4	Walantaka	65,972	67,187	69,179	72,632	76,256	80,061
5	Taktakan	66,999	67,849	70,466	75,053	79,938	85,142
6	Kasemen	82,162	82,906	85,179	89,107	93,215	97,513
Jumlah		511,028	518,822	542,076	586,848	640,872	706,673

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Serang

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Serang selama kurun waktu 2003 – 2007 sebesar 1,03 %/tahun. Untuk proyeksi sampai tahun perencanaan (Tahun 2028) penduduk Kota Serang diperkirakan berjumlah 581.670 jiwa.

2. Kondisi Perekonomian

Ditinjau dari perhitungan atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Serang meningkat 12,77 persen yaitu dari 2.806,5 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 5.420,3 milyar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan menurut penghitungan atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kota Serang meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,63 persen. Kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Serang

menurut lapangan usaha pada tahun 2010 diberikan oleh lapangan usaha jasa-jasa sebesar 24,38 persen dari total PDRB, kemudian diikuti lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,00 persen, selanjutnya lapangan usaha bangunan sebesar 20,26 persen, kemudian lapangan usaha keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 10,03 persen, lapangan usaha pertanian sebesar 8,68 persen, lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,62 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,48 persen, lapangan usaha listrik, gas dan air bersih sebesar 1,53 persen dan terakhir lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,02 persen dari total PDRB. Sementara itu, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kota Serang mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memperlihatkan angka sebesar 3,90 persen saja, walaupun secara nominal menunjukkan kenaikan hingga akhir 2010.

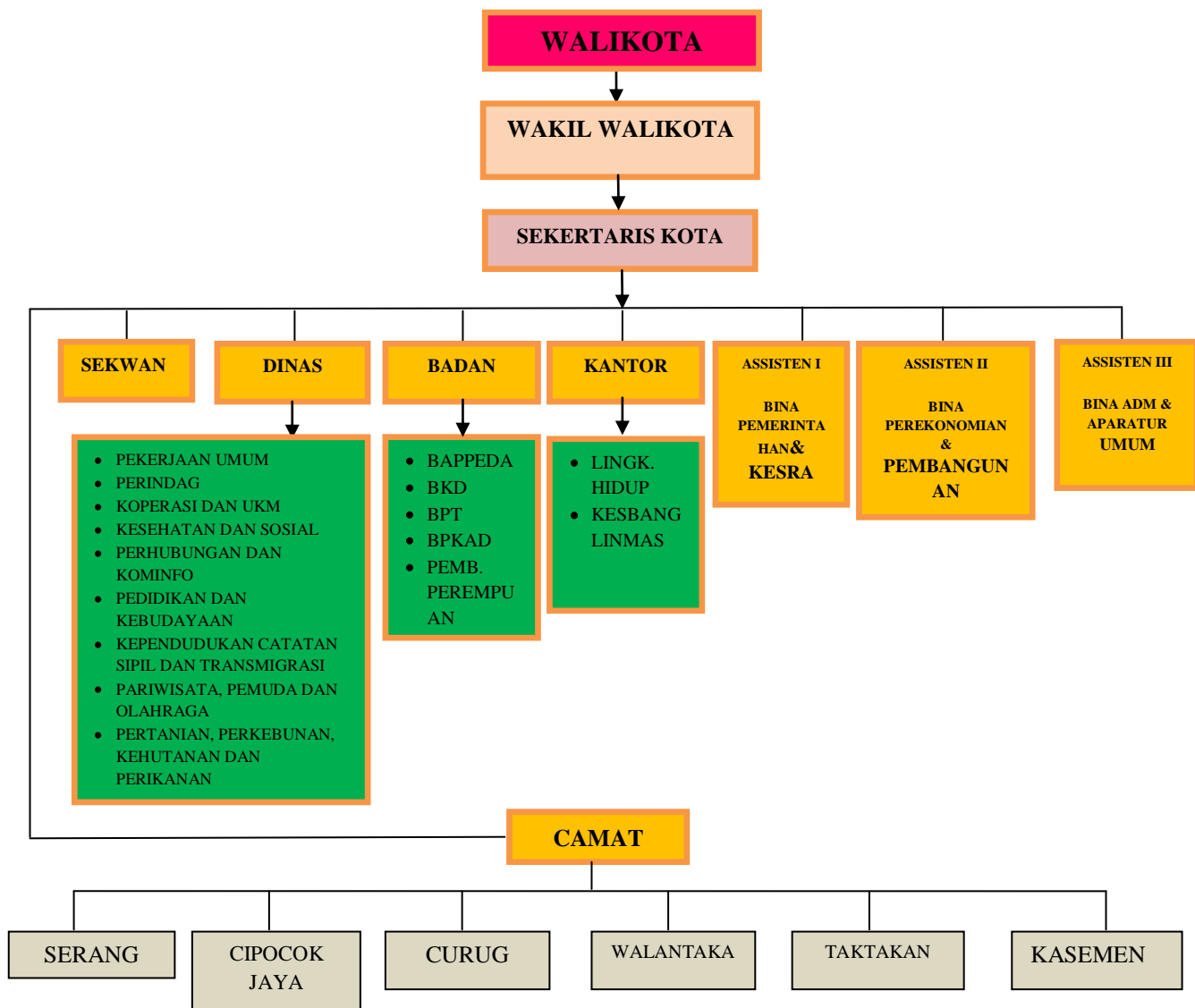
3. Tinjauan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kota Serang beragam, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kehutanan dan perkebunan. Sektor pertanian Kota Serang ikut juga memberikan kontribusi terhadap pertanian provinsi Banten. Pada tahun 2010, Kota Serang menyumbang 3,82 persen untuk produksi padi Provinsi Banten. Selama periode tahun 2009 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan produksi padi sawah dan padi ladang di Kota Serang. produksi padi sawah meningkat dari sejumlah 69.984 ton di tahun 2009 menjadi sejumlah 82.439,69 ton di tahun 2010.

Sementara untuk padi ladang meningkat dari 1.405 ton di tahun 2009 menjadi 1.526,81 di tahun 2010. Luas lahan sawah di Kota Serang menurut sistem irigasinya sebagian besar berasal dari irigasi teknis 45 persen (3.70 ha), kemudian dari tadah hujan 41 persen (3.423 ha), dan sisanya dari irigasi non teknis dan setengah teknis (609 ha dan 578.8 ha).

4. Administrasi Umum Pemerintahan

Secara Administratif, Kota Serang terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok jaya, kecamatan Taktakan, dan kecamatan Kasemen serta 66 desa/kelurahan, sementara secara organisatoris pemerintahan, pemerintah Kota Serang terdiri atas satu sekretaris daerah, tiga asisten daerah, satu sekretariat DPRD, lima Badan, satu Inspektorat daerah, sebelas Dinas, empat Kantor dan satu Komisi.



Pendanaan pembangunan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi APBN untuk Kota Serang melalui dana perimbangan pada tahun 2010 mencapai 410.703 Trilyun Rupiah. Alokasi APBD Provinsi Banten untuk Kota Serang melalui lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 89,134 Trilyun Rupiah. Ada 5.221 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja di Pemerintahan Kota Serang, dibagi menurut golongan yaitu 63 Pegawai golongan I, 1.286 Pegawai golongan II, 2325 golongan III dan sebanyak 1547 Pegawai golongan IV.

1. Strategi Kota Serang

a. Strategi Jangka Pendek

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui strategi jangka pendek yaitu:

1. Menentukan posisi Kota Serang melalui identitas dan visi yang kuat yaitu: “Serang Semarak, Kota Pelabuhan yang Religius”.
2. Membangun aparatur (birokrasi) yang profesional dan berkualitas tinggi
3. Review penataan kota yang berorientasi pada DEEP (*Design-Environment-Economics-Planning*)
4. Pengesahan perda penataan bangunan dan lingkungan
5. Supremasi hukum

b. Strategi Jangka Panjang

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui strategi jangka panjang yaitu:

1. Kestinambungan dan pembangunan lingkungan yang responsif dengan cara penilaian lingkungan dan penguatan menggunakan teknologi dan GIS, “*Green Development*” standar perencanaan, menggunakan energi alternatif yang *non pollutan serta recycle dan regeneration*.
2. Menjadi kota dunia yang berkelanjutan: mempunyai ideentitas yang kuat, visi pembangunan yang bersih, kreatif dalam memasarkan potensi daerah, roda ekonomi yang terus berkembang, budaya dan persamaan hak masyarakat serta keseimbangan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui stabilitas politik, kebebasan personal, pencegahan pencemaran udara, kualitas kesehatan, pendidikan, makanan dan minuman serta pentas seni.
4. Perencanaan urban desain yang berkelas dunia meliputi infrastruktur, pembangunan *information technology*, pembangunan kota satelit, sistem transportasi masal, *land use mix* dan pembangunan yang manusiawi yang menyediakan tempat untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda.
5. Pembentukan karakter kota dan tempat yang berkesan meliputi: pemeliharaan dan konservasi kawasan dan bangunan cagar budaya, menciptakan dan menata ruang publik, membuat “*Architecture Landmark*”

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang

Dinas Pekerjaan Umum merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum.

Visi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang yaitu :

”*Terdepan dalam pelayanan, handal dalam penyediaan sarana dan prasarana*”.

Sedangkan misi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang yaitu :

1. Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan yang baik dan benar serta meningkatkan SDM Aparatur
2. Memenuhi kebutuhan prasarana jalan dan sembanan yang nyaman untuk memperlancar transportasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat
3. Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air dan Irigasi Masyarakat Kota Serang
4. Memenuhi Prasarana dan Sarana dasar perumahan, pemukiman, dan gedung pada kawasan perkotaan berlandaskan atas manfaat, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan dan lingkungan.

Tujuan :

1. Untuk meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan
2. Untuk membangun, memelihara dan meningkatkan prasarana dan sarana jalan dan jembatan
3. Untuk meningkatkan pelayanan ketersediaan Sumber Daya Air Baku
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan lingkungan dan gedung pemerintahan

Tujuan, sasaran dan strategi

Tujuan:

1. Tujuan Sekretariat : meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan, serta meningkatkan fungsi penyusunan program, pengendalian, dan evaluasi serta mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Tujuan Bidang Sumber Daya Air : (i) penyediaan air untuk air baku kebutuhan rumah tangga, perumahan, pariwisata dan pengairan. (ii) melindungi kawasan pertanian, pemukiman dan industri dari bencana banjir.
3. Tujuan Bidang Bina Marga : (i) meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana jalan dan jembatan guna menunjang aktivitas masyarakat dan mendukung perkembangan kawasan perekonomian. (ii) mempertahankan kondisi pelayanan jaringan jalan dan jembatan
4. Tujuan Bidang Cipta Karya : Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan lingkungan, sarana air bersih, saluran air limbah, gedung pemerintah.
5. Tujuan Bidang Tata Kota : (i) meningkatkan pengendalian, pengawasan melalui pembinaan dan penegakan hukum. (ii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota menuju

keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan keindahan dan kenyamanan.

6. Tujuan Bidang Kebersihan : meningkatkan kebersihan, keindahan dan angkutan sampah di Kota Serang

Sasaran :

1. Sasaran Bidang Sumber Daya Air : terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi
2. Sasaran Bidang Bina Marga : terwujudnya panjang jalan strategis ekonomi Kota Serang
3. Sasaran Bidang Cipta Karya : terwujudnya peningkatan panjang jalan lingkungan, pelayanan air bersih, peningkatan rumah-rumah kumuh, pengelolaan air limbah dan peningkatan gedung-gedung pemerintahan.
4. Sasaran Bidang Tata Kota : terwujudnya penataan Kota sesuai dengan tata ruang kota yang teratur, nyaman, indah, dan segar
5. Sasaran Bidang Kebersihan : terwujudnya keindahan Kota Serang yang bersih, sehat, dan nyaman

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
Sekretaris membawahi 3 (tiga) unit organisasi, yaitu :
 1. Subag bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subag Keuangan
 3. Subag Program evaluasi dan pelaporan
- c. Unsur pelaksana adalah bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Perumahan dan Pemukiman
 - b. Seksi bangunan gedung dan lingkungan
 - c. Seksi pengawasan dan pengendalian bangunan
 2. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi pemanfaatan dan kemitraan
 - b. Seksi operasi dan pemeliharaan
 - c. Seksi drainase
 3. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi perencanaan dan pengendalian
 - b. Seksi pembangunan dan peningkatan
 - c. Seksi pemeliharaan
 4. Bidang Tata Kota, membawahi :
 - a. Seksi penataan Kota
 - b. Seksi Pemanfaatan dan pengendalian tata kota
 - c. Seksi PJU dan pertamanan
 5. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - a. Seksi operasional dan angkutan

- b. Seksi pengelolaan sampah
 - c. Seksi peralatan
6. Unit Pelaksanaan Teknis

Pada Dinas Pekerjaan Umum unit teknis yang ada hanya unit pelayanan teknis laboratorium dan peralatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi UPTD
- b. Kepala Subag Tata Usaha

Dalam penelitian kali ini Peneliti mengambil dua bidang saja yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus: Pasal 17 Sistem Sarana dan Prasarana Drainase dan Pedestrian) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Cipta Karya, yang memiliki masing-masing Seksi yaitu :

- a. Bidang Sumber Daya Air :
 - a. Seksi pemanfaatan dan kemitraan
 - b. Seksi operasi dan pemeliharaan
 - c. Seksi drainase
- b. Bidang Cipta Karya :
 - a. Seksi Perumahan dan Pemukiman
 - b. Seksi bangunan gedung dan lingkungan
 - c. Seksi pengawasan dan pengendalian bangunan

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang

Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang, perumahan, dan pemukiman dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Tata Kota Kota Serang merupakan dinas baru yang berdiri dari pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dikarenakan beban kerja yang tinggi. Dasar hukum berdirinya dinas Tata Kota Kota Serang yaitu PERDA No. 14 Tanggal 11 Desember tahun 2011 yang berisi tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kota Serang nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kota Serang.

Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang memiliki kantor yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, perumahan *Highland Park*, di kawasan Kota Serang Baru yang dirasa kurang strategis bagi masyarakat Kota Serang karena jarak lokasi kantor dengan pusat keramaian cukup jauh. Berlokasi di kawasan kantor walikota serang dan kantor yang berlokasi dalam satu gedung dengan dinas Pekerjaan Umum dan berdampingan dengan gedung kantor dinas lainnya sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi atau dinas lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang penataan kota.

Dinas Tata Kota (DKT) Kota Serang memiliki visi yaitu: “Terwujudnya landasan kota serang yang global dan berwawasan lingkungan yang madani “

Sedangkan misi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan pendayagunaan penataan ruang.
3. Meningkatkan prasarana, sarana dan fasilitas perumahan, permukiman, penerangan jalan umum dan pertamanan.
4. Meningkatkan pelayanan kebersihan.
5. Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas

Tata Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang Penataan Ruang, perumahan dan permukiman serta kebersihan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta kebersihan.
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman serta kebersihan.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelayanan umum di bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman serta kebersihan.
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas.
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknik dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
3. Unsur pelaksana adalah bidang, terdiri dari:
 1. Bidang penataan ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan tata ruang kota
 - b. Seksi pemanfaatan tata ruang kota
 - c. Seksi pengendalian tata ruang kota
 2. Bidang perumahan dan pemukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan perumahan permukiman
 - b. Seksi pembangunan dan pengendalian perumahan
 - c. Seksi penerangan jalan umum dan pertamanan
 3. Bidang kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi operasional dan angkutan
 - b. Seksi pengelolaan sampah
 - c. Seksi peralatan
4. UPT pemadam kebakaran
5. Kelompok jabatan fungsional

Dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang tahun 2010-

2030 (studi Kasus : Pasal 17 sistem prasarana drainase dan pedestrian) peneliti mengambil dari bidang Perumahan dan pemukiman dimana yang diambil seksi pembangunan dan pengendalian perumahan.

4.1.4 Gambaran Umum (Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan darat, laut dan udara, dan Komunikasi dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang dikoordiansikan oleh Asisten Pembangunan.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika memiliki visi yaitu “Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang handal”. Sedangkan misi dari Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dishubkominfo menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, yang berorientasi pada pelayanan publik
2. meningkatkan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang tepat waktu, menjangkau semua wilayah, kapasitas mencukupi, cepat tertib, teratur, serta mendukung pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
4. Merumuskan perencanaan bidang transportasi, komunikasi dan informatika melalui penetapan program dan kegiatan skala prioritas, kajian ilmiah, sinergitas antar matra transportasi dan kemampuan operasional implementasi di lapangan.

5. Merumuskan sistem operasional prosedur, mekanisme ketatalaksanaan, landasan ketentuan hukum dan pengendalian operasional lapangan dalam rangka pelayanan publik yang prima.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang transportasi, komunikasi dan informatika.
7. Memantapkan rumusan perencanaan transportasi lima tahun kedepan melalui penetapan skala prioritas, kajian ilmiah, sinergitas antara matra ken kemampuan implementasi di lapangan.
8. Memantapkan sistem operasi dan prosedur, mekanisme ketatalaksanaan
9. Memantapkan kualitas sumber daya aparatur matra transportasi dengan mengikutsertakan aparatur guna mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tersedia.
10. Memantapkan penghayatan dan pemahaman aparatur dinas perhubungan untuk selalu berorientasi terhadap visi dinas yaitu mewujudkan sistem transportasi yang handal yaitu sistem transportasi yang terpadu, beraksesibilitas tinggi, aman, lancar, nyaman, teratur, cepat dan terjangkau oleh masyarakat.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan darat dan laut, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota

Serang terdiri dari:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian program dan evaluasi pelaporan
3. Bidang lalu lintas dan angkutan
 - 1) Kepala seksi lalu lintas

- 2) Kepala seksi angkutan
- 3) Kepala seksi hubungan laut
- 4. Bidang keselamatan teknik sarana dan prasarana
 - 1) Kepala seksi pengujian kendaraan bermotor
 - 2) Kepala seksi keselamatan
 - 3) Kepala seksi perparkiran dan terminal
- 5. Bidang komunikasi dan informatika
 - 1) Seksi pos
 - 2) Kepala seksi komunikasi
 - 3) Kepala seksi sandi komunikasi.

Di penelitian kali ini, peneliti hanya fokus pada bidang yaitu Implementasi

Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 sistem Prasarana

Drainase dan Pedestrian) :

- 1. Sekretariat :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
- 2. Bidang lalu lintas dan angkutan :
 - a. Kepala seksi lalu lintas
 - b. Kepala seksi angkutan

4.1.5 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Visi dan Misi Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang

Visi :

“Terwujudnya Landasan Kota Serang yang Global dan Berwawasan Lingkungan Yang Madani”

Misi :

- 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mematuhi peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah
- 2. Meningkatkan pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- 3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga serta sarana dan prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam ketentraman dan ketertiban

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Kota Serang yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala-kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, urusan umum kepegawaian

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan, kearsipan,
- c. Pelaporan.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

5. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. Pelaporan.

6. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan tentang penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;

7. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

8. Seksi Operasi dan Pengendalian

- a. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan tentang operasi pengendalian penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

9. Seksi Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan konsep kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat;

10. Bidang Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pembinaan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;

11. Seksi Pelatihan Dasar

- a. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan tentang pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

12. Seksi Teknis Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan teknis fungsional bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

13. Bidang Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pembinaan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat;

14. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. Dalam melaksanakan tugas), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan Satuan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan perlindungan masyarakat;

15. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan teknis kegiatan Bina Potensi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Program Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

- a. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- b. Penertiban Gelandangan dan pengemis (GEPENG)
- c. Penertiban PSK dan Waria
- d. Penertiban Becak
- e. Operasi Yustisi, operasi Yustisi dilakukan atas dasar permohonan dari Instansi/ Dinas tertentu. Sebagaimana Satpol PP menjalankan fungsinya sebagai pelaksana penertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Razia Pegawai Negeri Sipil
- g. Pendataan Tempat Tinggal yang menjadi Tempat Ibadah
- h. Pendataan dan Penertiban Tempat Usaha, Bangunan
- i. Razia Anak Sekolah

Di penelitian kali ini, peneliti hanya fokus pada satu bidang saja, Kasi Pengendalian dan operasi dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian).

4.1.6 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur Penunjang Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang

mempunyai visi : “Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Daerah Yang Terpadu, Terukur dan Berkesinambungan Di Kota Serang Tahun 2015”.

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang tersebut diatas, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan konsistensi Perencanaan Daerah di bidang sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, tata ruang, ekonomi serta pelayanan umum,
2. Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan harmonisasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan daerah baik internal maupun eksternal organisasi,
3. Membangun perencanaan daerah secara terukur yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan baik kualitas maupun kuantitasnya,
4. Mewujudkan perencanaan daerah yang sistematis, terarah dalam upaya tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah agar mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Perumusan kebijakan pembangunan daerah
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal, perencanaan sosial dan budaya, fisik dan prasarana, serta program penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari

:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

- 1) Kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
- 2) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- 3) Kepala sub bagian keuangan
3. Bidang perencanaan makro
 - 1) Kepala sub bidang perencanaan pembangunan sosial, pendidikan dan kesehatan
 - 2) Kepala sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan kependudukan
4. Bidang perencanaan perekonomian
 - 1) Kepala sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian
 - 2) Kepala sub bidang perencanaan, pembangunan pertanian, sumber daya alam dan energi
5. Bidang perencanaan wilayah
 - 1) Kepala sub bidang perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah
 - 2) Kepala sub bidang perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan

Di penelitian kali ini, peneliti hanya fokus pada bidang saja yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) :

- Sub bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).
- Sub bidang Umum dan Kepegawaian.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), peneliti

memfokuskan diri untuk melakukan penelitian pada jalan-jalan utama atau biasa disebut Jalan Protokol penghubung Kabupaten/Kota dengan pusat pemerintahan di Kota Serang dan juga jalan-jalan pemukiman warga yang dekat dengan Pusat Pemerintahan.

Anggriani (2009: 54) menjelaskan bahwa Jalan Protokol adalah termasuk dalam golongan jalan utama, dalam kota-kota besar sebagai jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas (KBBI, Dep.P&K, 1995 : 396). Dimana pengertian jalan utama adalah jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota-kota penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat keramaian. (Peraturan Geometrik Jalan Raya No. 13/1970, BPPU 1976 : 2). Peneliti mengambil lokus pada jalan utama dan pemukiman warga yang dekat pusat pemerintah karena peneliti merasa jalan-jalan tersebut dapat mewakili jalur-jalur drainase yang lainnya yang menjadi target penerapan dari Perda.

4.2.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan gambaran secara umum hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini mengenai Implementasi Perda Kota Serang No.6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang dihasilkan dan yang didapat selama proses penelitian berlangsung adalah pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan dan diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat yang berasal dari

hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di Lapangan, catatan lapangan penelitian hingga dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan peneliti secara investigasi dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan mengenai Implementasi Perda Kota Serang No.6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) yang difokuskan pada jalan-jalan utama dan jalan-jalan pemukiman yang dekat dengan pusat pemerintahan Kota Serang. Sedangkan Dinas atau pihak yang terkait dalam penelitian kali ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang, Dishubkominfo Kota Serang, Satpol PP Kota Serang, Bappeda Kota Serang, PT. Marga Mandala Sakti, serta pihak lainnya yang masih berkaitan dengan focus penelitian. Data yang telah terkumpul nantinya akan diproses lebih lanjut oleh peneliti dengan menganalisis hasil penelitian tersebut sehingga menghasilkan pemahaman baru dari data yang telah didapat tadi. Selain itu juga peneliti melakukan triangulasi atau pengecekan data yang telah didapat melalui sumber dan teknik yang berbeda.

4.2.3 Daftar Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Implementasi Perda Kota Serang No.6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus

: Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) dimana peneliti membatasi penelitian yang ditentukan secara acak yang mewakili setiap wilayah Kecamatan, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Satori dan Komariah (2010:47) mengemukakan bahwa *purposive sampling* menentukan subjek atau objek sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Teknik *purposive* merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Untuk dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I, maka penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan yang bersedia untuk diwawancarai diantaranya adalah :

1. **Adelin Sofyan, S.E, MM** Kasi Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang.
2. **Ir. H. Syamsurizal, MM** Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang.
3. **Iphan Fuad, ST, M.Si**, Kasi Pembangunan dan Pengendalian bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
4. **Suryadinata, S.E**, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang

5. **Bambang Riyadi, S.H**, Kasi Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang
6. **Misri**, Kasi Pengendalian dan Operasi Dinas Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kota Serang.
7. **Saiful Bahri, MT**, Kepala Sub.Bidang Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang
8. **Hj. N. Saodah, S.Pd, M.Si (53)**, selaku Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
9. **Np. Rahardian**, Direktur Eksekutif LSM rekonvasi Bhumi
10. **Hammer(26)**, Masyarakat yang bermukim di Titik Banjir
11. **Harisoni (25)**, Pedagang Kaki Lima di Kawasan titik banjir
12. **Humaedi (24)**, Masyarakat pengguna jalan
13. **Slamet Ariyadi**, Supervisor Departement Perencanaan PT. Marga Mandalasakti

Informan diatas merupakan informan utama dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan oleh informan. Setelah data mentah terkumpul dengan baik maka peneliti membuat transkrip data yaitu dengan merubah data-data hasil wawancara, observasi maupun kajian pustaka ke dalam

bentuk tulisan dan melakukan pengkodean. Kode *Q* menunjukkan pertanyaan wawancara penelitian, sedangkan kode *I* menunjukkan Informan penelitian.

*I*₁ merupakan kode informan untuk Kasi bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang, Adelin Sofyan, S.E, MM

*I*₂ merupakan kode informan untuk Kepala bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang, Ir. H. Syamsurizal, MM

*I*₃ merupakan kode informan untuk kasi Pembangunan dan Pengendalian bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang, Iphan Fuad, ST, M.Si

*I*₄ merupakan kode informan untuk Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Serang, Suryadinata, S.E

*I*₅ merupakan kode informan untuk Kasi Sub Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Bambang Riyadi, S.H

*I*₆ merupakan kode informan untuk Kasi Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Yulius Anwar, ATD, MT

*I*₇ merupakan kode informan untuk Kasi pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Pradja Kota Serang, Misri

*I*₈ merupakan kode informan untuk Kepala Sub bidang Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Saiful Bahri, MT

*I*₉ merupakan kode informan untuk Kepala Sub bidang Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Serang, Hj. N. saodah, S.Pd, M.Si

*I*₁₀ merupakan kode informan untuk Direktur eksekutif Rekonvaksi Bhumi, Np.

Rahardian

*I*₁₁ merupakan kode informan untuk Masyarakat Kota serang yang bermukim di kawasan titik rawan banjir, hammer

*I*₁₂ merupakan kode informan untuk masyarakat PKL kawasan titik rawan banjir,

Harisoni

*I*₁₃ merupakan kode informan untuk Masyarakat Penggunan Jalan, Humaedi

*I*₁₄ merupakan kode informan untuk Supervisor Departemen Perencanaan PT.

Marga Mandalasakti, Slamet Ariyadi

Tabel 4.1
Deskripsi Informan Penelitian

No	Instansi	Informan	Kode Informan	Peran dan Fungsi
1.	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	b. Kasi bagian SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang, Adelin Sofyan, S.E, MM	<i>I</i> ₁	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana kebijakan penyediaan sistem prasarana drainase Kota Serang & yang mengawasi pelaksanaan dari perda yang peneliti teliti
		b. Kabid Dirjen Cipta Karya Kota Serang, Ir. H. Syamsurizal, MM	<i>I</i> ₂	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana kebijakan sistem prasarana drainase Kota Serang
2.	Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang	a. Kasi Pembangunan dan Pengendalian bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang,	<i>I</i> ₃	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pemeliharaan lingkungan di sekitar drainase

		Iphan Fuad, ST, M.Si		
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang	<p>d. Kepala Sub. bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Suryadinata, S.E</p> <p>e. Kasi Keselamatan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Bambang Riyadi, S.H</p> <p>f. Kasi Angkutan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Yulius Anwar, ATD, MT</p>	<p>I₄</p> <p>I₅</p> <p>I₆</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengetahui tentang kompetensi para pegawai di Dishubkominfo Kota Serang • Berhubungan mengenai standar sistem prasarana drainase Kota Serang • Yang membidangi sistem prasarana drainase Kota Serang
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang	b. Kasi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kota Serang, Misri	I ₇	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang	<p>c. Kasubid-Bidang Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, Saiful Bahri, MT</p> <p>d. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Serang, Hj. N. Saodah, S.pd, M.Si</p>	<p>I₈</p> <p>I₉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang mengetahui kompetensi SDA yang bekerja di BAPPEDA • Mengidentifikasi, mengumpulkan, menyusun dan melaksanakan perencanaan penetapan kebijakan tata

				ruang dan sumber daya alam Kota Serang
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekonvasi Bhumi	b. Direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi, Np. Rahardian	I ₁₀	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi yang memposisikan diri sebagai penyeimbang yang kritis dalam memandang persoalan persoalan lingkungan hidup
7.	Masyarakat	d. Masyarakat Kota Serang yang bermukim di kawasan titik rawan banjir, Hammer e. Masyarakat PKL kawasan titik rawan banjir, Harisoni f. Masyarakat Pengguna Jalan, Humaedi	I ₁₁ I ₁₂ I ₁₃	Sebagai sasaran kebijakan publik
8.	Pihak Swasta	b. Supervisor departemen Perencanaan PT.Marga Mandalasakti, Slamet Ariyadi	I ₁₄	Perusahaan yang bertanggung jawab atas bangunan

Setelah memberikan kode-kode proses berikutnya adalah, kategorisasi data. pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep- konsep (kata- kata) kunci dalam sebuah kategori melalui matriks wawancara yang kemudian penulis merinci isi dari kategori tersebut yaitu:

- a. kode Q_{1,2,3} dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. kode I_{1,2,3} dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), bagaimana respon masyarakat terhadap sistem prasarana drainase di Kota Serang sebagai sasaran kebijakan, tentang bagaimana pemerintah menjalankan Perda sebagai pelaksana Kebijakan, sampai sejauhmana peran pihak-pihak pemilik bangunan dalam turut andil di dalam pelaksanaan Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi akan dideskripsikan dalam interpretasi hasil penelitian. Jadwal wawancara dengan informan yang menjadi narasumber terdapat pada lampiran 1.2.

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas *konkrit* dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi Kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kederangannya mengenakan bagi telinga para

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.”

Begitu pula menurut Grindle dalam Agustino (2006:154), yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah tercapai”.

Terdapat berbagai definisi yang disampaikan para ahli mengenai Implementasi Kebijakan, diantaranya Metter dan Horn dalam Agustino (2006: 54) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Selanjutnya, Mazmanian dan Sebatier dalam Agustino (2006:54) mendefinisikan implementasi sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman

apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan tersebut.

Dalam sejarah perkembangan Studi Implementasi Kebijakan Publik, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami Implementasi Kebijakan, yakni : pendekatan *top down* dan *bottom up*. dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, mirip dengan (*top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan yang mirip pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan Studi Implementasi Kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan terlansir dan memulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus

dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat). Sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat.

Metter dan Horn (1975). Mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai berikut :

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digarisi dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berjalan secara Linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik Metter dan Horn dalam Agustino (2006 :164). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :

4.3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

4.3.1.1. Standar dan Sasaran Tertentu

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, tentunya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi

para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*Implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Metter dan Horn dalam Agustino, (2006:164).

Pada penelitian ini para pelaksana kebijakan yang melaksanakan kebijakan Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 terutama pada pasal 17 tentang sistem prasarana drainase. Agen Pelaksana kebijakan yang terlibat yaitu Dinas Pekerjaan Umum bagian Sumberdaya Air (SDA) yang mencakup peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi, Dinas Pekerjaan Umum bagian Dirjen Cipta Karya yang mencakup jalan lingkungan, pelayanan air bersih, peningkatan rumah-rumah kumuh, pengelolaan air limbah dan peningkatan gedung-gedung pemerintah, drainase termasuk kedalamnya. Dinas Tata Kota bidang perumahan dan pemukiman seksi pembangunan dan pengendalian perumahan. Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penataan ruang, perumahan, dan pemukiman dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya yaitu Pihak Swasta yaitu PT. Marga Mandalasakti Departemen Perencanaan yang mencakup jalan yang berada di bawah jalan Tol Jakarta-Merak. Kemudian, masyarakat sebagai target atau sasaran isi kebijakan, LSM. Pemahaman dari instansi-instansi yang terkait baik Instansi Pemerintahan maupun Swasta terhadap Peraturan daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Serang 2010-2030 terutama terkait Pasal 17 tentang sistem prasarana drainase menjadi hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan mengenai pasal 17 tersebut dapat mencapai target sasaran. Untuk menunjang itu semua adanya tindakan nyata. Melakukan rehabilitasi dan penyediaan sistem prasarana drainase adalah langkah yang bisa diambil untuk menanggulangi masalah banjir, karena saluran drainase yang rusak atau yang tersumbat akibat sampah atau sedimen yang menumpuk di saluran *drain inlet* dapat mengurangi daya tampung dan dapat membuat aliran air tidak berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Adelin Sofyan S.E, MM (I₁) yang menjelaskan bahwa :

”Setiap bulannya kita ada normalisasi jadi pembersihan saluran-saluran drainase pembuangan. diantaranya, ada galian lumpur, pembuangan sampah yang ada di saluran, kemudian rumputnya kita babat supaya mengurangi tingkat kerusakan. Setiap ruas di Kota Serang. Drainase disini bukan drainase jalan tapi drainase pembuang(Untuk penanganan permasalahan rehabilitasi dan penyediaan sistem prasarana drainase)”
(Wawancara/30 September 2015/pukul 10:38/ dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari wawancara dengan (I₁) diatas menjelaskan bahwa instansi terkait dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum bagian SDA dalam pelaksanaannya sudah menjalankan dengan baik tupoksinya yaitu dengan melakukan normalisasi. Pada kenyataan dilapangan yang peneliti lihat, adanya tumpukan sampah, sedimen yang mengendap di saluran drainase dan juga tanaman yang tumbuh subur di saluran masih peneliti temui dilapangan. Bukan hanya terdapat di beberapa wilayah saja. Hampir di setiap wilayah terlihat demikian sebut saja Jl.Ahmad Yani, Jl. Warung Pojok, di sepanjang Jl.Sempu, Depan Pengadilan Tinggi Banten, Jl.Raya Petir, Jl. Raya Taktakan, Banten Lama. (Untuk melihat kondisi drainase yang peneliti

sebutkan tadi terdapat pada lampiran 1.7 pada bagian lampiran-lampiran). Melihat dari bertolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh (I₁) dengan hasil temuan di lapangan, peneliti mencoba untuk mendapat keterangan dari informan dari instansi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai sistem prasarana drainase, guna mengetahui bagaimana pemahaman instansi lain yang terlibat dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) ikut serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Sistem prasarana drainase yang merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu Kawasan atau perencanaan infrastruktur khususnya. Namun hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Syamsurizal, Kabid Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (I₂).

"Begini mba Adhitia, kalau drainase itu hanya bagian pelengkap saja. Kalau kita membangun jalan kalau dananya cukup dilengkapi dengan saluran drainase kiri kanannya. Terus kalau ada jembatan gorong-gorong jadi kita buat. Jadi kalau Cipta Karya ini fokusnya ke Jalan Pedesaan sama bangunan gedung. Kebanyakan karena dananya minim jadi kita fokuskan ke badan jalan dulu mba Adhitia. Mungkin kalau dananya ada tambahan baru kita lengkapi dengan saluran drainasenya. Memang benar saluran drainase seharusnya disediakan agar badan jalantidak cepat rusak. Jika air hujan turun bisa masuk ke drainasenya".

(Wawancara/29 September 2015/pukul/14:55/di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa Dirjen Cipta Karya (I₂) memahami akan pentingnya prasarana drainase dalam suatu pembangunan namun

menurut pendapat beliau kurangnya pendanaan dalam setiap kegiatan menjadi sulit ketika harus membangun saluran *drain inlet* dalam menunjang bangunan utama. Tidak membangun saluran *drain inlet* akan mengakibatkan bangunan menjadi cepat rusak, bangunan yang mestinya bisa bertahan lama menjadi rusak sebelum waktunya. Dan pengeluaran anggaran akan lebih banyak lagi. (Petikan wawancara dengan semua narasumber terdapat pada lampiran 1.6 matriks wawancara setelah reduksi pada bagian lampiran-lampiran).

Untuk dapat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan publik dalam hal ini mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang terkait sistem prasarana drainase yang sudah ditetapkan pada tahun 2011 dan melibatkan banyak instansi untuk dapat menjalankan isi dari kebijakan tersebut. Selain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota salah satu instansi yang dilibatkan. Dinas Tata Kota baru terbentuk pada tahun 2012 yang mempunyai tugas yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tapi karena Dinas Tata Kota yang baru terbentuk pada tahun 2012 menurut pendapat dari Iphan Fuad, Kasi bidang Pembangunan dan Pengendalian perumahan dan pemukiman (I₃) seperti yang dikutip dari wawancara dengan beliau :

” Sementara ini, kita ini kan dinas baru, pecahan dari Dinas PU baru berdiri itu Januari 2012, jadi otomatis yang sudah kita lakukan untuk hal-hal kursial kita fisik sudah beberapa tapi belum maksimal yah karna memang kita dasarnya dari data base dulu”.

(Wawancara/28 Agustus 2015/10:33/dilakukan di Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang).

Dari hasil wawancara dengan (I₃) diatas menjelaskan bahwa Dinas Tata Kota yang baru terbentuk ini sudah menjalankan beberapa program namun belum maksimal, *data base* yang belum lengkap menjadi salah satu hambatannya. Ketika melakukan wawancara dengan beliau beberapa waktu yang lalu, sejauh ini *data base* tentang drainase belum tercover untuk seluruh wilayah. Dinas Tata Kota (I₃) merasa untuk terlebih dahulu mengutamakan kondisi lapangan, mengutamakan wilayah yang kira-kira mendesak pembangunannya. Dinas Tata Kota juga menambahkan bahwa pihaknya berusaha untuk bisa menyelesaikan perbaikan 3 Kelurahan dalam jangka waktu 1 tahun. Selama dalam kurun waktu 3 tahun ini ketika peneliti berkeliling melihat perbaikan beberapa fasilitas dalam hal ini terkait drainase belum banyak terlihat berubah, berubah menjadi lebih baik. Hanya pada jalan besar saja yang peneliti lihat dilakukan perbaikan jalan. Dan saluran drainase di beberapa jalan lainnya cenderung bertambah rusak.

Selain instansi pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan, pihak swasta dilibatkan dalam hal ini. sebagai pihak yang mempunyai kegiatan di bidang jasa dan pemilik bangunan tentu ada hal yang sudah disepakati antara para Instansi Pemerintah yang terkait dengan pihak swasta agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan ketetapan rancangan kebijakan. Ini menarik ketika melakukan wawancara dengan Slamet Ariyadi supervisor departemen perencanaan PT. Marga Mandalasakti (I₁₄) seperti yang di kutip :

“Untuk Perdanya kami belum membacanya, saya pernah denger tapi belum mendalami, kalau dari segi wewenang sebetulnya ada di pihak pemerintah, kan ada 2, ada tol ada akses. Nah kemarin sudah ada Berita Acara, ada sebagian yang menjadi wewenang MMS, ada wewenang pemerintah daerah, untuk yang Trondol ini kebetulan masuk di pemerintah, segala macam pemeliharaan hariannya dan segala macam

kalau ada masalah. Kalau MMS datang jika Pemerintah butuh koordinasi”.

(wawancara/23 Desember 2015/pukul 13:35/dilakukan di kantor Pusat PT.Marga Mandalasakti Karawaci-Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut (I₁₄) pihaknya belum mengetahui dari isi kebijakan dari membacanya. Informan menambahkan bahwa pihaknya hanya pernah mendengarnya saja. Untuk dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan di butuhkan pemahaman terhadap isi dari perda itu sendiri. Mengetahui dan kemudian dapat memahami isi dari kebijakan langkah awal untuk dapat memulai melakukan kegiatan pembangunan apapun. Agar pembangunan itu dalam hal ini terkait drainase dapat menjadi terarah, tidak menjadi liar dan dapat mendatangkan masalah di kemudian harinya.

Untuk dapat mengukur apakah kebijakan yang ada sudah dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat di wilayah Kota Serang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang peneliti pilih secara acak. Memiliki tempat tinggal yang nyaman dan bebas dari permasalahan lingkungan pasti menjadi idaman untuk masyarakat pada saat ini. sawah atau lahan penyerapan air sudah mulai sulit di jumpai karena populasi yang semakin meningkat dan kemudian menimbulkan dampak lahan dan sawah dijadikan pemukiman. Karena semakin sedikitnya lahan dan sawah maka ketika debit air yang ada meningkat akibat hujan turun dapat menyebabkan banjir. Berangkat dari hal itu peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga yang bermukim di Perumahan yang peneliti ketahui di jalan Perumahan tersebut sering

terjadi banjir. Salah seorang warga tersebut ialah Hammer yang bermukim di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai (I₁₁) :

“Jika untuk prasarana drainase di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai cukup baik, karena terdapat kali kecil dibelakang Perumahan. Solokannya pun cukup sekitar 45cm kebawah. Kalau untuk drainase di Kota Serang saya berantakan Tya. ”.(wawancara/ Minggu 13 Desember 2015/ Pukul 13:22/ dilakukan di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai Ciracas-Serang).

Dari hasil wawancara dengan (I₁₁) mengatakan bahwa untuk saluran drainase di Perumahannya tidak memiliki masalah, ketika peneliti melihat keadaannya, Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai lebih tinggi permukaan tanahnya dari jalan raya hal ini juga yang menyebabkan mengapa Komplek perumahan ini tidak terkena banjir ketika hujan datang selain keberadaan Kali kecil yang berada di belakang Perumahan Cluster ini. ketika (I₁₁) diajukan pertanyaan mengenai keadaan drainase di Kota Serang, respon yang diberikan menunjukkan kekecewaan informan terhadap sistem prasarana drainase di Kota Serang. Untuk dapat mencapai tujuan Para Pelaksana (*Implementors*) akan memberikan pelayan prima tentunya kepada masyarakat sebagai target dari kebijakan, sigap dalam bertindak ketika mendengar keluhan dari masyarakat mesti wajib dilakukan sebagai salah satu bentuk *service* dari pelayanan prima tersebut. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait respon yang diberikan oleh pemerintah kepada salah satu pedagang PKL bernama Harisoni (I₁₂) yang berjualan di Royal.

“Respon pemerintah belum kelihatan mba, hingga saat ini tempat ini masih kebanjiran juga mba kalau hujan. sementara hujan yang turuntidak lama tetapi sudah banyak genangan air. Kegiatan pemerintah yang kelihatan hanya mobil petugas kebersihan yang mengangkut sampah”.(wawancara/ senin 2 desember 2015/pukul 14:35/ dilakukan di Pasar Royal Serang).

Dari keterangan informan (**I₁₂**) pekerjaan yang paling rutin di kerjakan oleh dinas disini yang di maksud informan petugas kebersihan Dinas Tata Kota (**I₃**) saja yang rutin menangkut sampah. Jika menyangkut pemeliharaan sistem prasarana drainasenya tidak rutin dilaksanakan ini terlihat dari keterangan yang diberikan informan kepada peneliti saat peneliti melakukan wawancara dan melihat kondisi drainase di daerah royal tidak dalam keadaan baik. (untuk dapat melihat hasil petikan wawancara dengan narasumber dapat dilihat pada lampiran 1.6 matriks wawancara setelah reduksi pada bagian lampiran-lampiran)

Ketidaksiwaan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan dari isi kebijakan menjadi penyebab ketersediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang tidak mengalami perubahan yang positif. Pada tahun 2011 hingga 2015 ada program utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, yaitu meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro yang ada serta mengembangkan jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahawa drainase di Kota Serang masih banyak yang rusak, tertutup sedimen dan sampah, disepanjang Jalan di Kecamatan Kasemen drainase tertutup tanaman liar. Ini menjadi bukti ketidakmampuan para pelaksana kebijakan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

4.3.2. Sumber Daya

4.3.2.1. Sumber daya Finansial

Ketika sumber daya manusia sudah memadai, dan berkompeten akan menjadi sia-sia ketika anggaran dana tidak tersedia. Maka, tersedianya anggaran dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu program kebijakan mustahil berjalan sesuai dengan rencana jika anggaran dana tidak mampu mengakomodir. Hal yang seragam dikemukakan oleh Adelin Sofyan, Kasi bagian SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (**I₁**) :

“Skalanya 50juta>200juta itu paket kecil. Untuk paket yang besar kita sudah LPSE sudah langsung ke Pusat. Jika sudah lebih dari 200 juta. Kalau untuk paket besar, perkiraan waktu pengerjaannya 3 minggu. Jika di atas 2 Milyar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4bulan waktu pengerjaannya. Sejauh ini tidak ada masalah yang berat”. (Wawancara/rabu, 30 September 2015/pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Hasil wawancara dengan (**I₁**), dari segi biaya untuk anggaran per-proyek tidak ada permasalahan. Karena segala sesuatunya sudah ada aturan mainnya. Segala sesuatunya sudah berdasarkan perhitungan. jika melihat dari hal tersebut permasalahan drainase baik yang dibagian Hulu sampai dengan Hilir tidak akan mengalami kesulitan pada bagian penyediaan atau pada masa pemeliharaannya. Akan tetapi berkebalikan dengan yang dijelaskan oleh Syamsurizal, Kabid Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (**I₂**) mengenai pendanaan pada kegiatan yang dilakukan seperti pada kutipan wawancara berikut :

“Sekitar 200 Juta untuk satu ruas jalan. Sekitar untuk 400 Km. karena dananya minim jadi kita fokuskan ke badan jalan terlebih dahulu mba Adhitia. Mungkin kalau dananya ada tambahan baru kita lengkapi dengan saluran drainasenya”. (Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/

Pukul 14:55 WIB / dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan (I₂) melihat bahwa pembangunan sistem prasarana drainase sebagai penunjang bangunan menemui kendala pada bagian pendanaannya. *Drain inlet* hanya dapat di bangun hanya ketika ada dana yang turun yang terlebih dahulu. Untuk pembangunan drainase untuk satu wilayah ditafsir sekitar 200 juta untuk satu ruas jalan. Sekitar untuk 400 Km. jika kekurangan dana maka dinas terkait akan memotong panjang pengerjaannya. Seperti yang ditambahkan dalam sesi wawancara dengan (I₂) berikut :

”Kita potong panjangnya jika dana yang keluar lebih sedikit dari anggaran yang diajukan. Jadi sesuaikan dengan jumlah anggaran sesuai dengan SSH (Standar Satuan Harga). Jadi misalnya Per-meter kubik itu berapa rupiah, setelah diketahui kemudian kita bagi.” (wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Melihat dari petikan wawancara diatas dengan (I₂), dalam penyediaannya ada kesulitan dalam masalah pendanaan. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah yang pelik untuk dapat bisa merealisasikan akan sesuatu yang hendak dicapai. Masalah pada bagian anggaran juga diamini oleh Iphan Fuad, kasi pembangunan dan pengendalian bidang perumahan dan pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang (I₃) bahwa :

“sepertinya butuh proses yang cukup lama. Yang pertama, kita harus tetap mengacu pada ketersediaan anggaran.. Ketersediaan anggaran di Pemkot (Pemerintah Kota) itu sendiri, kemudian kita ajukan database dengan jumlah beberapa ratus juta. Tetapi di daerah terdapat kegiatan-kegiatan lain yang sama pentingnya. Yang pasti kita targetkan satu tahun anggaran itu inginnya satu Kecamatan selesai”. (Wawancara/ Jumat, 28

Agustus 2015/ pukul 10:33 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang).

Dalam kegiatannya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan dihitung terlebih dahulu kemudian di ajukan untuk tahun berikutnya. Dari semua informan yang sudah diwawancarai dan diajukan pertanyaan tentang permasalahan anggaran (dua) informan mengatakan mengatakan adanya kendala pada penyediaan adalah karena anggaran yang minim. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang no.6 telah keluar dari tahun 2011. Dan tahun ini sudah memasuki tahun 2016 jadi Perda ini sudah ada 5 tahun, dalam program utama di dalam perda tersebut pada poin (2.9) disebutkan program utama pengembangan dan pembangunan prasarana drainase meliputi: penyusunan masterplan sampai dengan peningkatan kapasitas jaringan drainase mikro yang ada serta mengembangkan jaringan drainase mikro yang baru serta terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani diprogramkan dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Berarti sudah ada program tersebut selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut belum terlihat perubahan dari segi prasarana drainase di Kota Serang ini. hal ini sangat disayangkan jika kita melihat begitu cantiknya perencanaan kegiatan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Kucuran dana dalam sebuah kegiatan memang sangat penting dalam semua kegiatan karena memang dalam pelaksanaannya membutuhkan untuk membeli bahan baku bangunan, menggaji para pekerjanya. Tapi keseriusan para agen pelaksana untuk mau berusaha lebih keras untuk itu bukan hal yang tidak mungkin kucuran dana juga bisa didapatkan. NP. Rahardian

Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi (I₁₀) yang peneliti jumpai beberapa saat yang lalu mengatakan :

“Kalau saya merever pada ucapannya Walikota, pada MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan)Provinsi beberapa saat yang lalu. APBD Kota dengan APBD, beberapa daerah itu tidakberbeda jauh. Sehinggauntuksaya ini terlalu naif. jika masalahnya masalah pendanaan. Kalau kita gag punya danaPemerintahKota berbicaradenganPemerintahProvinsi, dari Provinsi berbicara dengan PemerintahPusat. Apakah Mereka melakukan hal itu? Kita masih tergabung dalam NKRI dengan sistem dan mekanismenya. Jika tidak mempunyai danauntukmembangun langsung mengatakan ke Provinsi. Provinsi tidak mempunyai dana meminta ke Pusat. Jadi dana itu bukan persoalan menurut saya. Hanya persoalan membangun hubungan dan jejaring. Saya saja yang hanya LSM bisa mendapatkan beberapa Milyar dari pusat untuk pipa untuk masyarakat Cipayung. Apalagi sesama pemerintah, yang menurut saya, tergantungapakah mereka memilikiniat baik atau tidaknya. Dalam hal apapun bukan hanya permasalahan drainase, persoalan jalan, persoalan Lampu Jalan. (Wawancara/Rabu, 4 November 2015 / Pukul 10:48 WIB / dilakukan di Kantor LSM Rekonvasi Bhumi Ciceri Bunderan Serang).

Disimak petikan wawancara peneliti dengan (I₁₀) mengenai kucuran dana yang dikeluhkan oleh dinas terkait menjadi temuan baru yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena pada kenyataan LSM bisa mendapatkan dana untuk masyarakat Cipayung sebesar 1 Milyar dan di dalam *Master Plan* jelas dijabarkan tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya). Yang analisa biayanya dihitung berdasarkan dari buku “Patokan Harga Satuan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan PU Kota Serang, Periode Januari 2010”. Bahkan didalam buku tersebut juga terdapat perbandingan harga dengan harga yang berlaku dipasaran sebagai bahan perbandingan. Di dalam *Master Plan* terdapat mengenai detail rencana *design*-nya dari saluran drainase serta bangunan pelengkapnnya.. 1 Milyar bukan angka yang sedikit, jika LSM bisa mendapatkan sokongan dana begitu besar, semestinya instansi terkait bisa mendapatkannya.

Hal ini yang menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait menjadi masalah dalam penyediaan sarana prasarana drainase. Bahwa instansi terkait mengakui kesulitan dalam memperoleh anggaran dan ketika anggaran sudah diperoleh nominal anggaran tidak mampu memenuhi rencana pembangunan maupun pemeliharaan drainase.

4.3.2.2. Sumber Daya Waktu

Sumber daya lainnya dalam pelaksanaan implementasi yakni sumber daya waktu. Sumber daya waktu merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan suatu kebijakan, ketika sumberdaya manusia sudah berkualitas dan anggaran dana dalam kegiatan terpenuhi, akan tetapi waktu yang di tetapkan untuk pelaksanaan kebijakan terlalu sedikit dari jumlah waktu yang semestinya di berikan, maka pelaksanaan dari isi kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pelaksanaan waktu pengerjaan dalam penyediaan prasarana drainase tidak bisa di pukul rata akan waktu pengerjaannya. Semua tergantung pada besar kecil ukuran prasarana yang akan di bangun. Seperti yang diungkapkan oleh Adelin Sofyan (I₁) berikut ini :

“Tergantung pakatnya, minimal penunjukan waktu itu 2 bulan. Penunjukan langsung itu sistemnya kita seperti mengundang perusahaan-perusahaan yang biasa mengerjakan saluran untuk tandernya, tender langsung pada skala 50juta>200 Juta untuk paket kecil. Jika paket yang besar kita sudah memilikikerjasama dengan LPSE yang sudah langsung ke Pusat, jika sudah lebih dari 200 Juta. Kalau untuk paket besar jika di kiranya Cuma 3 minggu. Jika di atas 2 Milyar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4bulan waktu pengerjaannya” (Wawancara/ Rabu,30 September 2015/Pukul 10:38WIB/dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Waktu pengerjaan dalam penyediaan sistem prasarana drainase untuk satu proyek berkisar 4 bulan, jika dihitung program utama dalam perda 3 tahun untuk

dapat meningkatkan kapasitas jaringan drainase mikro dan tempat-tempat yang belum terlayani, 3 (tahun waktu yang di perkirakan) x12 bulan = 36 bulan/4 bulan (waktu pengerjaan untuk satu proyek). ± 9 wilayah jaringan drainase mikro atau tempat-tempat yang belum terlayani jaringan drainase saat ini sudah bisa membaik. Akan tetapi hingga saat ini yang peneliti liat banyak saluran di Kota Serang masih dalam keadaan yang tidak baik, akibatnya ketika musim penghujan seperti saat ini jalanan terendam air cukup tinggi, para pengendara memperlambat laju kendaraannya dan menimbulkan kemacetan setelahnya, para pedagang mengalami penurunan omset karena banjir para pelanggan mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat mereka berjualan karena ketinggian air yang cukup tinggi. Ini terjadi pada hari minggu malam pada tanggal 17 januari 2016 lalu di Royal. Untuk kawasan yang belum terlayani seperti kawasan Pedesaan, peneliti ambil contoh pada Kecamatan Kasemen drainase di Kecamatan Kasemen hanya sebatas saluran biasa yang tidak memiliki sambungan ke sungai atau bendungan. Pada kasus-kasus yang mendesak seperti ini pemerintah diharapkan bisa langsung turun tangan mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. hal ini disampaikan pula oleh Iphan Fuad, Kasi pembangunan dan pengendalian perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang (**I₃**) beberapa waktu yang lalu :

“Sementara ini, kita ini adalah dinas baru, pecahan dari Dinas PU yang baru saja berdiri Januari 2012, jadi secara otomatis yang sudah kita lakukan untuk hal-hal kursial yaitu bagian fisik saja. Ada beberapa yang sudah dikerjakan tapi belum maksimal, karena memang kita pada dasarnya berasal dari data base dulu. Sejauh ini, kita untuk data base tentang drainase belum tercover untuk semua wilayah. Alasannya seperti yang dijelaskan tadi. Untuk pengerjaan kita terlebih dahulu melihat

kondisi lapangan yang ada” (Wawancara / Jumat 28 Agustus 2015/ Pukul 10:33 WIB/dilakukan di kantor Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang).

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat terlihat bahwa untuk kecukupan sumber daya waktu harus dilihat dari besar atau kecilnya suatu proyek. Tidak bisa untuk menyamaratakan waktu pengerjaannya. Sampai saat ini waktu yang disediakan untuk melakukan pemeliharaan maupun pengerjaan belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi drainase di Kota Serang yang masih memprihatinkan.

4.3.2.3 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan proses Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara *apolitik*. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya manusia itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Beberapa instansi terkait dalam pelaksanaan penyediaannya kadang melibatkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal agar tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai seperti yang diungkapkan oleh Syamsurizal, Kabid Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang (I₂) :

“Biasanya ditangani oleh pihak ketiga, dan tidak ditangani langsung oleh PU. Perkiraan 10 orang dari pihak ketiga (Kontaktor/Pemborong). 10 orang itu pekerja dengan mandornya” (Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Agar pelaksanaan dari isi kebijakan berjalan dengan baik dan sampai tujuan menggunakan pihak ketiga bukan lagi hal yang baru dalam pengerjaan proyek di instansi pemerintahan. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya menjadi syarat agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat, kecukupan sumberdaya manusia dalam sebuah instansi menjadi pendorong agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat. Minimnya jumlah pekerja sedangkan beban dan tanggung jawab besar pastilah dapat membuat para agen pelaksana frustrasi hal tersebut juga dikeluhkan oleh Dishubkominfo melalui Suryadinata, Kepala Sub.bidang Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang (I₄) beberapa waktu yang lalu :

“SDM di Dishubkominfo masih sangat minim. Sebagian besar pegawai disini bukan PNS (honorar dan magang), tidak semua pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan sebagian besar pegawai dishubkominfo adalah tenaga kerja magang. Alhamdulillah kerjanya sudah bagus, mudah-mudahan nanti kalau ada tes CPNS mereka bisa ikut/daftar CPNS dan menjadi pegawai tetap. Dalam menjalankan pemerintahan khususnya di dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang setiap pejabat seharusnya mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab tupoksinya. Hanya saja mungkin karena keterbatasan jumlah pegawai/PNS nya, maka banyak pekerjaan yang tumpang tindih. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merencanakan ingin adanya pegawai tetap dari luar daerah namun prosesnya tidak mudah harus melalui pemda atau atas nama sekretaris daerah. Juga pertimbangannya kalau mendatangkan dari luar daerah karena di pertimbangkan belanja pegawainya”. (Wawancara/ Kamis, 17 september 2015/ Pukul 13:30 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang).

Melihat petikan wawancara dengan (I₄) kita dapat menyimpulkan bahwa memang hal yang mendasari dari belum bisanya implementasi suatu kebijakan ini adalah kuantitas sumberdaya manusia di instansi terkait tidak memadai sehingga pekerjaan menjadi terlalu memberatkan agen pelaksana. Minimnya jumlah pegawai juga dirasakan instansi lainnya seperti yang di ungkapkan oleh N.Saodah, Kepala Sub.bidang umum dan kepegawaian BAPPEDA Kota Serang (I₉) menjelaskan bahwa :

“Kualitas pegawainya baik, semuanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain Pegawai Negeri Sipil ada juga beberapa pekerja honorer dan juga beberapa siswi SMA yang magang di BAPPEDA untuk membantu pekerjaan kita juga, kita merasa kesulitan jika ada pekerjaan mendesak. Jumlah Pegawai negeri disini tidak banyak. (Wawancara/ Rabu, 12 Agustus 2015/ Pukul 10:21 WIB/ dilakukan di Kantor Dinas BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I₉) menjelaskan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang bekerja di BAPPEDA baik, baik dalam arti yang bekerja disana sudah dapat mengetahui tugas dan fungsinya dengan tepat, hal ini baik karena beban pikiran para pegawai yang sudah menjadi PNS jadi berkurang. Tidak dapat dipungkiri beban pekerjaan yang menumpuk tidak diiringi dengan jumlah agen pelaksana yang sedikit hal tersebut menghambat permasalahan penyediaan jadi terlihat sangat lambat pada saat ini, dan tujuan dari adanya perda tata ruang ini yakni unyuk mewujudkan Kota Serang sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam mendukung Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) jauh dari angan-angan untuk dapat segera terwujud.

Keterbatasan sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas menjadi masalah dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti.

4.3.3. Karakteristik Agen Pelaksana

4.3.3.1. Organisasi

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informal, karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Sebuah organisasi bisa saja dalam hal ini instansi terdapat berbagai macam karakter para agen pelaksana dari berbagai macam karakter ini akan membuat atmosfer lingkungan yang berbeda beda pula. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana para agen pelaksana membuat sikap dalam mengambil keputusan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. (I₁)berpendapat bahwa :

”Untuk sementara kita tersendat pada kewenangan, karena ruas jalan yang ada di bagi-bagi ada jalan Kota, Kabupaten, dengan Provinsi. Jadi setiap Kementerian kewenangannya berbeda-beda, terkadang kewenangan Provinsi kita yang mengerjakan”. (Wawancara/ Rabu, 30 September 2015/ Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa Adelin Sofyan (I₁) menghadapi kendala pada bagian kewenangan, karena setiap wilayah yang ada di Kota Serang tidak sepenuhnya dipegang oleh Dinas PU Kota Serang, sebagian ada kewenangannya Kabupaten, Provinsi, dan juga Pusat. Kemudian selain kendala pada bagian kewenangan, masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan belum bisa maksimal yakni terkait bagian pendanaan seperti yang sudah di jelaskan pada

bagian sumberdaya finansial. Jika menurut Syamsurizal (I₂) dalam memecahkan masalah tersebut ialah mematang perencanaan pada bagian anggaran seperti yang dipetik pada wawancara berikut :

”Kendala secara teknis tidak ada, jika dana kita ada masalah, karena anggaran yang ada saat ini hasil perencanaan tahun sebelumnya. Di buat DED dulu kemudian setelah DED, oleh konsultan muncul angkanya. dari situ kita dapat mengetahui berapa yang dibutuhkan untuk di ruas jalan ini. (Wawancara/ Selasa 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Kutipan wawancara diatas dengan (I₂), terlihat secara teori penyelesaian permasalahan terkait anggaran sudah dapat dipecahkan, namun pada kenyataannya, perencanaan yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyediaannya di lapangan tidak terlihat pada kondisi *drain inlet* yang baik. Narasumber juga menambahkan (I₂): “kita potong panjangnya jika dana yang keluar lebih sedikit dari anggaran yang diajukan. Jadi sesuaikan dengan jumlah anggaran jadi dikitakan sudah ada SSH (Standar Satuan Harga). Jadi misalnya permeter kubik itu berapa rupiah nah kita bagi.” (Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor dinas Pekerjaan Umum Kota Serang). Melakukan pemotongan cangkupan wilayah pengerjaan jika pendanaannya tidak mencukupi. Peneliti melihat beberapa pengerjaan perbaikan saluran drainase yang dilakukan dinas pekerjaan umum beberapa waktu yang lalu, seperti di Lopang, Perempatan Lampu Merah Ciceri, dan juga perbaikan saluran drainase dan bahu jalan di lingkungan Lebak Gempol. Panjang pengerjaan yang peneliti lihat terlalu pendek. Tidak sampai 20 meter yang ada di Lopang, peneliti merasa itu terlalu jauh dari pengerjaan yang diharapkan dari Peraturan daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Serang 2010-2030 pada pasal 17 sistem prasarana drainasenya. memberikan tindakan langsung jika adanya kerusakan saluran tanpa harus menunggu keluhan yang masuk mencirikan bahwa para agen pelaksana sudah benar-benar paham akan tupoksinya, akan tetapi yang peneliti lihat saat ini para agen pelaksana tidak memiliki karakter yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan drainase di Kota Serang. Mengenai hal ini N.P. Rahardian Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi (I₁₀) berpendapat bahwa :

“Jadi untuk saat ini, mengapa harus menunggu ada keluhan, karena mereka juga melihat. Rumahnya di lewati. Jika hujan turun kemudian ada air genangan dan menyebabkan banjir, yang menjadi persoalannya bukan pada keluhan. Jika drainase itu bukan hanya persoalan Kota melainkan persoalan semua pihak, yang harus bertanggungjawab, pemerintah kota harus merespon baik ada atau tidak adanya keluhan”. (Wawancara/ Rabu, 4 November 2015/ Pukul 10:48 WIB/ dilakukan di kantor LSM Rekonvasi Bhumi Ciceri Bunderan).

Berdasarkan petikan wawancara diatas dengan (I₁₀), bapak N.P. Rahardian perwakilan dari LSM yang juga masyarakat yang menjadi target dari adanya Perda Kota Serang no.6 tahun 2011 tentang RTRW Kota Serang 2010-2030 terkait Pasal 17 tentang sistem prasarana drainase, beliau menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah dengan kurang sigapnya menanggapi masalah banjir yang melanda Kota Serang ketika hujan datang. Karena memang banyak masyarakat yang merasakan dampak yang negatif bila permasalahan banjir di Kota Serang tidak bisa segera ditangani.

Dari hasil wawancara diatas, pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum mengeluhkan masalah kewenangan daerah yang terbagi bagi dan pendanaan yang tidak mampu memenuhi rencana pemeliharaan maupun pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini yang menyebabkan

masyarakat merasakan ketidaksiapan dari pemerintah dalam menanggapi luapan air atau banjir di jalan jalan protokol sehingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu.

4.3.3.2. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan

Ketika hendak menentukan agen pelaksana yang akan dilibatkan, terlebih dahulu kita harus memperhitungkan dengan luas wilayah yang akan ditangani para agen pelaksana sebab semakin luas wilayah cangkupan dari implementasi kebijakannya, maka semakin besar pula agen pelaksana yang akan dilibatkan. Karena diharapkan dengan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal. Mengenai hal tersebut Adelin Sofyan (**I₁**) mengatakan :

“Ada PPK, Kabid, dari Kabid turun ke Pejabat teknis kegiatan, PPK ini ada bawahan tapi pembantu pelaksanaan teknis saja, ada pengawasannya jadi kita melibatkan konsultan”.(Wawancara/ Rabu, 30 September 2015/ Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari keterangan yang diberikan oleh (**I₁**), beliau menjelaskan adanya PPK yang membantu dalam pelaksanaan dari isi kebijakan, diatas juga di jelaskan bahwa PPK memiliki bawahan lagi untuk membantu meringankan tugasnya, dan juga melibatkan seorang konsultan agar pelaksanaan kebijakan bisa di kerjakan tepat waktu dan tepat sasaran. Senada dengan jawaban yang di berikan Adelin Sofyan (**I₁**), Syamsurizal (**I₂**) juga menyampaikan bahwa : ”biasanya itu pihak ketiga, karena tidak ditangani langsung oleh PU. Kalau tidak salah 10 orang dari pihak ketiga (kontaktor/pemborong). 10 orang itu pekerja dengan mandornya”.(Wawancara/ 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di

kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang). Iphan Fuad, Kasi pembangunan dan pengendalian perumahan dan pemukiman Dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang (I₃) juga menambahkan :

“Point penting pada permasalahan dari semua SKPD di Kota yaitu, kitasatu seksi, Saya di bidang perumahan dan pemukiman hanya terdapat 2 PNS, yang lainnya PKL hanya 2 orang saja. Jadi untuk saat ini kita juga di bidang Perkim (Perumahan dan Pemukiman) tidak hanya menangani drainase saja, ada drainase, jalan setapak, kita nanganin jalan lingkungan, kita menangani air bersih, jadi kesulitan kita adapada bagian SDM”. (Wawancara/ jumat, 28 Agustus 2015/ Pukul 10:33 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Tata Kota Kota Serang).

Dari keterangan yang diberikan oleh Iphan Fuad (I₃), dapat dilihat bahwa agen pelaksana yang dilibatkan sangat tidak memadai, jumlah agen pelaksana dengan luas wilayah Kota Serang serta yang ditangani oleh dinas tata kota bukan hanya drainase saja menjadi masalah tersendiri di Dinas Tata Kota untuk dapat membantu dalam penyediaan prasarana drainase di Kota Serang. Seberapa banyak jumlah agen pelaksana yang dilibatkan dalam penyediaan sistem prasarana drainase diharapkan itu menjadi jumlah yang cukup untuk dapat menyediakan prasarana drainase yang akan mampu menampung jumlah debit air yang datang ketika hujan datang, sehingga masyarakat merasa nyaman hidup di Kota Serang.

4.3.4. Indikator yang mempengaruhi Sikap/Kecenderungan (*Disposition*)

Para Pelaksana

4.3.4.1. Pengetahuan

Pengetahuan dalam pemahaman tentang maksud dan standar dan tujuan kebijakan. Hal ini penting, karena, bagaimanapun implementasi kebijakan yang

berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para agen pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Menurut Adelin Sofyan (I₁) :

“Disposisinya baik, tidak ada masalah apapun sejauh ini, karena memang semuanya sudah terbiasa seperti ini, surat masuk ke bagian umum, kemudian nanti disampaikan ke Pimpinan kemudian nanti diarahkan kemana suratnya. Untuk penyampaian masalah dari setiap Desa, kita ada kegiatan Musrembang, dimana nanti semua perwakilan masing-masing desa di hadirkan untuk di dengar keluhannya apa saja. Kemudian kita buat laporan untuk kegiatan berikutnya, kalau ada keadaan yang mendesak kita akan dahulukan”. (Wawancara/ Rabu, 30 september 2015/ Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Serang).

Dari penjelasan (I₁), dikatakan bahwa, penyampaian pesan selama ini di Dinas Pekerjaan Umum sudah baik, mulai dari surat-surat yang masuk sampai penyampaian keluhan dari masing-masing wilayah, pemerintah menyediakan kesempatan kepada para Kepala Desa/Lurah untuk menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan di kegiatan Musrembang yang rutin diikuti dari berbagai instansi untuk program kegiatan berikutnya. Namun yang sangat disayangkan kegiatan Musrembang yang rutin dilakukan hanya kegiatan tanpa makna karna pada kenyataannya. Saiful Bahri (I₈) menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya juga mengikutsertakan masyarakat yang bermukim di wilayah proyek seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

“Masyarakat dilibatkan dalam pembangunnya. Contoh perbaikan jalan di Kecamatan. Pasti ada warga yang akan kita mintai bantuan untuk pelaksanaannya karena mereka yang memiliki wilayah tersebut, jadi ada mempunyai rasa memilikinya. Begitu juga jika ada perbaikan drainase”. (Wawancara/ Rabu, 12 Agustus 2015/ Pukul 10:21 WIB/ dilakukan di kantor Dinas BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan hasil ketikan wawancara dengan (I₈), menjelaskan bahwa dalam pembangunan penyediaan prasarana drainase melibatkan masyarakat

sekitar di dalam. Karena ada perasaan memiliki sehingga diharapkan dapat menjaga prasarana yang sudah sediakan. Hal ini memang baik dilakukan dengan tujuan masyarakat untuk dapat menjaga prasarana drainase, terhadap keluhan masyarakat, yang mengeluh tentang sistem prasarana drainase yang buruk tidak ditanggapi baik seperti penjabaran penyampaian pendapat di dalam Musrembang dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pada kenyataannya keluhan hanya didengar. Perbaikan prasarana drainase yang buruk hanya dikerjakan dengan panjang pengerjaan yang pendek. Terkesan hanya agar ada laporan adanya kegiatan perbaikan. Ini yang di keluhkan oleh Hammer salah seorang warga yang bermukim di wilayah Kota Serang (I₁₁) :

“Untuk prasarana drainase di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai cukup baik, karena terdapat kali kecil di belakang perumahan. Solokannyacukup sekitar 45cm kebawah. Untuk drainase di Kota Serang saya menyerah Tya. Sepertinya belum ada Tya, disana sini kalau hujan sering banjir, dan banyak drainase yang rusak.” (Wawancara/ Minggu, 13 Desember 2015/ Pukul 13:22 WIB, dilakukan di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I₁₁), informan mengatakan bahwa untuk didalam perumahannya tidak mengalami permasalahan banjir ketika hujan datang ini dikarenakan dibelakang perumahannya terdapat kali kecil sehingga ketika hujan datang air mengalir dari saluran drainase yang memang tergolong ukurannya cukup besar sekitar 45 cm, dan juga saluran drainase di rumahnya nyambung dengan kali yang ada di belakang perumahan sehingga tidak terjadi banjir. Tetapi ia juga menambahkan bahwa untuk drainase di Kota Serang ia menyatakan menyerah. Karena memang untuk drainase di Kota Serang masih jauh dari harapan selama ini. pemahaman akan pentingnya mendengarkan keluhan

dari masyarakat dan juga menyediakan wadah untuk menampungnya hanya dilakukan sebatas itu saja, dalam pelaksanaannya untuk penyelesaiannya sangat amat lambat. Para agen pelaksana yang ada belum menyadari terhadap standar dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

4.3.4.2. Respon

Respon yang dimaksud disini adalah bagaimana para pelaksana kebijakan merespon, menerima (*acceptance*), netral (*neutrality*), atau menolak (*rejection*). Respon juga masih berkaitan dengan bagaimana para agen pelaksana bisa paham / mengerti dari isi kebijakan melakukan tindakan dan merespon terhadap situasi yang ada. Permasalahan drainase yang ada menurut data *masterplan* yaitu karena adanya dwifungsi saluran irigasi juga menjadi saluran drainase, sehingga saat hujan turun, air yang ada disaluran irigasi di tambah air hujan dari saluran drainase, dan saluran semakin mengecil ke hilir. Sehingga terjadi luapan air disaluran irigasi. apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan meniptakan titik rawan banjir menjadi semakin banyak. Respon yang diberikan oleh instansi yang terkait membentuk kegiatan yaitu masterplan dan DED Sistem Drainase Kota Serang. Tapi jika menurut Adelin Sofyan (**I₁**) :

"Banyak keluhan yang datang dari masyarakat, terkadang dari masyarakat langsung datang ke PU. Kadang kita beritahu terlebih dahulu alurnya. semestinya yang mengajukan pertama itu RT, dari RT ke RW, RW nanti ke Kelurahan, Kecamatan bentuknya nanti berupa proposal, dari Kecamatan baru diberikan ke PU. Dari situ baru kita akan memilih mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bisa dinomorduaka. Kita tidak jarang mendapatkan keluhan yang cuma ibaratnya hanya untuk kepentingan pribadi. Setiap hujan datang jika ada wilayah yang banjir, kita ke lokasi kemudian kita pilah dulu, kita

monitoring ke semua wilayah Kota Serang. Untuk melihat genangan jadi titik-titik mana saja yang harus kita tanangi”.(Wawancara/ Rabu, 30 September 2015/ Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di Kantor Dinas)Pekerjaan Umum Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I₁) diatas narasumber mengatakan bahwa masyarakat yang datang untuk mengeluh banyak, terkadang pihak PU memberitahukan kepada masyarakat tentang alur yang tepat untuk menyampaikan keluhan. Mulai dari mengatakan urutan yang benar. narasumber juga mengatakan keluhan yang datang ke PU tidak semuanya langsung diproses, ada pemilahan skala prioritas. Dan ketika hujan datang para agen pelaksana semuanya turun untuk monitoring ke seluruh wilayah Kota Serang untuk melihat genangan. Dalam merespon terhadap masalah Syamsurizal (I₂)menambahkan : “kita kan tetep mengacu ketersediaan anggaran yah. Ketersediaan anggaran di pemkot itu sendiri. Tidak semerta-merta kita ngajuin *database* dengan jumlah beberapa ratus juta sedangkan di keuangan daerah ada kegiatan-kegiatan lain yang sama pentingnya. Yahh paling kita hmmm.. kita targetkan satu tahun anggaran itu inginnya satu kecamatan selesai”. (Wawancara/Selasa, 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang). Berdasarkan keterangan (I₂), respon yang di berikan ketikan penyelesaian penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang langkah awal yang dilakukan ialah melakukan pengecekan ketersediaan anggaran yang ada. Dan mendahului kegiatan yang dianggap terdesak.(I₂), mentargetkan 1 tahun untuk anggaran satu Kecamatan. Jadi satu tahun ditargetkan 1 Kecamatan sistem prasarana drainasenya sudah diperbaiki dan yang belum tersedia, akan di buat. Untuk sementara apabila turun hujan dan kemudian mengakibatkan banjir Dishubkominfo akan turun kelapangan

guna membantu mengatur lalu lintas, seperti keterangan yang diberikan oleh Yulius Anwar, Kasi angkutan bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kota Serang

(I₆) :

“Saat ini kondisi drainase di Kota Serang belum bagus, masih banyak drainase yang rusak sehingga sering mengakibatkan banjir ketika hujan turun, menanggapi permasalahan itu kalau dari Dishub hanya membantu untuk memberi rambu-rambu agar bisa mengurangi kemacetan yang ditimbulkan dari banjir”. (Wawancara/ Kamis, 17 September 2015/ Pukul 14:50 WIB/ dilakukan di kantor Dishubkominfo Kota Serang).

Respon pemerintah saat ini masih kurang tanggap dalam menghadapi masalah drainase di Kota Serang, instansi seperti Dishubkominfo (I₆) sejauh ini keterlibatannya hanya membantu kelancaran lalu lintas saja ketika hujan datang dan kemudian terjadi banjir. Hanya mengatasi masalah lalu lintasnya saja tetapi tidak menyelesaikan permasalahan pokoknya untuk dapat mencegah banjir yang menyebabkan kemacetan itu terjadi. N.p. Rahardian (I₁₀) juga menambahkan :

”Jika kita berbicara drainase tidak ada. Drainase yang di Cipocok. Terdapat drainase tidak? Tidak ada mb . Kalau adapun saya tidak tahu dimana, di Cinanggung?tidak ada perubahan. Cimuncang, kebon sayur pasar lama juga sama, tidak ada perubahan. Yang terlihat semakin tertutup drainasenya. (Wawancara/ Rabu, 4 November 2015/ Pukul 10:48 WIB/ dilakukan di kantor LSM Rekonvasi Bhumi Ciceri Bunderan).

Berdasarkan hasil wawancara diatas (I₁₀) mengatakan bahwa respon yang diberikan oleh pemerintah terkait penyediaan sistem prasarana drainase itu tidak ada, beliau juga mengatakan drainase di kawasan Cipocok tidak ada, di daerah Cinanggung juga tidak ada perubahan, dan juga kawasan Cimuncang, Kebon Sayur Pasar Lama tidak ada perubahan diperbaiki justru saluran drainasenya jadi lebih tertutup. Jika drainase menjadi semakin tertutup maka air hujan akan semakin sulit di tampung untuk di alirkan karena tertutup semen. dan jika kondisi

ini berlangsung lama dan terus saja tidak mengalami perubahan bukan hal yang tidak mungkin banjir yang berlangsung saat ini hanya sekitar 2 jam atau 3 jam akan bertambah lama jumlah waktunya hingga bisa berhari-hari dan hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa untuk respon dari pihak pelaksana kebijakan harus sesuai dengan urutan prosedur dan hal ini memakan banyak waktu sehingga masyarakat menilai respon pemerintah masih terasa lambat dalam hal menanggulangi banjir di ruas jalan.

4.3.4.3. Intensitas

Apabila penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana (*implementers*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performers*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Ade Sofyan (I₁)

“Disposisinya baik, tidak ada masalah apapun sejauh ini, karena memang semuanya sudah terbiasa seperti itu, surat masuk kebagian umum, kemudian nanti disampaikan ke pimpinan kemudian nanti diarahkan kemana suratnya. Kalau untuk penyampaian masalah dari setiap Desa. Kita ada kegiatan Musrebang, dimana nanti semua perwakilan masing-masing Desa dihadirkan untuk didengar keluhannya apa saja. Kemudian kita bikin laporan untuk kegiatan berikutnya, kalau ada keadaan yang mendesak yah kita dahulukan”. (Wawancara/Rabu, 30 September 2015/ Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Terkait disposisi antar dinas baik. Tidak ada masalah apapun. Hal ini juga disampaikan oleh Iphan Fuad, Dinas Tata Kota (I₃) :

“tidak ada trouble. Baik-baik saja. Semua SKPD biasanya rutin mengadakan rapat bulan. Pertemuan sering kami lakukan, jadi tidak ada trouble sejauh ini.”. (Wawancara/jumat, 28 Agustus 2015/ Pukul 10:33 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Tata Kota Kota Serang).

Berdasarkan wawancara dengan (I₃), dijelaskan bahwa tidak ada masalah apa-apa terkait disposisi antara DTK dengan instansi yang lainnya. Karena memang instansi yang terkait sering melakukan pertemuan dengan intensitas yang cukup sering. Walaupun yang dikatakan oleh (I₃) bahwa intensitas pertemuan yang dilakukan para agen pelaksana sering, akan tetapi hal ini tidak membuahkan hasil yang berarti pada bagian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang no.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 pada pasal 17 terkait Sistem Prasarana Drainase.

4.3.5. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana

4.3.5.1. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Seperti yang diutarakan oleh Adelin Sofyan Kasi bagian SDA dinas Pekerjaan Umum Kota Serang (I₁) terkait koordinasi antar aktivitas pelaksana :

”Untuk rapat koordinasi kita ada setiap bulan, dari mulai penerapan, fisik, biasanya muncul di dalam rapat koordinasi

semuanya”.(wawancara/ Rabu, 30 September 2015/Pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Seperti yang diutarakan oleh Adelin Sofyan (**I₁**) bahwa adanya rapat koordinasi yang rutin dilakukan setiap bulan. Di dalam rapat koordinasi itu juga terlihat bagaimana mulai penerapan pemasangan cetakan drainase/irigasinya, keadaan fisiknya bagaimana semua akan dikemukakan di dalam rapat koordinasi tersebut. Menyambut pernyataan (**I₁**) terkait koordinasi yang dilakukan. Syamsurizal (**I₂**) juga menambahkan :

”Kalau untuk dinas PU koordinasi dengan ekspektorat, BPK. ”jadi disini kanada 3 bidang. Kalau misalnya Jalan Protokol seperti Jalan Ahmad Yani. Dari Alun-Alun sampai rel itu kewenangan pusat jadi yang melakukan perbaikan itu orang Pusat melalui Provinsi.PU Kota Serang itu yang jalan-jalan otonom. Seperti jalan-jalan Kabupaten”. (Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ Pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk dinas Pekerjaan Umum sendiri berkoordinasinya langsung menyambung ke ekspekttorat BPK. Di dalam dinas PU sendiri ada 3 bidang didalamnya, masing-masing badan jalan itu ada kewenangannya masing-masing. Ada drainase yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada juga yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, untuk PU Kota Serang itu yang menangani jalan-jalan otonom, seperti Jalan Kabupaten. Jika kenyataan yang ada seperti ini pusat tetap saja menanggung tanggung jawab yang berat, karena tetap harus mengurus urusan setiap daerah. Penerapan otonomi daerah sepertinya belum bisa benar-benar di terapkan. Iphan Fuad, Kasi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota Kota Serang (**I₃**) juga menerangkan bahwa :

"Terkait di DED ini biasanya database. Karna drainase tidak bisa berdiri sendiri seperti yang saya katakan ada kesinambungan antara SKPD. Jadi otomatis kita tetap harus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas PU, PU Cipta Karya terkait koordinasi database kita dengan database mereka". (Wawancara/ jumat, 28 Agustus 2015/ Pukul 10:33 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Tata Kota Kota Serang).

Berdasarkan keterangan yang dijabarkan oleh (I₃) menjelaskan bahwa terkait drainase ini ada di dalam database. Penanganan drainase bukan 1 SKPD saja tapi melibatkan beberapa SKPD karena berkesinambungan. Jadi menurut Iphan Fuad dari DTK koordinasi dengan dinas-dinas yang berkaitan secara otomatis harus dilakukan. Agar tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaannya maka antar dinas saling berkoordinasi. Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh (I₃), Bambang Riyadi, Kasi Keselamatan Bidang Keselamatan Teknik sarana dan prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) (I₅) menambahkan:

"Pertama kita lihat terlebih dahuludilihat dari penyebab mengapa ada macet ternyata banjir, kemudian baru kita baru berkoordinasi dengan pihak PU. Meminta bantuan bahwa di depan Le dian, di depan Carefour, di Terowongan ini ada drainase yang tidak jalan tolong di perbaiki. Untuk menyampaikan demikian. Kita menyampaikan dengan surat untuk memperbaiki tempat ini agar tidak banjir. Karena banjir mengakibatkan kemacetan. Warga keberatan karena akibat kemacetan ini warga merasa dirugikan karena biaya ongkosnya menjadi tinggi. Kalau terkait koordinasi. Kapasitas kami hanya menyampaikan informasi". (Wawancara/ Kamis, 17 september 2015/ Pukul 13:58 WIB/ dilakukan di kantor Dishubkominfo Kota Serang)

Berdasarkan wawancara dengan (I₅), sebelum melakukan koordinasi pihak Dishubkominfo melihat situasi terlebih dahulu mengenai masalah yang ada di lapangan. Jika berkaitan dengan banjir maka pihak instansi yang dihubungi adalah pihak PU, biasanya melakukan koordinasi dengan melalui saluran telepon atau berupa surat. Dalam hal terkait drainase kapasitas dari Dishubkominfo hanya

menyampaikan informasi. Koordinasi yang dilakukan bukan hanya dengan sesama instansi pemerintah saja tetapi juga dengan pihak lainnya. Salah satunya yakni dengan pihak PT. Marga Mandalasakti (MMS) (I₁₂), pihak Dishubkominfo juga menambahkan terkait masalah koordinasi dengan pihak (MMS) :

“Koordinasi juga, semua datang. Kita diskusi bersama, setiap ada yang menimbulkan dampak. Dampak banjir, dan mungkin ada hal yang menimbulkan kemacetan itu nanti ada forum khususnya. MMS kita undang dengan surat, kita adakan rapat disertai dengan pihak dari kepolisian juga. Kalau diluar tol dan jalan raya yang dibawah tol itu kewenangannya MMS pemerintah daerah hanya mendukung”. (Wawancara/ Kamis, 17 september 2015/ Pukul 13:58 WIB/ dilakukan di kantor Dishubkominfo Kota Serang).

Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas, pihak Dishubkominfo melakukan koordinasi juga dengan pihak lainnya dalam hal ini dengan pihak PT. Marga Mandalasakti (I₁₂), mereka bermusyawarah ketika ada hal yang menimbulkan dampak dalam kasus ini masalah banjir. Jika banjir tersebut sampai membuat kemacetan di jalan raya nanti kita ada forum, MMS di undang dengan melalui surat, disertai juga dengan pihak kepolisian. Jika diluar tol dan jalan yang dibawah tol maka yang berwenang di dalamnya yakni PT. Marga Mandalasakti, pemerintah daerah hanya mendukung. hal ini juga memang didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh MMS terkait koordinasi, berikut petikan wawancara dengan MMS (I₁₄) :

“koordinasi jika ingin meminta ijin, Jalan tol berbatasan jadi kita harus sering berkoordinasi, meminta bantuan MMS untuk mengatur lalu lintasnya, kalau pemerintah mau melakukan perbaikan itu karena ditakutkan mengganggu aktifitas kelancarannya, hanya sebatas itu. (Wawancara/ Rabu, 23 Desember 2015/ Pukul 13:55 WIB/ dilakukan di kantor PT. Marga Mandalasakti Pusat Tangerang-Banten).

Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas, menjelaskan bahwa memang adanya koordinasi yang terkait dengan perijinan karena jalan tol itu ada perbatasannya maka harus melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan apapun seperti melakukan perbaikan. Pemerintah meminta bantuan MMS untuk mengatur lalu lintasnya yang dimaksud disini adalah lalu lintas di dalam tolnya karena hal ini ditakutkan akan mengganggu aktifitas kelancaran lalu lintas didalam tol.

Dalam hal koordinasi antar pihak terkait berjalan baik dan dalam setiap rapat atau koordinasi dilakukan juga meninjau terhadap kondisi terkini. Tapi banyaknya jumlah pihak yang dilibatkan dalam setiap koordinasi merupakan masalah tersendiri dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada dimasyarakat. Sehingga hasil penyelesaian dalam suatu permasalahan terasa lambat.

4.3.5.2. Konsisten

Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dalam penelitian ini memang informasi yang diberikan dari instansi pemerintah yang terkait ada keseragaman baik terkait koordinasi dengan semua pihak, akan tetapi justru ketidakkonsistenan dalam hal di lapangan. semua serentak

mengatakan saling berhubungan ketika adanya masalah di lapangan terkait penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) mengatakan bahwa jika ada masalah dalam implementasinya langsung saling berkoordinasi seperti yang sudah di jelaskan pada poin sebelumnya terkait koordinasi, para agen pelaksana memang sering mengadakan rapat untuk menyelesaikannya tapi pada kenyataan yang ada sudah hampir 5 tahun Perda ini ada tidak ada perubahan yang berarti dalam Implementasi Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem Prasarana Drainase di Kota Serang. Banjir dimana-mana ketika hujan datang. Prasarana Drainase yang rusak masih banyak, banyak jalan yang tidak didukung fasilitas penunjang saluran drainase yang menyebabkan banjir datang terus-menerus ketika hujan datang. Dan justru bertambah parah dari tahun ke tahun.

Ketidakkonsistenan juga ada disaat memberikan jawaban terkait yaitu salah satunya yakni terkait wewenang siapa yang seharusnya yang melakukan penyediaan dan pemeliharaan drainase di wilayah-wilayah tertentu. Seperti salah satu jalan yaitu di Terowongan Trondol (I₂), mengatakan bahwa :

“Jadi memang yang di Trondol itu jadi kendala juga. Kita sebenarnya sudah beberapa kali rapat dengan pihak-pihak MMS supaya minta dilebarin soalnya kendala dari pihak Jalan Tol. Kalau itu dilebarin dia harus menutup akses Jalan Tol. Kalau mau menutup akses Jalur Tol harus meminta ijin dari kementerian PU, tapi Alhamdulillah itu Trondol sudah kita beton Jalannya.”(Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari petikan wawancara dengan (I₂) diatas, narasumber mengatakan memang yang menjadi masalah juga adalah Jalan Trondol. Pihak PU mengatakan bahwa PU sudah sering melakukan rapat terkait masalah tersebut dan sudah meminta pihak MMS untuk melakukan pelebaran jalan. Tetapi sulit karena harus meminta izin kepada kementerian PU. Namun hal yang berbeda dilontarkan pihak PT. Marga Mandalasakti (I₁₄) :

“Untuk perdanya belum saya baca, saya pernah mendengar tapi belum mendalami, kalau dari segi wewenang sebetulnya ada di pihak Pemerintah, kan ada 2, ada Tol ada akses. Nah kemarin sudah ada Berita Acara, ada sebagian yang menjadi wewenang MMS, ada wewenang Pemerintah Daerah, untuk yang Trondol ini kebetulan masuk di pemerintah, segala macam pemeliharaan hariannya dan segala macam kalau ada masalah. Kalau di kita kemungkinan kalau dia butuh koordinasi. (Wawancara/Rabu, 23 Desember 2015/ pukul 13:35 WIB/ dilakukan di kantor PT. Marga Mandalasakti pusat Tangerang-Banten).

dari hasil petikan wawancara diatas, pihak MMS belum pernah membaca isi dari perda terkait Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Akan tetapi beliau mengatakan pernah mendengar tentang adanya perda tersebut. Untuk dari segi wewenang bahwa hal itu terletak pada Pemerintah. Kemarin pada pertengahan tahun sudah ada di Berita Acara. Untuk yang di Daerah Trondol sudah masuk wewenang Pemerintah Kota Serang, dari segi pemeliharaan maupun penyediaannya, pihak MMS hanya sebatas kalau butuh koordinasi saja. Dari pernyataan Slamet Ariyadi (I₁₄) tersebut terlihat adanya perbedaan informasi yang diberikan kepada peneliti saat melakukan wawancara beberapa saat yang lalu. Dari pihak Instansi Pemerintah bahwa pihak pemerintah sudah sering berkoordinasi kepada pihak MMS untuk dapat

melakukan pelebaran jalan yang berarti wewenang terletak pada pihak MMS jika pada keterangan yang diberikan oleh pihak PU, akan tetapi berbanding terbalik dengan yang dinyatakan pihak MMS bahwa semenjak pertengahan tahun lalu yang artinya sebelum peneliti melakukan wawancara dengan pihak PU. Pihak MMS mengatakan bahwa sudah ada pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah terkait penyediaan dan pemeliharaan di Daerah Trondol.

Tidak heran jika implementasi dari kebijakan Perda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Satu sama lain saling melempar tanggung jawab sehingga dalam pengerjaannya tidak maksimal. Karena implementasi tidak berjalan dengan lancar maka masyarakat banyak yang merasa dirugikan. Baik kerugian dari segi waktu, ekonomi, dan sosialnya.

4.3.6. Indikator Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

4.3.6.1. Kekondusifan

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja Implementasi Kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan adanya kondisi lingkungan *eksternal* yang kondusif. Dengan adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan Implementasi Kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali. Kemudian yang disampaikan oleh Adelin Sofyan Kasi bagian SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (**I₁**) sebagai berikut :

"Ada mba, misalnya kita mengerjakan Drainase Pasar Lam, disana kendalanya banyak karena kendalanya bagian dari rumah orang juga, terkadang susah juga, sudah kita beritahukan,dan menjadi

masalahnya sudah dibuat pondasi dan bangunan maju ke depan solokan banyak, ada bangunan-bangunan liar. Setiap ada pelaksanaan kita ada surat pemberitahuan ke Polsek, perangkat-perangkatnya kita kumpulkan agar mereka juga tahu dan ikut mengawasi". (wawancara/ Rabu 30 September 2015/ pukul 10:38 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari hasil petikan wawancara diatas pihak PU mengakui bahwa adanya masalah dalam pengerjaan drainase di Kawasan Pasar Lama. Ada kendalanya pada bangunan rumah yang dibangun di Kawasan Pasar Lama tersebut. Pondasi yang dibangun terlalu maju ke depan saluran air, kemudian juga adanya bangunan-bangunan liar. Sudah surat pemberitahuan ke Polsek, yang perangkat-perangkat aparat di kumpulkan agar mereka mengetahui dan ikut mengawasi. Berkaitan dengan masalah yang ada di Pasar Lama, Misri Kasi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kota Serang (I₇) juga menambahkan :

"Jadi begini setiap kami melakukan penertiban, kami melakukan SATNAKER antar Sektoral. Kenapa kita libatkan juga TNI, Polri, terkadang di belakangnya terdapat oknum POLRI, tidak jarang kerabat dari oknum. Kalau ditertibkan mereka tidak terima pada kenyataannya salah. Jadi mereka tahu hukum tetapi terkadang menyalahkan kami. Karna dibelakangnya terdapat oknum Polisi, jadi dia melawan. jika dilawan aka nada yang dimunculkan. Kadang-kadang direkayasa, di buatemosi. Jika saja Pemerintah sudah mengalokasikan. Contohnya Pasar Lama. Jadi kami juga merasa tersiksa batinnya. Kemudian ketika kita sudah melakukan pengurusan. 3 hari kita awasi. Ditungguin perumpamaannya seperti ikan jika didiamkan akan busuk pedagang menjadi rugi. Akhirnya PKL menjadi emosi ada fisik gitu karena merasa dirugikan. Bentroknnya bukan dengan Aparat tapi Satpol PP. Padahal yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan PKL DEPERINDAGKOP. Ayo kita duduk bersama dan setelah itu turun ke jalan. Kita melakukan pertemuan secara rutin antar Lintas Sektoral. TNI dan POLRI untuk memback-up. Dia tidak ikut mengeksekusi. Kalau ada yg macem-macem baru anggota Polisi. (Wawancara/ Senin, 24 Agustus 2015/ pukul 09:27 WIB/ dilakukan di kantor Dinas Satpol PP kota Serang).

Berdasarkan hasil ketikan wawancara diatas dengan (I₇), pihak Satpol PP melakukan satuan pelaksana kerja antar Sektoral yang melibatkan TNI, POLRI dikarenakan tempat yang akan dilaksanakan penertiban itu ada kerabat dari aparat penegak hukum, ketika dilakukan penertiban pihak yang ditertibkan tidak menerima hal tersebut meskipun pihak tersebut telah melanggar peraturan. Pihak yang ditertibkan sebenarnya mengerti hukum tetapi menyalahkan Aparat yang sedang bertugas menertibkan. Karena mereka punya *backing-an* Polisi, pihak tersebut menjadi melawan petugas. Terkadang pihak tersebut sering membuat kesal aparat yang sedang bertugas. Sebagai salah satu contohnya adalah Pasar Lama. Kalau seandainya saja pemerintah menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima, pihak Satpol PP siap untuk menggusur dan memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tempat baru tersebut. Satpol PP merasa bathin setelah digusur lapak dagangannya. Satpol PP mengawasi tempat tersebut selama 3 hari. Yang kemudian mengakibatkan PKL merasa emosi dan adanya adu fisik karena PKL merasa dirugikan.

Melihat dari hasil ketikan wawancara Adelin Sofyan (I₁) dan Misri (I₇) tadi terlihat bahwa adanya masalah dibidang sosial disalah satu wilayah untuk dapat bisa menerapkan Implementasi Kebijakan Perda tersebut. PKL yang berjualan dibahu jalan, lapak mereka sering menutupi saluran air sehingga sulit membersihkan saluran tersebut, kemudian dari bangunan rumah banyak yang memakan ruuang sehingga drainase juga tertutup oleh bangunan rumah tersebut menjadi salah satu hal penyebabnya. Saat melakukan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, perlawanan yang diberikan oleh para pedagang di wilayah Pasar

Lama, PKL sampai mampu melakukan hal tersebut karena adanya *backing*-an dari Aparat Penegak Hukum. Jika hal ini dibiarkan terus menerus untuk mendapatkan Kota Serang yang bersih aman dan bebas dari banjir menjadi jauh dari angan-angan. NP. Rahardian Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi (I₁₀) juga menambahkan :

“Saya tidak tahu jika masalah kepentingannya. Bisa saja ada, buktinya, banyak drainase yang masih dalam kondisi tidak terawat, yang penting kembali lagi ada atau tidaknya niat baik. Kalau kita bandingkan antara Walikota Kota Serang Saat ini dengan Walikota Kota Bandung Ridwan Kamil. Sama urusannya, kunci masalahnya tergantung niat baiknya”.(Wawancara/ Rabu, 4 november 2015/ pukul 10:48 WIB/ dilakukan di kantor Rekonvasi Bhumi Ciceri Bunderan-Serang).

pernyataan yang diberikan oleh (I₁₀), narasumber tidak mengetahui kalau tentang adanya kepentingan lainnya, narasumber juga berpendapat bahwa bisa saja hal itu terjadi, bisa saja ada faktor seperti dari pengaruh lingkungan *eksternal* seperti pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya yang menyebabkan mengapa kebijakan akan perda ini tidak berjalan dengan baik, karena melihat kondisi dari drainase di Kota Serang yang tidak mengalami perubahan. Senada dengan pernyataan-pernyataan sebelum masyarakat sebagai target dari sasaran kebijakan, masyarakat disini adalah masyarakat yang tinggal di titik rawan banjir (I₁₁) juga berpendapat bahwa :

“Ada, jika dilihat dari sosialnya masyarakat tidak peduli, kalau menurut masyarakat urusannya drainase itu urusan pemerintahnya, apalagi melihat sifat individualisme masyarakat kota pada saat ini.”(Wawancara/ Minggu, 13 Desember 2015/ pukul 13:22 WIB/ dilakukan di Perumahan Cluster Nirwana Asri/Wijaya Permai Ciracas-Serang).

Dari pernyataan yang diberikan oleh masyarakat yang bermukim di titik rawan banjir mengatakan bahwa ada faktor dai lingkungan sosialnya, terlihat dari sifat individual masyarakat yang menyerahkan semua beban tanggung jawab kepada pemerintah saja. Masyarakat yang menjadi Pedagang Kaki Lima (**I₁₂**) juga menyatakan bahwa : “Menurut saya yang bikin susah kerjanya itu mungkin dari segi koordinasinya. Kadang kepala kantornya udah bener tapi anak buahnya ga nurut. Atau engga kebalikannya”.(Wawancara/Rabu, 2 Desember 2015/ pukul 14:35 WIB/ dilakukan di Jalan Bayangkara). Di samping itu Syamsurizal, Kabid Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (**I₂**) berbeda pendapat dengan **I₁**, **I₇**, **I₁₀**, **I₁₁**, dan **I₁₂** yakni :

”Sejauh ini dukungan dari masyarakat bagus sekali mba. Seperti kita mendukung. Kita tidak mementingkan permasalahan politik yah. Misalnya ini jalan kerumah siapa jadi harus diperbaiki, kita hanya mementingkan kepentingan masyarakat saja mba”.(Wawancara/ Selasa, 29 September 2015/ pukul 14:55 WIB/ dilakukan di kantor dinas Pekerjaan Umum Kota Serang).

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa sejauh ini dukungan dari masyarakat di nilai sangat bagus, pihak PU tidak mementingkan permasalahan politiknya. Misalnya rumah siapa yang harus terlebih dahulu. Pihaknya hanya mementingkan kepentingan dari masyarakat saja. Jadi pernyataan dari (**I₂**) menyatakan bahwa tidak ada faktor dari politik yang menghambat proses Implementasi Kebijakan ini tidak berjalan dengan lancar. Kepentingan dari masyarakat yang paling diutamakan. Tapi yang diharapkan dari masyarakat Kota Serang utamanya bukan hanya sebuah kata-kata saja yang dapat diberikan oleh pemerintah, tindakan nyata untuk dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan cepat dan baik tentu ini sangat diharapkan. terlalu lambatnya pergerakan

yang dilakukan oleh Pemerintah justru akan semakin bertambah buruk drainase yang ada di Kota Serang ini. menghilangkan praktek *nepotisme* juga semoga bisa ditegakkan agar para Aparat yang melakukan penertiban bisa benar-benar dapat melakukan tindakannya tanpa harus ragu, sehingga saluran drainase yang selama ini tertutup oleh Pedagang Kaki Lima bisa kembali berfungsi normal sebagaimana mestinya. (untuk dapat melihat hasil petikan wawancara dengan semua narasumber terdapat pada lampiran 1.6 di bagian lampiran-lampiran).

4.4. Pembahasan

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Tentang Prasarana Drainase dan Pedestrian) jika dilihat dari masing-masing indikator menurut Metter dan Horn bahwa :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

b. Standar dan Sasaran Tertentu

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan, dari pernyataan yang diberikan oleh salah informan tersebut prasarana drainase di Kota Serang kondisinya belum masuk dalam katagori baik. Kemudian berdasarkan apa yang peneliti temukan dilapangan banyak prasarana drainase yang ada di Kota Serang dalam kondisi rusak, banyak sedimen yang menumpuk didalam saluran drainase, dan juga banyaknya rumput yang tumbuh liar di dalam saluran drainase, ketika diperhatikan peneliti saat terjun ke Lapangan hal tersebut terjadi karena kurangnya perawatan yang di lakukan pada saluran drainase, menjadi wajar ketika drainase yang ada tidak mampu

menampung air yang berlebih saat hujan turun. Penilaian atas tingkat ketercapaian para agen pelaksana belum sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Waktu

Dari wawancara yang telah peneliti dilakukan dengan informan, peneliti wawancarai guna mengetahui bagaimana indikator Sumber Daya Waktu berpengaruh dalam implementasi kebijakan suatu Perda, ketepatan menyelesaikan waktu pelaksanaan suatu kebijakan menandakan bahwa para agen pelaksana serius untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan dapat segera melanjutkan pekerjaan selanjutnya sehingga Kota yang nyaman bagi masyarakat Kota Serang dapat segera terwujud. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dalam pembangunan prasarana drainase di Kota Serang tidak ada masalah sama sekali segala sesuatunya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dipertegas dengan adanya pernyataan bahwa waktu penyelesaian pengerjaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

b. Sumber Daya Finansial

Setelah melakukan wawancara dan turun ke lapangan, ada permasalahan dalam finansial di dalam pelaksanaan kebijakan tentang penyediaan prasarana drainase di Kota Serang. Karna minimnya alokasi dana dalam penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang. Hambatan ini mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan, pada dasarnya ketidakadaan dana menjadikan tidak

mampunya pemerintah untuk membeli bahan baku dan menggaji pekerja. Temuan peneliti ketika di Lapangan peneliti, dari pernyataan yang dikemukakan (I₁₀) bahwa mudahnya bagi LSM untuk membantu warga Cipayung mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat sebesar 1 Miliar Rupiah. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan yang telah dikemukakan oleh (I₂) tentang minimnya dana yang tersedia.

c. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya yang berkualitas. Setelah melakukan wawancara dan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan indikator Sumber daya Manusia mempengaruhi implementasi kebijakan didapati bahwa jumlah sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, ini mempengaruhi kinerja yang ada, karena banyaknya beban pekerjaan. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk saat ini dikerjakan oleh 1 orang. Disamping itu penempatan pegawai di dalam instansi pemerintah tidak disesuaikan dengan *background* pendidikan dari masing-masing pegawai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Organisasi

Informan yang dimintai keterangan bagaimana organisasi mampu mempengaruhi pelaksanaan dari suatu kebijakan. Karakteristik dari seorang agen pelaksana dapat tercermin dengan kegiatan organisasi yang diikuti baik formal maupun informal, karena kinerja pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi

bagaimana agen pelaksana bersikap. Untuk mampu menentukan agen pelaksana yang tepat untuk pelaksana kebijakan di Lapangan. Dari pernyataan salah satu agen pelaksana dijelaskan bahwa agen pelaksana meminta bantuan Konsultan untuk membantu membuat perencanaan dana. Dalam hal ini agen pelaksana belum memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan masalah dari implementasi kebijakan.

b. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan untuk mengetahui bagaimana indikator luas wilayah implementasi kebijakan mampu mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Didapati bahwa para agen pelaksana yang terlibat tidak banyak. mengingat luas wilayah implementasi kebijakan tentang penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang, maka agen pelaksana yang dilibatkan seharusnya semakin banyak. Agen pelaksana yang dilibatkan harus proposional agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan sehingga implementasi dari isi kebijakan dapat segera terselesaikan.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

a. Pengetahuan

Mengenai pemahaman bagaimana agen pelaksana kebijakan tentang maksud dan standar dan tujuan kebijakan. Hal ini penting, karena bagaimanapun implementasi kebijakan yang berhasil, bisa menjadi gagal ketika para agen pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dari kutipan wawancara menjelaskan informan memiliki pemahaman mengenai kebijakan Perda mengenai penyediaan sistem

prasarana drainase di Kota Serang, informan mampu menjelaskan dengan detail proses bagaimana pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

b. Respon

Respon yang dimaksud disini adalah bagaimana agen pelaksana kebijakan menganggapi apakah menerima, bersikap netral, atau menolaknya. Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut mampu mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Tanggapan yang diberikan oleh agen pelaksana bersifat netral namun cenderung menolak saat ada masyarakat yang mengadu adanya masalah prasarana drainase dilingkungan mereka. Pada kenyataan di lapangan keadaan drainase di banyak tempat memang banyak yang rusak dan harus mendapatkan penanganan segera dari para agen pelaksana maka masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini dapat merasakan dampak positif dengan dibuatkannya Perda yang menaungi permasalahan drainase di Kota Serang.

c. Intensitas

Implementasi kebijakan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berhasil ketika para agen pelaksana memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan penerimaan yang menyebar dan mendalam, pelaksanaan kebijakan dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan rutin yang dikemukakan oleh agen pelaksana yang peneliti wawancarai seperti melakukan pemeliharaan swaluran drainase oleh informan tentu Kota Serang terbebas dari genangan air akan terwujud. Kenyataan di Lapangan peneliti masih menjumpai ruas jalan tanpa ada saluran drainase, saluran drainase yang di tumbuh Rumput-rumput hingga tinggi, seperti yang ada di depan jalan Pengadilan Tinggi Banten.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan indikator yang penting bagi berjalannya suatu implementasi kebijakan karena semakin baiknya koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, maka tingkat kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Dari petikan wawancara peneliti dengan para agen pelaksana, menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan lebih sering hanya ruang lingkup PU saja. Hal ini mempengaruhi implementasi kebijakan, prasarana drainase banyak yang belum tersedia di berbagai ruas jalan raya, pemeliharaan prasarana drainase tidak maksimal dan tidak banyak mencakup banyak wilayah.

b. Konsistensi

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para agen pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus sama informasi yang didapatkan dari masing-masing informan, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi komunikasi yang terjalin memang berjalan dengan baik. Didalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang adanya perbedaan informasi yang peneliti dapatkan dari pihak PU dengan Pihak MMS terkait kewenangan untuk penanganan di Terowongan Trondol, dan Pernyataan dari Pihak Instansi Pemerintah yang menjadi Pelaksana

kebijakan dengan Pihak LSM mengenai pendanaan. Perbedaan ini menjadi tujuan kebijakan sulit untuk dicapai.

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

a. Kekondusifan

Lingkungan mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Suatu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Seperti salah satu contoh kasus yang menjadi masalah drainase di Kawasan Pasar Lama Serang. Ketika di Lapangan sudah terlihat jelas bahwa fungsi drainase di Pasar Lama Serang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya Pasar tumpah, dan bangunan yang memakan jalan, saluran pengairan di Pasar Lama Serang terlihat buruk. Saat melakukan wawancara dengan Satpol PP, peneliti mendapatkan kenyataan bahwa adanya keterlibatan Aparatur Pemerintah yang membuat hal ini tetap berlangsung hingga sekarang. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang Kondusif. Sengan adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka kesimpulan akhir dari penelitian mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian). Dapat dijelaskan melalui teori yang digunakan peneliti yaitu teori implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2006:54) :

1. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan saluran drainase masih kurang. Sifat *individualisme* masyarakat perkotaan yang menjadikan masyarakat menjadi acuh terhadap lingkungan dan merasa tanggung jawab itu semuanya adalah pemerintah saja. Dan sifat masyarakat yang buruk seperti membuang sampah sembarangan juga menjadi salah satu penyebab mengapa implementasi kebijakan peraturan ini tidak dapat berjalan. Kebiasaan masyarakat yang berjualan diatas saluran drainase membuat saluran drainase sulit untuk dilakukan pembersihan, petugas Satpol PP juga sulit untuk melakukan penertiban karena adanya *backing-an* aparat penegak hukum dibelakang para Pedagang Kaki Lima.
2. Prasarana drainase pada Kawasan Perumahan Kota Serang tidak mampu menampung debit air yang ada ketika hujan datang. Ini di

karenakan pelaksanaan implementasi tentang penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang yang belum optimal dan perbaikan sistem prasarana drainase di seluruh wilayah menyebabkan banjir di beberapa titik. Saling melempar wewenang antara instansi pemerintah dengan pihak MMS. Ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. ditemukan ketidakcocokan dari terkait koordinasi tentang penyelesaian masalah di salah satu titik banjir yaitu pada Kawasan Trondol.

3. Prasarana drainase di jalan raya di Kota Serang banyak yang tidak terawat, banyak tanaman liar tumbuh dan juga banyak saluran drainase yang tertutup, serta di dalam saluran drainase banyak yang di temukan dengan tumpukan sedimen dan juga sampah. Sehingga hal ini menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang, karena drainase yang tersedia banyak yang tidak tersambung ke hilir maka air yang datang tidak dapat dialirkan dengan baik dan hal ini juga menyebabkan air menggenang. Penangan yang cepat yang disebutkan oleh instansi terkait pada kenyataannya di lapangan tidak ada. Penangan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan implementasi Perda ini hanya sebatas wacana dan mengatakan permasalahan pendanaan yang kurang yang menjadi penyebab utamanya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran agar implementasi peraturan daerah Kota Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030 (studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) :

1. Pentingnya sosialisasi keseluruhan wilayah Kota Serang, meliputi : Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok Jaya. Tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran drainase, dan pentingnya adanya saluran drainase. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
2. perlu adanya peninjauan kembali berita acara kesepakatan antara pemerintah dan pihak Swasta, hal ini dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan dan tugas pokok fungsi dari pemerintah dan pihak swasta menjadi jelas sehingga penyelesaian drainase di Kawasan Trondol dapat cepat ditanggulangi.
3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase yang sudah ada. Pemeliharaan drainase dilakukan dengan mempertimbangkan curah hujan yang terjadi di Kota Serang. Koordinasi dan kewenangan dengan pihak-pihak yang terkait harus berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, hal ini dimaksudkan

agar perencanaan pembangunan dan permasalahan drainase di Kota
Serang dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggriani, Niniek. 2009. *Pedestrian Ways dalam Perancangan Kota*. Klaten: Yayasan Humaniora
- Hakim, Rustam. Hardi Utomo. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Sondang P, Siagian. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori da Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taringan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko., 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Dokumen :

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Daerah Kota Serang No.6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang tahun 2010 – 2030

Sumber Lain :

Kota Serang Dalam Angka 2014, BPS Kota Serang

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.11. Surat Ijin Penelitian
- 1.12. Jadwal Wawancara
- 1.13. Rekapitulasi Temuan Lapangan
- 1.14. Memberchek
- 1.15. Kisi-kisi Pedoman Wawancara
- 1.16. Matriks Wawancara Setelah Reduksi
- 1.17. Lokasi Serta Kondisi Sistem Prasarana Drainase Di Kota Serang
- 1.18. Jadwal Bimbingan
- 1.19. Data-data/Dokumen Penelitian
- 1.20. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 1.2
Jadwal wawancara

Kode informan	Nama	Status	Waktu Wawancara	Jadwal Wawancara
I₁	Adelin Sofyan, S.E, MM	Kasi bagian SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	10:38 – 11:27 WIB	Rabu, 30 Sept 2015
I₂	Ir.H. Syamsurizal, MM	Kabid Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang	14:55 – 15:31 WIB	Selasa, 29 Sept 2015
I₃	Iphan Fuad, ST, M.Si	Kasi Pembangunan dan Pengendalian bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang	10:33 – 11.13 WIB	Jumat, 28 Agust 2015
I₄	Suryadinata, S.E	Kepala Sub. bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang	13:30 – 13:48 WIB	Kamis, 17 Sept 2015
I₅	Bambang Riyadi, S.H	Kasi Keselamatan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang	13:58 – 14:41 WIB	Kamis, 17 Sept 2015
I₆	Yulius Anwar, ATD. MT	Kasi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Serang	14:50-15:33 WIB	Kamis, 17 Sept 2015
I₇	Misri	Kasi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) Kota Serang	09:27 – 10:29 WIB	Senin, 24 Agust 2015
I₈	Saiful Bahri, MT	Kasubid Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang	14:53 - 15:20 WIB	Rabu, 12 Agust 2015

I₉	Hj. N. Saodah, S.Pd, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Serang	10:21-11:14 WIB	Rabu, 12 Agust 2015
I₁₀	NP. Rahardian	Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi	10:48-11:14 WIB	Rabu, 04 Nov 2015
I₁₁	Hammer	Masyarakat yang bermukim di kawasan titik banjir	13:22-14:55 WIB	Minggu, 13 Des 2015
I₁₂	Harisoni	Pedagang Kaki Lima di Kawasan titik Banjir	14:35-15:01 WIB	Rabu, 2 Des 2015
I₁₃	humaedi	Masyarakat pengguna Jalan	11:40-12:22 WIB	Senin, 14 Des 2015
I₁₄	Slamet Ariyadi	Supervisor Dept. Perencanaan PT.Marga Mandala Sakti	13:35-14:02 WIB	Rabu, 23 Des 2015

Lampiran 1.3
Rekapitulasi Temuan Lapangan

No	Dimensi	Temuan Lapangan	Kategori
1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan a. Standar dan sasaran tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan tidak merasa nyaman dengan kondisi drainase yang ada; 2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan perda; 3. Kondisi fasilitas drainase yang ada di Kota Serang banyak yang rusak, bersedimen, dan banyak yang ditumbuhi rumput, serta ukuran drainase yang kecil 	Belum baik Belum baik Belum baik
2	Sumber Daya a. Sumber Finansial daya b. Sumberdaya Waktu c. Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemanfaatan anggaran yang ada untuk pembangunan drainase; 2. Mudahnya LSM rekonvasi bhumi dalam meminta anggaran kepada pemerintah; 3. Waktu yang di targetkan dalam setiap pembangunan; dirasa cukup oleh dinas terkait 4. Sumberdaya manusia di instansi yang terkait penyediaan drainase di Kota Serang masih minim; 5. Penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahlian latar belakang pendidikan; 6. Kinerja pemerintah Kota Serang masih lambat dalam penyediaan drainase; 	Belum baik Baik Baik Belum baik Belum baik
3	Karakteristik Agen Pelaksana a. Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.kurangnya tindakan dalam 	Belum baik

	b. Luas Wilayah Implementasi Kebijakan	penyelesaian penyediaan prasarana drainase di Kota Serang; 2. banyaknya drainase di wilayah Kota Serang yang belum di tangani oleh instansi terkait;	Belum baik
4	Sikap/kecenderungan Para Pelaksana a. Pengetahuan	1. Perbaikan kondisi prasarana drainase yang ada di Kota Serang tidak bertahan lama, beberapa bulan setelah perbaikan, kondisi drainase saat ini dalam keadaan rusak;	belum baik
5	Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas Pelaksana a. Koordinasi b. konsistensi	1. Minimnya koordinasi dengan instansi terkait; 2. Perbedaan keterangan antara instansi pemerintah dengan pihak MMS; 3. Perbedaan pendapat terkait mendapatkan sokongan dana untuk pembangunan antara Instansi dinas yang terkait dengan LSM Rekonvasi Bhumi;	Belum baik Belum baik Belum baik
6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik a. Kekondusifan	1. Adanya pihak yang berpengaruh, yang membuat para agen pelaksana di lapangan sulit untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang menghambat pengaliran air; 2. Banyaknya pedagang yang melanggar sehingga membuat para pedagang menjadi sangat sulit untuk di larang berjualan diatas saluran drainase;	Belum baik Belum baik

Lampiran 1.5
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Teori Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam
Agustino (2006:164)

NO	Dimensi	Informan
1	Ukuran dari tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan. - Pelaksana Kebijakan (Pemerintah Daerah) a. Berapa banyak program yang sudah terealisasi dalam penyediaan dan pemeliharaan drainase	- Dinas PU Bidang SDA - Dinas PU Bidang Cipta Karya - Dinas Tata Kota - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang - PT.Marga Mandala Sakti - LSM
	- Target atau sasaran yang dituju (masyarakat) a. Tanggapan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas drainase yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang	- LSM - Masyarakat
2	Kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. - Sumber Daya Manusia a. Menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian b. Menggunakan Tim ahli dalam membantu penyediaan fasilitas drainase oleh pemerintah daerah Kota Serang	- Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang
	- Sumber Daya Finansial a. Sumber anggaran yang digunakan untuk malaksanakan penyediaan dan pemeliharaan drainase Kota Serang	- Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota

		<p>Serang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Waktu <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan waktu dalam pelaksanaan Program 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang - PT.Marga Mandala Sakti - LSM
3	<p>Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang
4	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap/Kecenderungan pelaksana kebijakan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> b. Respon 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota

		<p>Serang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Kota Serang - PT. Marga Mandalasakti
	c. Intensitas	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang
5	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi antar organisasi yang terkait a. Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang - PT. Marga Mandalasakti
	b. Konsisten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang - Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang - Dinas Tata Kota Kota Serang - Dinas Dishubkominfo Kota Serang - Bappeda Kota Serang
6.	a. Kekondusifan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bidang SDA Kota Serang

		<ul style="list-style-type: none">- Dinas PU Bidang Cipta Karya Kota Serang- Dinas Tata Kota Kota Serang- Dinas Dishubkominfo Kota Serang- Bappeda Kota Serang- PT.Marga Mandalasakti
--	--	---

Lampiran 1.6
Matriks Wawancara Setelah Reduksi

Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Metter and Horn

A. Pertanyaan Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang (I₁)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

I₁	Pertanyaan
Q₁	Apa langkah yang sudah di lakukan dalam rehabilitasi dan penyediaan sistem prasarana Drainase?
	<i>"setiap bulannya kita ada normalisasi jadi pembersihan saluran-saluran drainase pembuang. Diantaranya itu ada galian lumpur, pembuangan sampah yang ada di saluran, terus di babatan rumput supaya mengurangi tingkat kerusakan. Setiap ruas di kota serang. Drainase disini bukan drainase jalan tapi drainase pembuang"</i> .

2. Sumber Daya

I₁	Pertanyaan
Q₂	Berapa waktu yang digunakan untuk melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan drainase?
	<i>"tergantung pakatnya, minimal penunjukan waktunya itu 2 bulan. Penunjukan langsung itu sistemnya kita kayak mengundang perusahaan-perusahaan yang biasa mengerjakan saluran untuk tandernya tender langsung skala nya 50juta>200juta itu paket kecil. Kalau paket yg besar kita sudah LPSE sudah langsung ke Pusat Jika sudah lebih dari 200 juta."</i>

	<i>Kalau untuk paket besar jika di kiranya Cuma 3 minggu. Jika di atas 2 Milyar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4bulan waktu pengerjaannya”.</i>
--	--

I₁	Pertanyaan
Q₃	Biaya yang dibutuhkan Dinas PU Kota Serang dalam menjalankan isi kebijakan? Kendala yang dihadapi?
	<i>skala nya 50juta>200juta itu paket kecil. Kalau paket yg besar kita sudah LPSE sudah langsung ke Pusat Jika sudah lebih dari 200 juta. Kalau untuk paket besar jika di kiranya Cuma 3 minggu. Jika di atas 2 Milyar perkiraan waktu pengerjaannya bisa sampai 3-4bulan waktu pengerjaannya”.</i> <i>“sejauh ini tidak ada masalah yang berat”.</i>

3. Karakteristik Agen Pelaksana

I₁	Pertanyaan
Q₄	Apakah Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang menggunakan pihak swasta dalam pelaksanaan dari isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)? Alasannya?
	<i>“terkadang masyarakat di libatkan dalam pelaksanaannya”.</i>

I₁	Pertanyaan
	Kendala yang dihadapi pemerintah Dinas PU (Pekerjaan

Q ₅	<p>Umum) Kota Serang dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>“begini terkadang saluran pembuang drainase itu ka nada di tengah sawah. Jarak saluran dengan bibir saluran jaraknya ada yang 2 Meter, 5 Meter itu punya pemerintah, tapi terkadang begitu sudah kita pelimpahan dari kabupaten kan kota baru ka nada yang belum di kerjakan, nah..sedimentasi segala itu kan membentuk saluran dan menumpuk kemudian mengecil. Untuk memperbesar itu terkadang petani ini sedikit demi sedikit mengikis jadinya hilang begitu. Begitu ingin di perbesar lagi sesuai data yang ada mereka yang komplek karena itu tanah kita, paling itu kita sosialisasikan bahwa suratnya itu ada, yang dulu tanda tangan lurahnya dulu kita sosialisasikan, kita remukan permasalahannya itu apa, sudah oke semua baru kita kerjakan. Terkadang untuk pelaksanaannya seperti hujan besar, terus bencana alam. Apapun bisa saja memperhambat pengerjaan. Paling itu sih yang riskan”.</i></p>

I ₁	<p>Pertanyaan</p> <p>Q₆ Bagaimana cara Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
----------------	---

	<p><i>"paling kita mentoknya di kewenangan, karena kita ini kan terpentok kota, kabupaten, dengan provinsi itu kan setiap kementerian kewenangannya berbeda-beda, ada kewenangan kota, ada kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi terkadang kewenangan provinsi juga kewenangan kita provinsi yang mengerjakan".</i></p>
--	---

I₁	Pertanyaan
Q₇	<p>Berapa banyak agen pelaksana di Dinas PU (Pekerjaan Umum) yang dilibatkan dalam menjalankan isi kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)? Alasannya?</p>
	<p><i>"kan ada PPK,kabid, dari kabid turun ke pejabat teknis kegiatan, PPK ini ada bawahan tapi pembantu pelaksanaan teknis saja. Ada pengawasan nah kita melibatkan konsultan".</i></p>

I₁	Pertanyaan
Q₈	<p>Bagaimana Dinas PU (Pekerjaan Umum) menanggapi keluhan Masyarakat yang datang?</p>
	<p><i>"banyak keluhan masyarakat itu, terkadang dari masyarakat langsung datang ke PU. Kadang kita beritahu dulu alurnya. Harusnyakan yang mengajukan dulu itu RT, RT ke RW, RW nanti ke Kelurahan, Kecamatan bentuknya itu nanti proposal, dari kecamatan barulah dilarikan ke PU.dari situ baru kita pilih mana yang skala prioritas mana yang bisa di nomor</i></p>

	<p><i>duakan kadangkannya ada yang Cuma ibaratnya kepentingan pribadi. Ada kan yang setiap hujan datang itu banjir nah itu kita pilah dulu. Begitu hujan datang kota turun untuk monitoring ke semua wilayah kota serang. Melihat genangan jadi titik-titik mana saja baru kita tanangi”.</i></p>
--	---

4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana

I₁	<p>Pertanyaan</p> <p>Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) bagaimana disposisi di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Serang?</p>
Q₉	<p><i>“Disposisinya baik, tidak ada masalah apapun sejauh ini, karena memang semuanya sudah terbiasa seperti itu, surat masuk ke bagian umum, kemudian nanti di sampaikan ke pimpinan kemudian nanti di arahkan kemana suratnya. Kalau untuk penyampaian masalah dari setiap desa. Kita ada kegiatan musrembang, dimana nanti semua perwakilan masing-masing desa di hadirkan untuk di dengar keluhannya apa saja. Kemudian kita bikin laporan untuk kegiatan berikutnya, kalau ada keadaan yang mendesak yah kita dahulukan”.</i></p>

I₁	<p>Pertanyaan</p> <p>Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
Q₁₀	

	<p><i>"kalau koordinasi terkait drainase itu gg keluar-keluar khusus PU saja kalau untuk pembangunannya saja. Dalam penanganan permasalahannya juga PU sendiri saja. Semua dinas kan punya kerjaan masing-masing. Kalau bappeda itu kita punya kegiatan disini kita ajukan ke Bappeda kayak kemaren tuh ada verifikasi segala macam untuk kerjaan di DPKAD. Itu sebelum adanya kegiatan. Pengajuaan jadi BAPPEDA itu ngumpulin semua kegiatan baru nanti ada pengesahan".</i></p>
--	---

I₁	Pertanyaan
Q₁₁	<p>Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?</p>
	<p><i>"kalau rapat koordinasi kita ada setiap bulan, bagaimananya dari mulai penerapan, fisik, biasanya muncul disitu semuanya".</i></p>

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

I₁	Pertanyaan
Q₁₂	<p>Pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di lapangan?</p>

	<p><i>"pasti ada neng,, misalnya kita mengerjakan drainase pasar lama. Itu kendalanya banyak karena apa kendalanya rumah orang juga, kadang susah itu, paling kita kasih tau, masalahnya itu pondasinya yang maju ke solokan banyak. tanah juga kadang-kadang itu, yang pastinya itu adanya bangunan-bangunan liar. Kita setiap ada pelaksanaan kita ada surat pemberitahuan ke polsek, perangkat-perangkatnya kita kumpulin agar mereka juga tau dan ikut mengawasi".</i></p>
--	--

B. Pertanyaan Untuk Dirjen Cipta Karya (I₂)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

<p>I₂</p> <p style="text-align: right;">Q₁</p>	<p>Pertanyaan</p> <p>Apa saja yang dilakukan untuk dapat mendukung terlaksananya penyediaan sistem prasarana drainase yang telah di atur dalam perda?</p>
	<p><i>"gini mba adhitia, kalau drainase itu hanya bagian pelengkap saja. Kalau kita membangun jalan kalau dananya cukup di lengkapi dengan saluran drainase kiri kanannya. Terus kalau ada jembatan gorong-gorong jadi kita buat. Jadi kalau cipta karya ini fokusnya ke jalan pedesaan sama bangunan gedung. Kebanyakan karena dananya minim jadi kita fokuskan ke badan jalan dulu mba adhitia. Mungkin kalau dananya ada tambahan baru kita lengkapi dengan saluran drainasenya. Memang betul sih saluran drainase itu seharusnya ada biar badan jalan itu tidak cepat rusak. Jadi kan kalau ada air hujan jadi dia bisa masuk ke drainasenya".</i></p>

2. Sumber Daya

I₂	Pertanyaan
Q₂	<p>Dirjen Cipta Karya Kota Serang sebagai pelaksana dari isi kebijakan ini, bagaimana dengan waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini?</p>
	<p><i>"kalau kita ngebangun jalan itu ngebangun jalan poros desa itu paling lama 2 bulan/3bulan. Kalau untuk gedung itu 3-4bulan khusus bangunan".</i></p>

I₂	Pertanyaan
Q₃	<p>Biaya yang dibutuhkan Dirjen Cipta Karya Kota Serang dalam menjalankan isi kebijakan?</p>
	<p><i>"sekitar 200juta untuk satu ruas jalan. Sekitar untuk 400km.karena dananya minim jadi kita fokuskan ke badan jalan dulu mba adhitia. Mungkin kalau dananya ada tambahan baru kita lengkapi dengan saluran drainasenya".</i></p>

3. Karakteristik Agen Pelaksana

I₂	Pertanyaan
Q₄	<p>Kendala yang dihadapi pemerintah Dirjen Cipta Karya dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>"kendala secara teknis tidak ada. Secara dana iyah ada.karena dana ini kan kita anggarkan di buat perencanaan dulu. Di buat DED dulu nanti setelah DED itukan oleh konsultan muncul</i></p>

	<i>angkanya. Berapa sih yang dibutuhin di ruas jalan misalnya 200jt”.</i>
--	---

I₂	Pertanyaan
Q₅	Bagaimana cara Dirjen Cipta Karya Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan isi kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>“Karena kendalanya pada bagian pendanaan kita anggarkan di buat perencanaan dulu. Di buat DED dulu nanti setelah DED itukan oleh konsultan muncul angkanya”.</i>

I₂	Pertanyaan
Q₆	Berapa banyak agen pelaksana Dirjen Cipta Karya yang dilibatkan dalam pelaksanaan dari setiap kegiatan dari isi kebijakan khususnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>”biasanya itu pihak ketiga, karena tidak di tangani langsung oleh PU. Kalau tidak salah 10 orang dari pihak ketiga (kontaktor/pemborong). 10 orang itu pekerja dengan mandornya”.</i>

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

I₂	Pertanyaan
Q₇	<p>Bagaimana Dirjen Cipta Karya menanggapi terkait permasalahan sistem prasarana drainase yang ada di lapangan?</p>
	<p><i>"kalau menanggapi permasalahan penyediaan drainase misal terkait anggaran yang kurang, kita potong panjangnya jika dana yang keluar lebih sedikit dari anggaran yang diajukan. Jadi sesuaikan dengan jumlah anggaran jadi di kitakan sudah ada SSH (Standar Satuan Harga). Jadi misalnya permeter kubik itu berapa rupiah nah kita bagi".</i></p>

5. Komunikasi Antarorganisasi para pelaksana

I₂	Pertanyaan
Q₉	<p>Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>"kalau untuk dinas PU koordinasi dengan ekspektorat, BPK".</i></p>

I₂ Q₁₀	Pertanyaan Bagaimana komunikasi yang terjalin terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
	<i>"jadi disini ka nada 3 bidang. Kalau misalnya jalan protokol seperti jalan ahmad yani itu. Dari alun-alun sampai rel itu kewenangan pusat jadi yang melakukan perbaikan itu orang pusat melalui provinsi. Kalau di PU Kota Serang itu yang jalan-jalan otonom. Seperti jalan-jalan kabupaten".</i>

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

I₂ Q₁₁	Pertanyaan Pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di lapangan?
	<i>"sejauh ini dukungan dari masyarakat bagus sekali mba. Seperti kita mendukung. Kita tidak mementingkan permasalahan politik yah. Misalnya ini jalan kerumah siapa jadi harus di bagusin.kita hanya memntingkan kepentingan masyarakat saja mba".</i>

C. Wawancara dengan Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang (I₃)

1. Standard an Ukuran Kebijakan

I₃	Pertanyaan
Q₁	<p>Apa saja langkah yang sudah dilaksanakan dalam menunjang kegiatan penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?</p>
	<p><i>” Sementara ini, kita ini kan dinas baru, pecahan dari dinas pu baru berdiri itu januari 2012, jadi otomatis yang sudah kita lakukan untuk hal-hal kursial kita fisik sudah beberapa tapi belum maksimal yah karna memang kita dasarnya dari data base dulu”.</i></p>

2. Sumber Daya

I₃	Pertanyaan
Q₂	<p>Untuk membantu terwujudnya dari isi kebijakan penyediaan sistem prasarana drainase berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Kota (DTK)?</p>
	<p><i>” Sementara ini, kita ini kan dinas baru, pecahan dari dinas pu baru berdiri itu januari 2012, jadi otomatis yang sudah kita lakukan untuk hal-hal kursial kita fisik sudah beberapa tapi belum maksimal yah karna memang kita dasarnya dari data base dulu. Sejauh ini kita untuk data base tentang drainase ini belum tercover untuk semua wilayah. Yah karna itu tadi. Melihat kondisi lapangan yang sudah ada karena kadang kala ada hal-hal yang mendesak”.</i></p>

3. Karakteristik Agen Pelaksana

<p>I₃</p> <p>Q₃</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p style="text-align: center;">Kendala yang dihadapi Pemerintah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>"Kendala. Hmm... kendala yah itu terkait database kita belum punya database secara menyeluruh sistem prasarana drainase di pemukiman di kota Serang, Cuma yah kadang kita sebisa mungkin setiap tahun anggaran itu hanya di 3 kelurahan, sedangkan cangkupan kita kan 6 kecamatan, kan dari segi sdm kurang".</i></p>

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

<p>I₃</p> <p>Q₄</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p style="text-align: center;">Bagaimana cara Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>"itu kayaknya butuh proses yang cukup lama yah.. yang kesatu. Eehhh.. kita kan tetep mengacu ketersediaan anggaran yah. Ketersediaan anggaran di pemkot itu sendiri. Tidak semerta-merta kita ngajuin database dengan jumlah beberapa ratus juta sedangkan di keuangan daerah ada kegiatan-kegiatan lain yang sama pentingnya. Yahh paling kita hmmm.. kita targetkan satu tahun anggaran itu inginnya satu kecamatan selesai".</i></p>

I₃	Pertanyaan
Q₅	<p>Berapa banyak agen pelaksana yang dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dari program terkait sistem prasarana drainase?</p>
	<p><i>"nah....itulah point pentingnya. Yahh.. jadi permasalahan lah dari semua skpd di kota nih. Kita nih satu seksi, saya di bidang perumahan dan pemukiman itu hanya ada 2 pns, yang lainnya pkl hanya 2 juga jadi sedangkan kita juga itu di perkim kan tidak hanya menangani drainase saja yah.. satu drainase, jalan setapak, kita nanganin jalan lingkungan, kita nanganin air bersih, yahh jadi kesulitan kita dalam SDM".</i></p>

I₃	Pertanyaan
Q₆	<p>Dalam membantu pelaksanaan dari penyediaan sistem prasarana drainase, bagaimana cara Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang menanggapi?</p>
	<p><i>"kita berusaha semampu kita, kita sesuaikan dengan anggaran. Karena memang ada kecamatan yang belum kita sediakan drainasenya itu kita bikin anggarannya untuk tahun berikutnya".</i></p>

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

I₃	Pertanyaan
Q₇	<p>Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), bagaimana Disposisi di Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang?</p>

	<i>“tidak ada trouble. Baik-baik saja. Semua skpd biasanya rutin mengadakan rapat bulan. Pertemuan sering kami lakukan jadi gag ada trouble sejauh ini.”</i>
--	--

I₃	Pertanyaan
Q₈	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>”nah kalau misalnya terkait di DED ini biasanya database. Karna drainase itu kan tidak bisa berdiri sendiri seperti yang saya bilang ada kesinambungan antara skpd. Jadi otomatis kita tetap harus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas PU, PU cipta karya terkait koordinasi database kita dengan database mereka”</i>

I₃	Pertanyaan
Q₉	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
	<i>”Alhamdulillah baik dengan dinas terkait. Yah kadang kala yah itu terkait koordinasi terkait permasalahan terkait drainase kita bisa langsung “</i>

D. Wawancara dengan Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Serang (I₄)

2. Sumber Daya

I₄ Q₁	<p>Pertanyaan</p> <p>Bagaimana dengan kondisi SDM di instansi yang berwenang menangani penyediaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?</p>
	<p><i>“SDM di Dishubkominfo masih sangat minim. Sebagian besar pegawai disini bukan PNS (honoror dan magang)”.</i></p>

I₄ Q₂	<p>Pertanyaan</p> <p>Apakah pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya?</p>
	<p><i>“tidak semua pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan sebagian besar pegawai dishubkominfo adalah tenaga kerja magang. Alhamdulillah kerjanya sudah bagus, mudah-mudahan nanti kalau ada tes CPNS mereka bisa ikut/daftar CPNS dan menjadi pegawai tetap. Dalam menjalankan pemerintahan khususnya di dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang setiap pejabat seharusnya mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab tupoksinya. Hanya saja mungkin karena keterbatasan jumlah pegawai/PNS nya, maka banyak pekerjaan yang tumpang tindih. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merencanakan ingin adanya pegawai tetap dari luar daerah namun prosesnya tidak mudah harus melalui pemda atau atas nama sekretaris daerah. Juga pertimbangannya kalau mendatangkan dari luar daerah karena di pertimbangkan belanja pegawainya”.</i></p>

E. Wawancara dengan Kasi Keselamatan Dinas Perhubunganm, Komunikasi dan Informatika Kota Serang (I₅)

	<p><i>“koordinasi juga, datang. Kita rembuk bareng-bareng, setiap ada yang menimbulkan dampak. Dampak banjir, mungkin ada hal yang menimbulkan kemacetan itu nnti ada forum. MMS kita undang dengan surat, adakan rapat disertai dengan pihak dari kepolisian juga. Kalau diluar tol dan jalan raya yang dibawah tol itu kewenangannya MMS pemerintah daerah hanya mendukung”.</i></p>
--	--

F. Wawancara dengan Kasi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Serang (I₆)

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

I ₆	<p>Pertanyaan</p> <p>Sistem prasarana drainase berhubungan dengan lalu lintas angkutan umum, bagaimana menurut Kasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan, komunikasi, dan informatika (Dishubkominfo) menanggapi tentang sistem prasarana drainase di Kota Serang?</p>
Q ₁	<p><i>“saat ini kondisi drainase di Kota serang belum bagus, masih banyak drainase yang rusak sehingga banyak yang mengakibatkan banjir, menanggapi permasalahan itu kalau dari dishub paling membantu untuk member rambu-rambu agar bisa mengurangi kemacetan yang ditimbulkan dari banjir”.</i></p>

6. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

I ₆	<p>Pertanyaan</p> <p>Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian) bagaimana disposisi</p>
----------------	---

Q₂	antara atasan dan bawahan Kasi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishubkominfo?
	<i>“Disposisi tidak ada masalah. Dan aman-aman saja mba”.</i>

I₆	Pertanyaan
Q₃	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>“berkoordinasi dengan pihak PU. Kita menyampaikan dengan surat untuk memperbaiki tempat ini agar tidak banjir. Karena banjir mengakibatkan kemacetan. Warga keberatan karena akibat kemacetan ini warga merasa dirugikan karena biaya ongkosnya menjadi tinggi”.</i>

I₆	Pertanyaan
Q₄	Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
	<i>“ada banjir yah kita menyampaikan informasi yah nnti kita turun bareng2 baik itu dari pihak kepolisian, PU, Tata kota, dinas perhubungan, gorong-gorong kebijakannya ada di tata kota silahkan gorong2 di perbaiki”.</i>

G. Wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Operasi (I₇)

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana

I₇	Pertanyaan
Q₅	Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Q₁	Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>“jadi gini setiap kami melakukan penertiban, kami melakukan setnaker antar sektoral. kita libatkan juga TNI, Polri”. Supaya penertiban berjalan dengan baik lah. Karena memang susah-susah gampang untuk menertibkan PKL yang sering berjualan di atas saluran air. Hari ini ditertibkan besok ada lagi.</i>

I₇ Q₂	Pertanyaan Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
	<i>“setiap kali kita akan melakukan penertiban salah satunya penertiban PKL yang berjualan di atas saluran drainase kita selalu berkomunikasi dengan TNI POLRI.</i>

I₇ Q₃	Pertanyaan Pada saat pelaksanaan penyusunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi dari lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu?
	<i>“sebenarnya situasi di lapangan sering tidak kondusif. Kenapa kita libatkan juga TNI, Polri, kadang-kadang juga di belakangnya juga ada POLRI, kadang-kadang ada keluarganya. Kalau di tertibkan tidak terima padahal salah. Jadi dia tau hukum tapi kadang-kadang menyalahkan. Abong-abong di belakannya polisi jadi dia melawan yah dilawan tapi yang munculkan orang lain. Kadang-kadang dibikin-bikin, kesel, itu. Kalau saja pemerintah sudah mengalokasikan. Contohnya pasar lama. Kalau misalnya itu pemerintah sudah menyediakan tempat tetapi pkl tidak mau satpol pp siap untuk</i>

	<p><i>menggusur memindahkan kesana. Jadi kami juga kadang-kadang batin yah. Kenapa kita gusur nih. 3 hari dia nongkrong. Ditungguin ibaratnya kayak ikan di diemin busuk dia rugi. Akhirnya pkl emosi ada fisik gitu karena dia merasa di rugikan. Bentroknnya bukan dengan aparat tapi satopl pp. padahal yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan pkl deperindagkop”.</i></p>
--	--

H. Wawancara dengan Kasubid Kimpraswil BAPPEDA Kota Serang (I₈)

1. Standar dan Ukuran Kebijakan

I ₈	<p>Pertanyaan</p> <p>Jika dilihat dari pembangunan drainase dari tahun ke tahun. Apakah sistem penyediaan dan pemeliharaan drainase di Kota Serang saat ini lebih baik atau tidak berubah? Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini?</p>
Q ₁	<p><i>“memang drainase di Kota Serang ini sekarang belum bisa di katakan baik, masih jauh bila dikatakan sudah memenuhi standar Cuma yah sudah mulai banyak berubah karena mungkin bukan hal yang mudah untuk bisa menyediakan sistem prasarana drainase karena banyak faktor juga yang mempengaruhinya”.</i></p>

2. Sumber Daya

I ₈	<p>Pertanyaan</p> <p>Adakah biaya yang dipersiapkan dalam kegiatan musrebang?</p>
Q ₂	<p><i>“kalau anggaran yang khusus sekali tidak ada, karena setiap kita melakukan kegiatan di tahun ini misalnya sudah kita anggarkan</i></p>

	<i>di tahun sebelumnya, kegiatan yang dilakukan di luar jadwal kegiatan kita hanya disesuaikan dengan anggaran yang ada saja”.</i>
--	--

I₈	Pertanyaan
Q₃	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
	<i>”kalau drainase berate masuk dalam pembangunan fisik, kalau pembangunan ada mekanismenya, mekanisme yang kita sebut itu musrembang (musyawarah rencana pembanguna) jadi apapun bentuknya pembangunan, termasuk pembangunan fisik misalnya tahun 2015 yang sudah kemarin, kita agenda kemarin itu bulan maret/ february tingkat kelurahan melakukan musyawarah tingkat kelurahan, tingkat kelurahan itu yang diundang masyarakat, para tokoh, rt,rw, masyarakat mengusulkan entah itu pembangunan jalan, drainase, setelah itu di kompilasi oleh hasil musyawarah kelurahan bulan berikutnya di musrembang tingkat kecamatan kemudian dibahas kembali hasil musyawarah kelurahan hingga usulan itu menggunakan skala prioritas, kemudian di bulan berikutnya di tingkat kota. Di sampaikan juga hasil muusyawarah tingkat kecamatan di musrembang pemerintah kota, kita pilah bidangnya kemudian rencana tersebut di bawah skpd dilanjutkan kemudian sampai ke dewan, berdasarkan hasil musrembang yang telah di sepakati bersama hasil musyawarah itu”.</i>

<p>I₈</p> <p>Q₆</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p>Pada saat pelaksanaan penyusunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian), seberapa kondusifkah situasi dari lingkungan eksternal yakni lingkungan sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu?</p>
	<p><i>“kalau waktu penyusunan, saya tidak tahu banyak karena itu kan pemerintah dengan rakyat yang diwakili oleh dewan tapi yang jelas, setelah di perdakan itu di sosialisasikan ke skpd-skpd, ke masyarakat juga”.</i></p>

I. Wawancara dengan Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Serang (I₉)

1. Standard an Ukuran Kebijakan

<p>I₉</p> <p>Q₁</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p>Berapa waktu yang di butuhkan dalam kegiatan sebuah pembangunan? Dalam pembangunan sistem prasarana drainase Kota Serang berapa lama untuk dapat terciptanya sistem prasarana drainase yang baik?</p>
	<p><i>“Waktu yang dibutuhkan berbeda-beda mba Adhitia, kalau membangun sistem prasarana drainase untuk satu wilayah, satu contoh satu lingkungan tempat tinggal. Kurang lebih dua minggu kurang. Gimana kondisi di lapangannya”.</i></p>

2. Sumber Daya

I₉ Q₂	<p>Pertanyaan</p> <p>Bagaimana kualitas Pegawai yang bekerja di BAPPEDA Kota Serang?</p>
	<p><i>“kualitas pegawainya baik, semuanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain pegawai negeri ada juga beberapa pekerja honorer dan juga beberapa siswi SMA yang magang di BAPPEDA untuk bantu-bantu pekerjaan kita juga, kan repot kalau kita kerjakan sendiri karena jumlah Pegawai negeri disini tidak banyak, yahh.. untuk awal kita ajarin dulu apa pekerjaannya”.</i></p>

I₉ Q₃	<p>Pertanyaan</p> <p>Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?</p>
	<p><i>“masyarakat dilibatkan dalam membangunnya. Contoh perbaikan jalan di kecamatan. Pasti ada warga yang kita mintai bantuan untuk pelaksanaannya karena kan mereka yang punya wilayahnya. ada rasa memiliki jalan tersebut. Begitu juga kalau ada perbaikan drainase”.</i></p>

5. komunikasi Antar Anggota dan Aktivitas Para Pelaksana

I₉	Pertanyaan Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus : Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)?
Q₄	<i>“komunikasinya baik. Kita setiap bulan ada rapat, banyak hal kita bahas disana. Berhubungan dengan semua kegiatan yang akan dilaksanakan”.</i>

I₉	Pertanyaan Bagaimana komunikasi terkait berbagi informasi dari perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) antar Dinas terkait?
Q₅	<i>“yaitu, seperti yang saya bilang. Pada saat rapat disitu juga biasanya kita berbagi informasi tentang perkembangan kegiatan”.</i>

J. Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekonvasi

Bhumi (I₁₀)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

I₁₀	Pertanyaan Sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengamati tentang permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, apakah LSM mengetahui tentang Perda yang peneliti teliti? Dan bagaimana LSM menanggapi?
Q₁	

	<p><i>“baru tau, karena.. konsen dari LSM rekonvasi bhumi ini lebih konsen kepada ekosistem, nah 17 tahun kita bekerja itu tidak di wilayah urban. Tahun berapa gitu kita pernah menangani permasalahan urban itu. 2005 2006, Cuma akhirnya kita balik lagi ke masalah ekosistem. Ada mangruv. Kita tau ada kota serang 2000 berapa, forum kabupaten sehat, forum kota sehat tapi gag sehat-sehat orang maling semua”.</i></p>
--	--

2. Karakteristik Agen Pelaksana

I₁₀	Pertanyaan
Q₂	<p>Bagaimana respon Pemerintah Kota Serang terhadap keluhan yang di laporkan oleh masyarakat tentang permasalahan drainase di Kota Serang?</p>
	<p><i>”yah sekarang begini, kenapa harus nunggu keluhan lah, pemerintah tau orang mereka juga lihat. Rumahnya ngelewat. Itu kalau hujan ada air genangan terus banjir segala macam. Jadi persoalannya bukan masalah keluhan. Bukan, kalau drainase itu persoalan kota. Persoalan utility yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah kota ada atau tidak adanya keluhan. Permasalahan drainase dampaknya kan di rasakan oleh masyarakat, semua orang, terlihat oleh banyak orang. Kotanya menurut gue gag peduli”.</i></p>

I₁₀	Pertanyaan
Q₃	<p>Yang menjadi tantangan penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?</p>

”balik lagi, ketika kota ini di tetapkan kota ini apa yang mau dilihat, kalau kota bandung, itu mereka sepakat menjadikan kota bandung itu menjadi kota wisata sehingga ada wisata kuliner segala macem, terkait dengan kota itu mereka harus menyiapkan sarana dan prasarana kota itu biar memadai biar orang bisa datang dengan enak. Serang tuh gag ada.. sehingga kota ini terbangun menjadi liar tidak terpola. Serang itu mau jadi kota apa mau jadi kota indutri, mau jadi kota agraris atau kota apa. Itu gag ada, gag bunyi di kita, nah oleh karena itu kepedulian mereka terhadap utility tadi kayak misalnya jalan, kewenangannya ada yang bilang itu bukan kewenangannya di kami, kewenangannya di provinsi, pabelit kan, oke jalan kan begitu, apakah drainase juga mengikuti kewenangan tersebut? Oleh karena itu apa yang sudah di lakukan oleh pemerintah kota untuk membuat warga kotanya menjadi nyaman. Balik lagi pada orientasi pemerintahnya, pada kepala pemerintahnya walikotanya. Kalau dia berniat mensejaterakan masyarakat kotanya. Contohnya ridwan kamil banyak gebrakannya di bikin taman itu, inilah. Yang nikmatin kan warganya. Ini kapan walikotanya ngapain. Begini di kita kan bergantung kepada kebijakan kepala daerah. Kalau walikota-nya tidak punya niat untuk warganya perangkatnya juga akan melakukan hal yang sama jadi kegiatan itu hanya menjalankan kewajiban alakadarnya itu juga di korup abis-abisan.”

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

I₁₀ Q₄	Pertanyaan Menurut LSM Rekonvasi Bhumi situasi apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan dari isi kebijakan terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase yang ada di Kota Serang. Jika di lihat dari Segi Lingkungan Eksternal, Lingkungan Sosial, politik, dan Ekonomi?
	<i>“gue gag tau lah kalau masalah kepetingannya. Bisa saja ada, buktinya, banyak drainase yang masih gitu-gitu aja, Yah yang penting balik lagi kalau ada niat bisa. Kalau kita bandingin jaman sama ridwan kamil. Sama urusannya, kunci masalahnya tergantung niat baiknya”.</i>

K. Wawancara dengan Masyarakat Kota Serang: a. Masyarakat yang Bermukim di Kawasan titik rawan banjir (I₁₁)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

I₁₁ Q₁	Pertanyaan Sebagai sasaran dari kebijakan, bagaimana tanggapan anda sebagai masyarakat. Bagaimana penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?
	<i>“kalau untuk prasarana drainase di perumahan cluster nirwana asri/wijaya permai cukup baik, karena kenapa?karena terdapat kali kecil di belakang perumahan. Solokannya pun cukup sekitar 45cm kebawah. Kalau</i>

	ekonominya?
	<i>Ada, kalau dari sosial yah masyarakat gag mau tau, kalau menurut masyarakat urusannya drainase itu urusan pemerintahnya, apalagi melihat sifat individualisme masyarakat kota.</i>

L. Wawancara dengan Masyarakat: b. Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan titik banjir (I₁₂)

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

I₁₂ Q₁	Pertanyaan Bagaimana respon Pemerintah Kota Serang terhadap keluhan yang di laporkan oleh masyarakat tentang permasalahan drainase di Kota Serang?
	<i>“Respon pemerintah belum kelihatan mba, sampai saat ini tempat ini masih kebanjiran juga mba kalau hujan. Padahal hujan juga ga lama tapi sudah banyak genangan air. Paling suka ada mobil petugas yang angkutin sampah”.</i>

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

I₁₂ Q₂	Pertanyaan Sebagai pedagang, menurut anda kondisi yang menghambat berjalannya suatu kebijakan dari pemerintah itu dari segi apa saja, terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan sistem drainase di Kota Serang?
---	---

	<p><i>“Menurut saya yang bikin susah kerjanya itu mungkin dari segi koordinasinya. Kadang kepala kantornya udah bener tapi anak buahnya ga nurut. Atau engga kebalikannya”.</i></p>
--	---

M. Wawancara dengan Masyarakat: c. Masyarakat Pengguna Jalan (I₁₃)

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

I₁₃	Pertanyaan
Q₁	<p>Menurut anda sebagai masyarakat pengguna jalan, situasi seperti apa yang menjadikan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa berjalan maksimal? jika di lihat dari beberapa faktor, baik lingkungan sosialnya, lingkungan eksternal dari pemerintah itu sendiri atau pun dari segi politik dan ekonominya?</p>
	<p><i>“Lingkungan politik yang paling berpengaruh jalannya kebijakan itu. Harusnya kalau lingkungan politiknya bagus pasti jalan jalan sama gorong gorong di Serang ga bakalan banjir”.</i></p>

N. Pertanyaan Untuk Pihak Swasta: a. Pihak PT. Marga Mandala Sakti (I₁₉)

I₁₄	Pertanyaan
	<p>Apakah pihak dari Marga Mandala Sakti sudah mengetahui tentang adanya Perda Kota Serang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2030, terutama</p>

Q₁	<p>pada pasal 17 terkait tentang Penyediaan dan pemeliharaan sistem prasarana drainase di Kota Serang?bagaimana tanggapannya?</p>
	<p><i>“kalau perdanya belum baca, pernah saya denger tapi belum mendalami, kalau dari segi wewenang sebetulnya ada di pihak pemerintah, kan ada 2, ada tol ada akses. Nah kemarin sudah ada berita acara, ada sebagian yang menjadi wewenang mms, ada wewenang pemerintah daerah, untuk yang trondol ini kebetulan masuk di pemerintah, segala macam pemeliharaan hariannya dan segala macam kalau ada masalah. Kalau di kita sih paling kalau dia butuh koordinasi”.</i></p>

4. Karakteristik Agen Pelaksana





I₁₄	Pertanyaan
Q₂	<p>Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak swasta PT. Marga Mandala Sakti dalam menanggapi permasalahan drainase di Kota Serang?</p>
	<p><i>“itu kita mengetahui setelah drainasenya di bangun. Yang namanya wilayah itu kan berkembang, yang tadinya sawah jadi ada bangunan, yang tadinya diameternya berapa karena berkembang menjadi tidak tertampung lagi. Jadi di lakuin pelebaran drainase. kita ada tim nya, tim siap tanggap darurat, jadi kalau ada kejadian banjir, tim tersebut langsung secara otomatis langsung bekerja”.</i></p>




<p>I₁₄</p> <p>Q₂</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p>Bagaimana Koordinasi dengan instansi terkait pak, dalam hal ini mengenai tentang genangan air yang berada di bawah jalan tol, yang sering menimbulkan kemacetan?</p>
	<p><i>“jarang, koordinasi kalau mau minta ijin, kalau tol itu kan berbatasan, jadi harus koordinasi, minta bantuan mms untuk mengatur lalu lintasnya, kalau pemerintah mau melakukan perbaikan itu karena di takutkan mengganggu aktifitas kelancarannya sebatas itu.”</i></p>

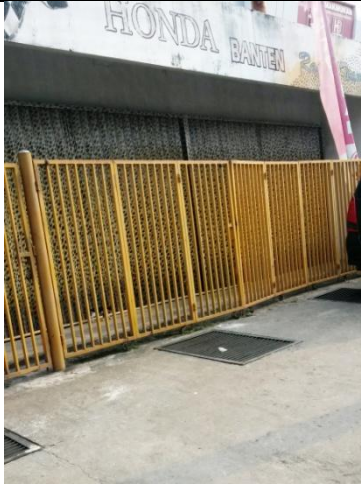


<p>I₁₄</p> <p>Q₃</p>	<p style="text-align: center;">Pertanyaan</p> <p>kalau ada galian kabel optic, suka ada koordinasi tidak pak?</p>
	<p><i>“ kalau kita mau ngelakuin kegiatan harus koordinasi dulu, takutnya terjadi masalah. Kita juga ada perjanjian kegiatan yang dilakukan itu sudah termasuk pembersihannya, jadi kalau ada yang melanggar ada denda.</i></p> <p><i>Kemarin kita ada proyek dengan PU kota serang. Ngelakuin perbaikan jalan, ngelakuin penutupan saluran”.</i></p>


LAMPIRAN 1.7



LOKASI SERTA KONDISI PRASARANA DRAINASE DI KOTA SERANG




No	Lokasi	Kondisi	Gambar
1	Terowongan Trondol	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran kecil • Terdapat banyak sedimen • Banyak sampah 	
2	JL. Jenderal Sudirman (Hotel Le Dian)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Sedimen • banyaknya sampah 	
3	JL.Raya Petir Cipocok, Bhayangkara	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong tertutup rumput • Saluran bagian hulu dan hilir gorong-gorong masih alami 	
4	JL.Raya Petir Pertigaan Lampu Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong tersumbat oleh endapan sedimen • Saluran bagian hilir gorong-gorong masih alami dan tertutup oleh rumput-rumput • Saluran di kiri dan 	


		kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen dan rumput-rumput	
5	JL. Ki Ajurum Kampung Sempu	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran bagian hilir gorong-gorong sudah terbuat dari pasangan namun dimensinya masih kecil dan berada di tanah milik warga halaman belakang • Saluran kanan kiri jalan tertutup oleh endapan sedimen 	
6	JL. Warung Pojok	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam saluran terdapat banyak sampah dan sedimen pada saluran 	
7	JL. Ahmad Yani (dealer Honda)	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup beton sehingga sulit dikontrol dan dilakukan perawatan oleh dinas terkait 	

			
8	JL. Ahmad Yani (Kantor Wali Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi 	
9	Bunderan Ciceri Indah	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi 	
10	JL.Raya Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran di bagian Hulu dan hilir gorong-gorong masih alami dan tertutup oleh rumput-rumput • Tidak ada saluran dari kiri dan kanan jalan • Gorong-gorong bagian hulu tertutup oleh rumput-rumput 	
11	JL.Raya Petir Depan Kantor Departemen Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Gorong-gorong tertutup oleh endapan sedimen • Saluran di bagian kiri dan kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen 	

12	JL.Raya Petir Sebelah Perumahan Citra Gading	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran drainase lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran di bagian hulu dan hilir gorong-gorong masih alami 	•
13	JL.Raya Pandeglang KM 6.6 Serang Pengadilan Tinggi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada gorong-gorong • Tidak adanya saluran pembuangan/outlet 	
14	JL.Perumahan Permata Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran lebih kecil dari banjir yang terjadi 	
15	Perumahan Bumi Serang Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup oleh endapan sedimen, sampah dan rumput-rumput 	
16	JL. Ahmad Yani Depan Bank Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong tersumbat oleh pipa sehingga aliran airnya terhambat • Kapasitas saluran lebih kecil dari pada debit banjir yang terjadi 	
17	JL.Lontar Keagungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran bagian hilir gorong-gorong sudah terbuat dari pasangan namun terdapat endapan sedimen dan sampah 	
18	JL.Raya Mayor Safei	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya saluran drainase di bagian kiri 	

		maupun kanan jalan	
19	JL. Yusuf Martadilaga Pojok Alun-Alun Depan Spot Hall	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup oleh endapan sedimen dan sampah • Gorong-gorong tertutup oleh endapan sedimen 	
20	JL.Raya Taktakan SMAN 3 Taktakan	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tertutup endapan sedimen dan rumput-rumput • Saluran di bagian hilir gorong-gorong masih alami dan dimensinya juga kecil serta banyaknya rumput-rumput 	
21	JL.Raya Cilegon Depan Sekolah SPPN	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran di kiri dan di kanan jalan tertutup oleh endapan sedimen dan ditumbuhi rumput-rumput • Saluran depan toko mebel di urug 	
22	Kampung Rujak Beling	<ul style="list-style-type: none"> • Muka air laut naik/ROB • Pintu air di bagian outlet sudah tidak berfungsi lagi dengan baik atau rusak • Endapan sedimen di saluran 	
23	Museum Banten Lama	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya tanaman air yang tumbuh/eceng gondok • Endapan sedimen di saluran • Tidak ada outlet ke pembuangan akhir 	
24	JL.Untirta	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran tidak terawat dan rusak/tidak berfungsi 	

25	JL.Jendral Sudirman (Patung)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong pada hilir lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Saluran pada bagian hilir masih alami dan banyak rumput • Terdapat tiang listrik yang dibangun di tengah saluran • Sebagian tidak dilengkapi saluran drainase 	
26	JL.Jendral Sudirman (Pasar Buah-Buahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput dan sampah • Saluran di bagian hilir gorong-gorong masih alami dan tidak jelas alurnya 	
27	JL.Saleh Baimin	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak sampah pada saluran 	
28	JL.Ayip Usman	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak rumput-rumput • Banyak sampah pada saluran, terutama pada gorong-gorong 	
29	Perumahan Bumi Agung	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput • Saluran masih alami 	
30	JL.Cinanggung (Rau)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi 	

31	JL. Samsun Bakri	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi 	
32	JL.Cimuncang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak rumput-rumput • Saluran tertutup endapan lumpur 	
33	Komplek Perumahan Cimuncang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas saluran & gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi • Banyak sampah pada saluran • Banyak sedimen yang mengakibatkan pendangkalan saluran 	
34	Masjid Al Ittihad	<ul style="list-style-type: none"> • Di atas saluran di bangun rumah yang mengakibatkan kapasitas saluran untuk menampung debit banjir yang berkurang • Saluran pada bagian hilir masih alami • Banyak sampah pada bagian hilir 	
35	Pasar Lama Serang	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran drainase tertutup • Saluran drainase kecil • Tidak ada saluran drainase • Pembuangan air ke bahu jalan 	

RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Mahasiswa

Nama : Adhitia Listiawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 18 September 1991
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : JL. Raya Jakarta Km.4 Komplek Bangdes No.54
Lingk.Lebak Gempol RT 04/10 Pakupatan Serang-Banten
No. HP : 089657034749
Email : Adhitalistiawati@gmail.com
Mizz_rebed18@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. 1997-2003 : SDN Banjar Agung 4
2. 2003-2006 : SMP Negeri 1 Cipocok Jaya

3. 2006-2009 : SMA Prisma Serang
4. 2009-2016 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

C. Pengalaman Organisasi

- 2000-2003 : Anggota Pramuka SDN Banjar Agung 4
- 2003-2006 : Anggota OSIS SMP Negeri 1 Cipocok Jaya
- 2004-2006 : Sekretaris Umum Paskibra SMP Negeri 1 Cipocok
Jaya
- 2005-2006 : Bendahara Umum Paskibra SMP Negeri 1
Cipocok
Jaya
- 2004-2006 : Anggota Paduan Suara SMP Negeri 1 Cipocok
Jaya
- 2006-2009 : Anggota OSIS SMA Prisma Serang
- 2006-2009 : Anggota BKC (Bandung Karate Club) Serang
- 2007-2009 : Anggota Paskibra SMA Prisma Serang
- 2010-2012 : Bendahara Umum UKM Klasik Untirta